

ANALISA

1978 - 2

**Vietnam — Kamboja,
Selat Malaka &
Masalah Rasial**



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staff CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA,
M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILA-
LAHI dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, Rufinus LAHUR

Harga per eks : Rp. 700,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor) : Rp. 8.000,— (bayar di muka)

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telp. 356532 — 35

PENGANTAR REDAKSI	77
-------------------	----

A.R. SUTOPO,

BEBERAPA SEGI KONFLIK VIETNAM-KAMBOJA : MENUJU HEGEMONI KAWASAN ?	79
--	----

Asnani USMAN,

KEDUDUKAN SELAT MALAKA SEBAGAI PERAIRAN TERITORIAL DAN JALUR PELAYARAN INTERNASI- ONAL DITINJAU DARI SEGI POLITIK INTER- NASIONAL	102
--	-----

Kirdi DIPOYUDO,

MASALAH RASIAL DI AFRIKA SELATAN	125
----------------------------------	-----

DAFTAR PUBLIKASI CSIS	146
-----------------------	-----

PENGANTAR REDAKSI

ANALISA bulan Pebruari 1978 ini menurunkan tiga buah karangan, yang masing-masing membahas satu masalah internasional yang hangat. Dalam karangan yang pertama A.R. SUTOPO mengulas sengketa Vietnam—Kamboja yang waktu belakangan ini meningkat dengan semakin sering terjadinya insiden-insiden perbatasan dan teritorial yang melibatkan pertempuran-pertempuran sengit. Salah satu faktornya ialah sejarah masa lampau, khususnya sengketa wilayah antara kedua negeri tetangga itu. Faktor lain ialah meningkatnya intensitas persaingan antara Uni Soviet dan RRC di Indocina menyusul penarikan Amerika Serikat. Uni Soviet lebih mendukung Vietnam, sedangkan RRC memihak Kamboja. Ambisi Vietnam untuk memegang kepemimpinan politik di Indocina rupanya juga merupakan satu faktor. Konflik Vietnam—Kamboja itu sudah barang tentu mempengaruhi stabilitas Asia Tenggara. Dengan demikian kawasan ini berkepentingan sengketa itu segera mungkin diselesaikan secara damai lewat perundingan-perundingan, tetapi dewasa ini prospek penyelesaian serupa itu belum kelihatan.

Karangan yang kedua, ditulis oleh Asnani USMAN, membahas Selat Malaka sebagai perairan teritorial negara-negara pantainya dan sebagai jalur pelayaran internasional. Mengenai selat itu timbul suatu masalah ketika Indonesia dan Malaysia menyatakan lebar laut wilayah 12 mil dan sesuai dengan itu menganggap Selat Malaka di berbagai tempat sebagai bagian perairan wilayah mereka dan hanya mengakui "hak lintas damai" (*right of innocent passage*). Negara-negara maritim besar kecuali RRC menolak klaim itu dan menuntut "hak lintas bebas" (*right of free passage*). Dengan demikian terliht adanya pertentangan kepentingan antara Indonesia dan Malaysia di satu pihak dan negara-negara maritim besar di lain pihak. Dengan tegas negara-negara yang pertama itu menentang segala usaha internasionalisasi Selat Malaka sambil memperjuangkan agar klaim mereka mendapatkan pengakuan internasional. Negara pantai yang ketiga Singapura mula-mula berbeda pendapat dengan kedua negara pantai lainnya, tetapi akhirnya sepakat untuk bersama-sama mengadakan pengaturan-pengaturan lalu lintas di selat itu dan menolak hak lintas bebas yang dituntut negara-negara maritim besar.

*Dalam karangan yang ketiga Kirdi DIPOYUDO membahas masalah rasial yang kini merupakan salah satu masalah yang paling penting dan mendesak. Fokus pembahasan adalah masalah rasial di Afrika Selatan di mana masalah itu paling menonjol karena dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang serta meresapi segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Dengan demikian negara itu menjadi fokus perjuangan anti rasialisme menuju realisasi keadilan rasial, yang menurut Dr. Henry Kissinger adalah isu dominan masing-masing bangsa dan antar bangsa jaman kita. Secara berturut-turut dibahas asal mula masalah rasial di Afrika Selatan, perkembangan politik rasial *apartheid*nya, dan perlawanan terhadap politik itu, baik dari rakyat kulit hitam negeri itu sendiri maupun dari negara-negara Afrika, negara-negara barat dan organisasi-organisasi internasional, khususnya OAU dan PBB. Sebagai penutup disajikan suatu peninjauan atas prospek dan bentuk penyelesaiannya.*

Pebruari 1978

REDAKSI

BEBERAPA SEGI KONFLIK VIETNAM — KAMBOJA : MENUJU HEGEMONI KAWASAN?

A.R. SUTOPO

PENDAHULUAN

Kemelut peperangan di kawasan Indocina antara kekuatan-kekuatan "rakyat progresif revolusioner" dan "kaum imperialis" dan "reaksioner" telah berakhir pada tahun 1975 yang lalu. Puncak kemenangannya ditandai oleh mundurnya Amerika Serikat dari keterlibatannya dalam kawasan itu. Bagi perencana-perencana strategi militer di Hanoi ini berarti berakhirnya masa penitikberatan dan konsentrasi perhatiannya terhadap masalah-masalah di dalam negerinya. Sejak itu para perencana strategi militer di Hanoi mulai memiliki keleluasaan yang lebih besar lagi dalam mencurahkan perhatiannya terhadap dunia luar Vietnam semata-mata. Hanoi mulai memikirkan mana yang akan menjadi sumber ancaman bagi keamanannya di masa yang akan datang, berpikir-pikir tentang siapa teman siapa lawan, dan mencari jalan apa yang paling baik untuk memberikan jaminan maksimum bagi keamanan negerinya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Hanoi setelah berakhirnya Perang Vietnam ialah hubungan negeri itu dengan Kamboja. Meskipun kedua-duanya, Kamboja dan Vietnam, diperintah oleh rezim komunis, ternyata terdapat pertanda adanya konflik kepentingan di antara mereka. Konflik kepentingan ini justru sekarang tambah kelihatan dengan semakin seringnya terjadi insiden perbatasan dan teritorial yang melibatkan pertempuran di daerah-daerah perbatasan bersama mereka. Skala pertempuran di daerah perbatasan meningkat pada penghujung tahun 1977 dan dalam memulai lembaran awal tahun 1978.

Sejarah masa lalu tampaknya memiliki andil dalam terjadinya konflik-konflik di sepanjang perbatasan kedua negara ini. Sehubungan dengan itu perlu diingat kembali pernyataan Bernard K. Gordon yang mengatakan bahwa telah timbul banyak masalah yang semakin mempertajam ketegangan-ketegangan Vietnam—Kamboja sejak kemerdekaan mereka. Dari problem-problem itu, persengketaan teritorial merupakan gejala yang paling jelas.¹

Ada beberapa masalah yang mempengaruhi stabilitas politik dan hubungan antara negara-negara di kawasan Indocina khususnya, yang dapat berpengaruh juga terhadap kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Mundurnya Amerika Serikat dari gelanggang politik Indocina akan mempengaruhi tingkat intensitas persaingan dua negara besar lainnya, Republik Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet, untuk berebut pengaruh di Asia Tenggara khususnya di kawasan Indocina. Vietnam sendiri sebagai negara yang paling kuat di kawasan itu perhatiannya mulai diarahkan ke luar dan bermaksud untuk memegang kepemimpinan politik di kawasannya. Tetapi negara-negara yang baru saja lepas dari masa perang dan kemelut di dalam negeri yang cukup panjang, masih dihadapkan kepada persoalan dalam negeri yang rawan, seperti masalah perekonomian nasional, persatuan dan kerukunan bangsa, pembangunan, dalam menuju masyarakat yang mereka cita-citakan masing-masing. Masalah-masalah itu ternyata sekarang sedang dihadapi oleh dua negara yang bertetangga dan seideologi tetapi juga menimbulkan konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan di antara mereka karena persepsi yang berbeda.

Konflik yang terjadi di kawasan Indocina tentu akan mempunyai pengaruh terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Ketegangan kawasan dapat meningkat karena konflik antar negara biasanya menarik kehadiran negara-negara besar untuk mengadu peruntungannya di tempat yang bersangkutan. Tulisan ini berusaha untuk mengidentifir beberapa permasalahan yang bertalian dengan konflik Vietnam—Kamboja dewasa ini. Pertama akan dibicarakan mengenai kemungkinan faktor-faktor yang turut mempengaruhi meningkatnya konflik negara tersebut. Pada tahap berikutnya akan dibicarakan mengenai perspektif dan implikasi dari konflik tersebut yang kemudian diakhiri dengan penutup.

1 Bernard K. Gordon, *The Dimensions of Conflict in Southeast Asia*, (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1966), hal. 48

PERSOALAN WILAYAH DAN WARISAN SEJARAH

Persengketaan mengenai kedaulatan wilayah merupakan salah satu gejala yang paling jelas dalam konflik antara Vietnam dan Kamboja dalam sejarah modern dewasa ini. Perselisihan mengenai kedaulatan teritorial ini mempunyai akarnya dalam sejarah masa lalu hubungan dua negara bertetangga tersebut. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa Kamboja dan Vietnam sekarang merupakan, seperti halnya sejarah bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya, kelanjutan dari sistem kerajaan dan penjajahan masa lalu mereka masing-masing. Kerinduan atau nostalgia akan kejayaan masa lampau yang pernah dialami oleh bangsanya mengambil peranan yang cukup penting dalam persepsi politik dari elite yang memegang tampuk kekuasaan dalam sejarah modern Kamboja. Keadaan ini tampaknya juga berlaku bagi para penguasa yang sekarang memimpin Kamboja — yaitu setelah kaum komunis menguasai negeri itu sejak bulan April 1975.

Kamboja pernah mengalami masa kejayaan dalam sejarah masa lampainya yaitu pada sekitar abad ke—12 dan abad ke—13. Luas daerah kekuasaannya pada masa itu hampir mencapai Birma di sebelah barat, di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan kerajaan Champa, di bagian selatan meliputi hampir seluruh bagian Vietnam Selatan sekarang dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di bagian utara daerahnya hampir mencapai daerah perbatasan antara Laos—RRC sekarang. Tetapi luas wilayahnya itu ternyata tidak dapat dipertahankan terus. Secara berangsur-angsur wilayah kerajaan Kamboja menjadi korban perebutan kekuasaan dan perluasan daerah yang dilakukan oleh Muangthai dan Vietnam (yang dahulu disebut Annam).¹ Bahkan nyaris seluruh wilayah Kamboja menjadi daerah taklukan dari atau Muangthai atau Vietnam dalam abad ke—18 dan permulaan abad ke—19.

Pada dasarnya perubahan-perubahan garis perbatasan antara Kamboja dengan negara-negara tetangganya, khususnya antara Kamboja dan Vietnam, tidak hanya terjadi pada sekitar abad-abad 18 dan 19. Perubahan-perubahan atau pergeseran demarkasi perbatasan antara kedua negara ini masih terus berlangsung hingga berakhirnya Perang Dunia II. Bahkan sampai dengan dicapainya kemerdekaan

¹ Charles A. Fisher, *Southeast Asia, A Social, Economic and Political Geography*, (London, Methuen & Co., Ltd., 1969), hal. 109—115

negara-negara di kawasan Indocina persoalan perbatasan yang belum definitif selalu muncul dalam hubungan mereka. Sejarah modern bangsa Kamboja dan Vietnam sekarang tampaknya merupakan suatu proses yang belum terhenti dari kaitan sejarah masa silam bangsa tersebut. Hal ini ditandai oleh sikap para pemimpin Kamboja yang tidak jarang mempersoalkan wilayah, daratan maupun kepulauan, yang sekarang sedang dikuasai oleh negara-negara tetangganya, khususnya oleh Vietnam.

Ada beberapa contoh yang dapat menggambarkan perselisihan dua negara bertetangga itu yang mempunyai kaitan dengan masalah kedaulatan teritorial. Kiranya tidak perlu untuk menarik terlalu jauh kepada sejarah masa silam hubungan Vietnam—Kamboja untuk melihat menonjolnya klaim wilayah tersebut. Pada tahun 1949 misalnya, sebelum Kamboja memperoleh kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Perancis para pemimpin Kamboja telah menentang tindakan sepihak pemerintah kolonial dalam memasukkan Cochinchina (bagian paling selatan Vietnam sekarang) ke dalam wilayah Vietnam. Dalam Konferensi Jenewa tahun 1954 mengenai Indocina sekali lagi Menteri Luar Negeri Kamboja mengajukan tuntutan atas daerah tersebut. Pada pokoknya, waktu itu pemerintah Kamboja memperingatkan bahwa pemerintah kolonial Perancis telah melakukan kesewenangan dalam menentukan pembagian wilayah di kawasan Indocina khususnya yang menyangkut Kamboja—Vietnam dan Kamboja telah memprotesnya sejak abad ke—19.¹

Pada jaman jayanya pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk yang lalu persoalan kedaulatan teritorial merupakan salah satu sebab ketidakrukunan antara Kamboja dengan Vietnam Selatan. Misalnya masalah siapa yang mendaulat pulau-pulau di daerah Teluk Siam menyebabkan memburuknya hubungan Sihanouk-Ngo Dinh Diem. Tentu saja persoalan ini ada rangkaiannya dengan kedudukan Kamboja yang waktu itu diapit oleh dua negara sekutu Amerika Serikat, yaitu Muangthai di sebelah barat dan Vietnam Selatan di sebelah timur, sementara Kamboja melakukan politik netral.² Tambah lagi perlakuan yang kurang baik dari pemerintah Vietnam Selatan terhadap penduduk

1 Bernard K. Gordon, *op. cit.*, hal. 46—48

2 *Ibid.*, hal. 53—54

Vietnam keturunan Kamboja, lazim disebut suku Khmer Krom, semakin membuat komplikasi dalam hubungan antara Kamboja dan Vietnam.¹

Persoalan mengenai siapa yang berhak atas kedaulatan beberapa kepulauan di daerah Teluk Siam ini timbul kembali setelah berkuasanya kaum Komunis di Kamboja dan setelah jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan Vietnam Utara. Pada tahun 1975 itu telah terjadi suatu pertempuran antara pasukan Kamboja dan Vietnam untuk memperebutkan sebuah pulau yang dikenal dengan nama Paolo Wai (sering disebut juga dengan nama Kaoh Wai) yang dimenangkan oleh pasukan Vietnam. Dengan demikian, walaupun sudah sama-sama penguasa komunis yang memerintah dua negara tersebut, kenyataan itu tidak menghalangi terjadinya bentrokan fisik bilamana kepentingan nasional masing-masing bertemu dalam satu medan.

Konflik-konflik di sekitar daerah perbatasan kembali diungkapkan pada bulan Agustus 1977 yang lalu ketika pasukan kedua negara tersebut terlibat dalam suatu pertempuran perbatasan.² Menghadapi situasi ini Vietnam kemudian mengirimkan Jenderal Vo Nguyen Giap ke daerah perbatasan yang sedang panas itu. Ada dua versi mengenai alasan kenapa pertempuran perbatasan ini terjadi antara Kamboja dan Vietnam setelah lebih dari dua tahun dikuasai oleh kaum komunis. Versi pertama menyatakan bahwa pertempuran ini terjadi karena pasukan-pasukan Khmer Merah yang melakukan pengejaran terhadap para pengungsi Kamboja yang lari ke arah wilayah Vietnam telah menyeberangi daerah perbatasan Vietnam. Versi lainnya mengatakan bahwa pertempuran itu bermula dari penumpasan terhadap para pemberontak dan pengacau di Vietnam Selatan yang dilakukan oleh pasukan Vietnam di daerah perbatasannya dengan Kamboja dan dalam pengejarannya pasukan Vietnam itu menyeberangi daerah perbatasan Kamboja.³ Keadaan ini jelas menggambarkan betapa masalah perbatasan dari kedua negara masih belum dibatasi secara jelas.

Kejadian ini diulangi lagi pada tutup tahun 1977 dan dalam membuka tahun baru 1978. Skala pertempuran kali ini jauh lebih besar

1 John F. Cady, *The History of Post-War Southeast Asia : Independence Problems*, (Ohio University Press, 1974), hal. 398—403

2 Nayan Chanda, "That's far enough, says Hanoi", dalam *Far Eastern Economic Review*, 19 Agustus 1977, hal. 10—12

3 *Ibid.*

daripada pertempuran-pertempuran perbatasan yang terjadi sebelumnya, bahkan Vietnam sempat masuk ke dalam wilayah Kamboja sampai beberapa puluh kilometer.¹ Kembali lagi tuduh-menuduh antara satu dengan lainnya bahwa pihak lain telah memulai melanggar kedaulatan wilayah, melakukan kekerasan, pembunuhan, perampokan dan perkosaan terhadap penduduk sipil. Tampaknya melalui peristiwa-peristiwa tersebut menjadi nyata bahwa faktor perbatasan, dus menyangkut kedaulatan teritorial, merupakan salah satu alasan terjadinya konflik-konflik kepentingan antara mereka. Atau paling tidak, ketidakjelasan perbatasan dimanfaatkan untuk membuat alasan atas maksud-maksud lain dari masing-masing pihak yang kepentingannya tersebut dapat diselubungi dalam konflik-konflik perbatasan atau teritorial.

Ada hal lain yang memperpeka masalah kedaulatan wilayah dalam hubungan Kamboja—Vietnam itu. Hal itu ialah perasaan anti yang tertanam di kalangan bangsa Kamboja (Khmer), atau setidaknya rasa curiga, terhadap bangsa Vietnam yang agresif. Sebelumnya telah disebutkan tentang ekspansi masa lalu dari bangsa Vietnam ke dalam wilayah Kamboja yang makin mempersempit wilayah kerajaan Kamboja. Keadaan yang demikian ini ditambah lagi dengan makin masuknya bangsa Vietnam ke Kamboja sebagai akibat kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah kolonial Perancis dalam program perkebunan dan administrasi Kamboja. Program yang dilancarkan oleh pemerintah Perancis untuk memperoleh keuntungan ekonomi di Kamboja itu, antara lain dengan membuka perkebunan-perkebunan di Kamboja, menghasilkan akibat sampingan, yaitu semakin berperannya pendatang-pendatang dari Vietnam dalam bidang ekonomi dan birokrasi di Kamboja.² Di Kamboja terdapat antara 300-400 ribu orang keturunan Vietnam yang dahulu banyak menghuni ibukota Kamboja, Phnom Penh.³ Hal ini mengakibatkan semacam sakit hati di kalangan bangsa Kamboja yang seharusnya menjadi "tuan" di negerinya sendiri, tetapi justru di negerinya hidup lebih melarat dan sengsara di desa-desa dalam sektor pertanian dibanding dengan kehidupan dari kaum pendatang Vietnam yang memang memiliki kecakapan lebih baik.

1 "When Communists Collide", *Time*, 16 Januari 1978, hal. 8—9

2 Lihat misalnya, John F. Cady, *op. cit.*, hal. 372—374 dan Charles A. Fisher, *op. cit.*, hal. 567—570

3 Tentang jumlah penduduk Kamboja keturunan Vietnam ini didasarkan pada data dari Cady, *ibid.*, dan Fisher, *ibid.*, hal. 559

Sementara itu dalam masa perjuangan kemerdekaan Indocina yang kemudian diakui melalui Konferensi Jenewa tahun 1954, gerakan komunis di Kamboja merasa ditinggalkan oleh rekannya kaum komunis Vietnam yang semula sama-sama sebagai warga gerakan komunis di Indocina, yang waktu itu disebut sebagai Partai Komunis Indocina.³ Menurut hasil dari Konferensi Perdamaian Jenewa 1954 mengenai Indocina antara lain disebutkan bahwa kedaulatan atas wilayah Kamboja diserahkan kepada raja, sementara kelompok kaum komunis di Kamboja tidak mendapatkan konsesi daerah kekuasaan. Ini berbeda dengan gerakan komunis lainnya di Indocina yang mendapatkan konsesi : Partai Komunis Vietnam mendapatkan kekuasaan atas daerah Vietnam bagian utara sedangkan kaum komunis di Laos, Pathet Lao, memperoleh pijakan kekuasaan di dua propinsi bagian utara Laos. Malahan kelompok Kamboja dipaksa untuk mengakui kedaulatan raja tanpa diakui haknya sebagai kekuatan politik. Di kalangan pemimpin Vietnam pengorbanan kelompok Kamboja dalam konferensi Jenewa tersebut hanya dipandang sebagai taktik dalam usahanya mengkonsolidasi gerakan komunis di Indocina, tetapi hal ini dipandang secara lain oleh kaum komunis Kamboja. Pada akhirnya kelompok Kamboja ini memutuskan hubungan dengan Partai Komunis Indocina dan mulai menganut garis ultra nasionalis. Barangkali ini merupakan benih perselisihan antara kaum komunis Kamboja dan kaum komunis Vietnam dewasa ini.

PERSAINGAN UNI SOVIET — RRC

Faktor lainnya yang bisa jadi menambah tajamnya konflik antara Kamboja—Vietnam dewasa ini ialah perebutan pengaruh antara Uni Soviet dan RRC di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indocina. Kawasan Indocina yang telah seluruhnya dikuasai oleh kaum komunis mempunyai daya tarik tersendiri dalam persaingan mencari pengaruh dari dua negara komunis terbesar itu. Kesamaan ideologi telah menempatkan negara-negara Indocina untuk diperhatikan lebih banyak daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Akibatnya ialah intensitas persaingan dua negara komunis itu semakin meningkat di kawasan Indocina. Hal ini ternyata dikesankan oleh adanya pola

1 Mengenai adanya Partai Komunis Indocina ini antara lain dapat diikuti tulisan Hoang Van Chie, *From Colonialism to Communism, A Case History of North Vietnam*, (London, Pall Mall Press Ltd., 1964), hal 4 dan Bab 5

hubungan kedua negara komunis itu dengan negara di kawasan Indocina. Uni Soviet memelihara hubungan yang baik dengan Vietnam sementara hubungannya dengan Kamboja boleh dikata jelek. Sebaliknya RRC pada saat ini merupakan satu-satunya negara dengan siapa Kamboja memelihara hubungan paling akrab, sedangkan hubungan RRC dengan Vietnam kelihatannya tidak sebaik hubungannya dengan Kamboja.

Setelah kegagalan kudeta komunis di Indonesia pada tahun 1965, maka sasaran perluasan pengaruh Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara ialah Vietnam Utara yang sedang berperang melawan kehadiran Amerika Serikat di sana. Meskipun Asia Tenggara dipandang kurang vital kedudukannya bagi Uni Soviet bila dibandingkan dengan kedudukan Timur Tengah dan Asia Selatan, Uni Soviet tetap mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daerah Indocina.¹ Kedudukan Asia Tenggara khususnya Indocina masih cukup penting dalam politik Uni Soviet sekalipun tidak sevitral Eropa Barat, Timur Tengah atau Asia Selatan. Di samping maksudnya untuk hadir di kawasan Asia Tenggara agar diakui sebagai negara Asia dan sebagai negara besar, kehadirannya dalam politik di Asia Tenggara khususnya dalam kawasan Indocina dimaksudkan untuk menghadapi perluasan pengaruh Cina di kawasan tersebut dalam mencari kepemimpinan politik dan ideologis.² Di samping itu tentu ada maksud untuk menghadapi juga pengaruh negara besar lainnya dalam kawasan ini, yaitu Amerika Serikat dan kekuatan ekonomi Jepang.

Di kawasan Indocina khususnya, Uni Soviet mencoba menanamkan pengaruhnya melalui Vietnam Utara dengan semakin memberikan bantuan ekonomi dan militer pada saat Vietnam masih berperang menghadapi Amerika. Tetapi setelah Doktrin Nixon dikumandangkan, maksud di kawasan Asia Tenggara terutama ditujukan untuk menghadapi Cina, dan Uni Soviet tidak akan

1 Tentang sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Uni Soviet di Asia Tenggara antara lain dapat diikuti dalam Robert C. Horn, "The Soviet Perspective", dalam Sudershan Chawla, Merlvín Gurtov, dan Alain-Gerard Mareot, *Southeast Asia Under the new Balance of Power*, (New York, Praeger Publishers, 1975), hal. 30—50; dan Guy J. Pauker, *The Soviet Union and Southeast Asia*, (Santa Monica, The Rand Corporation, Juli 1973)

2 Robert C. Horn, *ibid.*, hal. 31-32

senang kalau kepergian Amerika Serikat mengakibatkan diisinya kekosongan Asia Tenggara dari pengaruh oleh negara besar lainnya.¹ Uni Soviet tidak berhasil mendekati Kamboja karena dalam pemerintahan Pangeran Sihanouk Kamboja telah mendekati RRC karena takut pada Vietnam, yang seperti disebutkan sebelumnya, dicurigainya sebagai haus akan ekspansi teritorial gaya abad ke—19 itu. Dan setelah kudeta yang dilakukan oleh Lon Nol, Uni Soviet tidak bersedia memberikan tempat bagi Sihanouk dan juga tidak mengakui pemerintahan pengasingan yang kemudian dibentuk oleh Sihanouk yang bermarkas di Peking.

Bukan tidak beralasan bilamana Uni Soviet sesudah tahun 1965 memilih Vietnam sebagai sasaran pengaruhnya setelah gagal berpetualang di Indonesia sebelumnya. Vietnam merupakan suatu negara yang paling besar potensinya untuk menjadi sebuah negara yang kuat di Asia Tenggara. Dilihat dari luas wilayah, militansi penduduknya, jumlah penduduk, dan kekuatan militernya sekarang, Vietnam pasti bisa berkembang menjadi suatu kekuatan regional yang berperanan penting baik dalam percaturan politik maupun dalam memelihara keamanan kawasan Asia Tenggara pada umumnya.² Dengan terbentuknya suatu koalisi antara Uni Soviet dan Vietnam, dapat diharapkan bahwa Uni Soviet akan mampu mengurung RRC dalam mencari kepemimpinan politik dan ideologis di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daratan Indocina. Minimal Hanoi mempunyai peluang untuk muncul sebagai kekuatan hegemoni di kawasan Indocina yang penting artinya bagi Uni Soviet dalam "mengepung" RRC baik secara politik maupun militer.

Sedangkan RRC yang menduduki posisi strategis dapat diramalkan akan memainkan peranan yang terus menerus di Asia Tenggara, baik karena letak geografis Asia Tenggara yang dekat sekali dengan RRC, atau karena pertimbangan historis Asia Tenggara yang dipandang sebagai daerah pengaruhnya pada masa lalu, maupun karena di Asia Tenggara sendiri RRC mempunyai hubungan berkat

1 Setelah kunjungan Presiden Nixon ke RRC pada tahun 1972 yang lalu ada kesan seolah-olah Amerika Serikat mengakui bahwa Asia Tenggara adalah daerah pengaruh dari RRC. Adapun negara besar atau kekuatan lain yang mempunyai peluang untuk mengisi kekosongan Asia Tenggara tersebut antara lain RRC, Jepang dan tentu saja Uni Soviet sendiri

2 Mengenai kekuatan fisik militer Vietnam dewasa ini lihat dalam terbitan berkala The International Institute for Strategic Studies, *Military Balance 1977—1978*, (London, 1977), hal. 65

adanya apa yang disebut Cina perantauan dan adanya gerakan-gerakan komunis, legal maupun terlarang, yang hidup di banyak negara Asia Tenggara.¹ Ketegangan Sino-Soviet, sejak tampilnya pemerintahan Khrushchov di Uni Soviet yang mengakibatkan buyarnya monolitisme gerakan komunisme internasional, makin meningkatkan arti penting kedudukan Asia Tenggara bagi RRC dalam menghadapi pengepungan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Dengan demikian Asia Tenggara menduduki posisi yang lebih vital bagi kepentingan nasional RRC daripada bagi kepentingan Uni Soviet.

Indocina merupakan kawasan yang langsung berbatasan dengan RRC. Pada waktu Perang Vietnam masih berkecamuk, baik Uni Soviet maupun RRC memberikan bantuan ekonomi maupun militer. Tetapi tampaknya RRC tidak berhasil membina hubungan khusus dengan Vietnam baik ketika perang masih berlangsung maupun setelah selesainya Perang Vietnam pada tahun 1975. Namun RRC berhasil baik dalam diplomasinya di Indocina dengan Kamboja yang merasa takut akan ekspansionisme Vietnam. Berbeda dengan Uni Soviet yang tidak memberikan harapan kepada Pangeran Sihanouk ketika digulingkan oleh Lon Nol, RRC dengan tegas hanya mengaku pemerintahan yang dibentuk oleh Pangeran Sihanouk dalam pengasingan dan secara langsung memberikan dukungan kepada perjuangan Khmer Merah untuk merebut kembali kekuasaan dari pemerintahan Lon Nol. Ketika pasukan Khmer Merah berhasil mengambil alih kekuasaan, ucapan terima kasih diberikan kepada RRC oleh para penguasa baru di Kamboja, sedangkan Uni Soviet yang mengakui pemerintahan rezim Lon Nol tidak diakui memberi sumbangan bagi perjuangan rakyat Kamboja dan dituduh menjalankan politik oportunis yang tidak konsekwen dengan perjuangan revolusioner.

Dalam konflik perbatasan yang sekarang terjadi antara Kamboja dan Vietnam tampaknya dua negara besar komunis itu, secara tidak langsung, mencoba berada di belakang masing-masing pihak: RRC memberi prioritas politiknya bagi Kamboja sedangkan Uni Soviet bagi Vietnam. Karena memang belum terdapat bukti bahwa telah terjadi aliansi antara RRC dan Kamboja atau Uni Soviet dan Vietnam, kesimpulan itu baru ditarik berdasarkan pada sikap mereka (baik Uni Soviet maupun RRC) dalam memberitakan konflik Kamboja—Vietnam

¹ Alain-Gerard Marsot : "The Chinese Perspective", dalam Sudershan Chawla, et. al., *loc. cit.*, hal. 51—77

dalam media massa masing-masing. RRC lebih menonjolkan pemberitaan mengenai kedudukan Kamboja sedangkan Uni Soviet lebih banyak memuat berita tentang Vietnam.¹ Tetapi jika dinilai secara keseluruhan dari sikap "memihak"-nya RRC dan Uni Soviet pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di kawasan Indocina itu, tampaknya Uni Soviet lebih kelihatan sikapnya yang jauh menguntungkan Vietnam dan memojokkan Kamboja, sedangkan RRC kelihatannya lebih menahan diri dan mengharapkan agar pertikaian dari dua negara bertetangga itu dapat diselesaikan melalui perundingan-perundingan.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa adanya keinginan pihak luar untuk mengambil keuntungan dari konflik dua negara bertetangga ini, bukan berarti bahwa konflik itu sebagian terbesar disebabkan atau dimulai dari titik kepentingan negara besar yang mencoba mencari pengaruh di sana. Khususnya mengenai Vietnam orang harus berhati-hati apakah benar Vietnam telah merelakan diri wilayahnya dan kepentingan politiknya diikatkan dan dipergunakan sebagai ajang perebutan pengaruh negara-negara besar, sekalipun negara besar tersebut adalah negara-negara komunis. Bahwa negara-negara komunis di luar kawasan Indocina itu memiliki kepentingan itu benar adanya, tetapi belum berarti bahwa kepentingan yang diadu itu juga telah disetujui oleh pihak-pihak setempat (yaitu Vietnam dan Kamboja). Jadi dapat dikatakan bahwa maksud dua negara besar yang bersaing di kawasan Indocina itu ialah mencari keuntungan yang bisa diperoleh melalui konflik dua negara bertetangga itu untuk lebih menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

MENCARI HEGEMONI REGIONAL INDOCINA

Vietnam sekarang merupakan perkembangan dari apa yang dikenal sebagai kerajaan Annam pada masa lalu. Semula Annam hanya merupakan suatu kerajaan kecil di lembah Sungai Merah yang kemudian berhasil meluaskan daerahnya ke arah selatan. Proses ini terjadi selama ratusan tahun yang lalu melalui penaklukan dan pencaplokan wilayah sebagaimana terjadi dalam sejarah hampir setiap

¹ Lihat berita-berita dalam harian *Sinar Harapan* tanggal 2 Januari 1978 dibawah judul "Divisi-divisi Vietnam Serbu Wilayah Kamboja, Phnom Penh Tuduh Soviet Ikut Terlibat Dalam Serangan Militer", tanggal 3 Januari 1978 dalam rubrik Luar Negeri di bawah judul "Perancis Sesalkan Pertempuran Vietnam — Kamboja, Dubes Kamboja Tinggalkan Hanoi", dan tanggal 9 Januari 1978 dalam rubrik Luar Negeri dengan judul "Uni — Soviet dan RRC Hentikan Kiriman Logistik Pada Kedua Pihak".

bangsa. Tapi meskipun penaklukan dan pencaplokan wilayah dewasa ini tidak dipandang sebagai cara bangsa yang terpuji, ada ketakutan di kalangan bangsa Kamboja akan agresivitas bangsa Vietnam yang merupakan ancaman bagi eksistensi Kamboja sebagai suatu negara di masa yang akan datang. Ketakutan Kamboja seperti itu memang bukan tidak beralasan.

Selain apa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam hal persoalan wilayah dari sejarah masa lalunya, Vietnam tampak memiliki ambisi untuk mengambil kepemimpinan di kawasan Indocina. Pada masa perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan Perancis dalam sejarah modern Vietnam, Ho Chi Minh tampil sebagai pemimpin dari salah satu kelompok partai perjuangan itu. Pada dasawarsa 1920—an paham komunisme telah masuk ke Vietnam antara lain karena kemelut politik yang terjadi di daratan Cina pada masa itu. Ho Chi Minh pada masa itu telah merupakan salah seorang dari agen-agen Comintern di Timur Jauh,¹ yang tugas utamanya ialah memperkenalkan komunisme di kalangan bangsa Vietnam.

Organisasi komunis di Vietnam mulai dibentuk oleh Ho Chi Minh pada tahun 1925 di Canton dengan nama *VietNam Thanh-Nien Cach-Menh Dong-Chi Hoi* atau Perhimpunan Kader Revolusioner Muda Vietnam. Pembentukan organisasi ini oleh Ho Chi Minh ditujukan guna mengembangkan komunisme di kalangan muda Vietnam. Setelah terjadinya perpecahan di kalangan kaum komunis Vietnam pada tahun 1927, Ho Chi Minh memanggil tokoh-tokoh komunis Vietnam dan ia berhasil memecahkan perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka membentuk "Partai Komunis Vietnam". Tetapi nama ini kemudian dalam tahun 1931 diubah menjadi "Partai Komunis Indocina" dan dengan demikian jangkauan gerakan ini meliputi Laos dan Kamboja dan mengambil tempat sebagai pusat kegiatannya di dalam wilayah Vietnam.² Perubahan nama dari Vietnam menjadi Indocina ini menunjukkan, bahwa di kalangan pemimpin komunis Vietnam pada masa yang lalu terdapat suatu keinginan akan kepemimpinan Vietnam di antara bangsa-bangsa Indocina. Namun demikian, dalam rangka mencari dukungan perjuangan di kalangan bangsa Vietnam sendiri dalam menghadapi kembalinya Perancis di Indocina, dalam kongresnya yang kedua pada tahun 1951 nama Partai Komunis Indocina diganti lagi dengan nama Partai Pekerja Vietnam. Setelah kaum

1 Lihat dalam Hoang Van Chi, *op. cit.*, hal. 42—43

2 *ibid.*, hal. 48—49

komunis berhasil menguasai seluruh Vietnam, nama itu dikembalikan lagi menjadi "Partai Komunis Vietnam" pada bulan Desember 1976 yang lalu.

Pembagian Indocina dalam tiga negara setelah Perancis pergi dalam Perjanjian Jenewa tahun 1954 tampaknya belum dapat mengakhiri ketakutan Kamboja khususnya terhadap Vietnam. Ketakutan Kamboja pada waktu itu terutama tertuju kepada Vietnam Selatan, tetapi juga kepada Vietnam Utara, karena persepsinya akan mengalami nasib seperti kerajaan Champa yang dicaplok oleh Vietnam (Annam).¹ Menghadapi keadaan semacam itu, Pangeran Sihanouk pada tahun 1964 memberikan alasan kenapa Kamboja lebih senang mendekati RRC daripada berhubungan baik-baik dengan dua negara Vietnam pada masa itu. Antara lain Sihanouk menyatakan :

"....., kita tidak ingin menjadi Merah. Tetapi pada suatu saat kita harus menerima hal itu karena kita tidak akan mampu menghindarinya; yaitu, membekali kita agar mampu mengamankan integritas wilayah kita. Kita tidak ingin menjadi seperti Champa. Kita hanya ingin selalu memelihara bangsa Khmer dan bendera Khmer." ²

Dalam persepsi para pemimpin Kamboja pada sekitar akhir dasawarsa 1950—dan dasawarsa 1960—an sudah disadari, bahwa pada suatu saat bangsa Kamboja akan terpaksa menerima komunisme demi tegaknya bangsa Khmer dan tetap berkibarnya bendera nasional bangsa Khmer. Untuk itu pula Sihanouk tidak segan-segan meminta perlindungan dari RRC, karena jika kaum Viet Minh menimbulkan kesukaran bagi Kamboja, maka hanya Peking-lah yang akan menghen-tikannya.³ Setidak-tidaknya ketakutan Sihanouk ini mencerminkan bahwa Vietnam, apakah itu Utara atau Selatan, pada suatu saat akan mencoba mendominasi, kalau tidak mendikte, negara-negara di kawasan Indocina, dalam hal ini khususnya Kamboja.

Apakah yang dapat dilihat setelah semua negara Indocina dikuasai seluruhnya oleh kaum komunis? Pada semester pertama tahun 1976 Vietnam telah dipersatukan dengan pusatnya di Hanoi. Pada bulan Juli 1976 pemerintah Vietnam melepaskan "merpati" untuk

1 Lihat dalam Bernard K. Gordon, *op. cit.*, khususnya hal. 55—56

2 Bagian dari pidato Pangeran Sihanouk pada tanggal 21 Pebruari 1964 yang dikutip oleh Bernard K. Gordon, *ibid.*, hal. 54

3 *Ibid.*, hal. 56. Janji Peking ini diperoleh oleh Sihanouk ketika ia berkunjung ke Peking pada tahun 1956

berkomunikasi dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, antara lain ke negara-negara ASEAN. Pada bulan itu dalam mengakhiri muhibahnya si "merpati" Phan Hien, Wakil Menteri Luar Negeri, sampai di Laos. Dalam pernyataan bersamanya antara lain dikemukakan keinginan Vietnam dan Laos untuk meningkatkan kerjasama dengan Kamboja di segala bidang serta membentuk suatu *front persatuan* Vietnam—Laos—Kamboja guna menghadapi segala urusan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.¹ Ajakan yang disponsori oleh Vietnam ini dapat ditafsirkan, karena dalam kunjungan itu tidak hadir perutusan Kamboja, sebagai pertanda kemauan kuat Vietnam untuk memimpin tiga negara di kawasan Indocina dalam berurusan dengan negara-negara lain. Tetapi ternyata Kamboja tidak memberikan tanggapan positif terhadap ajakan dari Vietnam yang telah "mendatangi" Laos itu.

Meskipun Hanoi turut membantu menyusun kekuatan Khmer Merah setelah kudeta Marsekal Lon Nol di Kamboja, ternyata sikap Khmer Merah terhadap Vietnam sekarang tidak menunjukkan adanya suatu hubungan khusus di antara mereka. Ini barangkali adalah kelanjutan sikap ultra nasionalisnya pemimpin-pemimpin Khmer Merah setelah mereka mengingkari hubungannya dengan gerakan komunis Indocina seperti telah disebutkan sebelumnya. Dalam konflik yang terjadi sekarang, para pemimpin Khmer Merah jelas menuduh ambisi Vietnam untuk menguasai seluruh Indocina, melalui hegemoni politik membentuk suatu rezim Pro-Hanoi di Kamboja, maupun pembentukan federasi Indocina, sebagai sebab terjadinya pertempuran di sekitar perbatasan kedua negara.² Apalagi dukungan materiil Vietnam dengan luas wilayah, kekuatan militer, jumlah penduduk, dan militansi yang telah ditempa selama puluhan tahun tidak dapat dibandingkan begitu saja dengan Kamboja yang hanya memiliki penduduk dan kekuatan militer yang terbatas.

MASALAH SOSIAL EKONOMI DI DALAM NEGERI

Di lain pihak, Vietnam dan Kamboja yang baru saya mengalami masa perang masing-masing menghadapi persoalan sosial ekonomi di dalam negerinya. Perang Vietnam menghadapi Amerika maupun pergolakan di dalam negeri Kamboja sendiri telah mengakibatkan

1 *Antara*, 30 Juli 1976/A

2 *Sinar Harapan*, 2 Januari 1978

terlantarnya pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat mereka. Proses transformasi sosial yang dijalankan oleh masing-masing negara ini di negerinya menambah kompleksnya masalah dalam negeri mereka. Suatu pemerintahan yang sedang menghadapi masalah dalam negeri yang gawat terkadang mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dari kerisauan-kerisauannya kepada masalah-masalah yang dicarinya di luar, antara lain dengan membuat soal dengan negara tetangganya. Keadaan ini bisa jadi juga berlaku bagi hubungan konflik yang sedang berjalan antara Vietnam dan Kamboja.

Dalam konflik sekarang ini telah dilibatkan pula adanya saling tuduh kedua belah pihak tentang bahan pangan yang langka di pihak lainnya, dan oleh karena itu perampokan dan pendudukan daerah yang dianggap subur merupakan jalan ke luar yang bisa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut.¹ menjadi pertanyaan siapakah di antara keduanya yang mengalami kesulitan bahan pangan, dan lebih luas lagi kesulitan ekonomi, dan apakah persoalan pangan dan ekonomi yang berpadu dengan masalah-masalah sosial lainnya cukup berpengaruh sebagai penggerak meningkatnya konflik antara Vietnam—Kamboja?

Tertutupnya Kamboja dari dunia luar merupakan suatu kesulitan bagi pengamat politik untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam negeri ini setelah kaum komunis mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975. Pada umumnya cerita mengenai kejadian-kejadian di dalam negeri Kamboja sebagian terbesar bersumber dari para pengungsi yang berhasil meloloskan diri ke Muangthai.² Peralihan sistem kemasyarakatan dari yang lama menuju ke komunisme yang sedang dilaksanakan oleh penguasa Kamboja tidak berjalan secara suakrela dan lancar. Kelompok-kelompok perlawanan yang membangkang terhadap penguasa baru di Kamboja masih terdapat di daerah-daerah perbatasan Kamboja — Vietnam dan Kamboja — Muangthai. Sementara itu di kalangan Khmer Merah sendiri ter-

¹ *Ibid.*

² Sebagai contoh mengenai hal ini misalnya *Antara* 25 Januari 1977/B memuat suatu perkiraan yang dibuat oleh John Barron dan Anthony Paul dari majalah *Reader's Digest* tentang meninggalnya sekitar 1,2 juta orang Kamboja karena kelaparan, penyakit atau dibunuh. Sementara itu *Indonesian Observer*, 13 Juli 1977 dan *Antara*, 12 September 1977/A memberikan tentang terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan Khmer Merah. Berita-berita seperti itu sebagian besar bersumber pada informasi yang dapat diperoleh dari para pengungsi Kamboja yang berhasil mencapai Muangthai.

dapat persaingan dan perpecahan yang tajam yang bahkan sering melibatkan bentrokan di kalangan mereka sendiri. Perpecahan di kalangan Khmer Merah ini kiranya erat sekali hubungannya dengan teka-teki di Kamboja tentang siapa sebenarnya yang memimpin negeri itu.

Tambahan lagi dalam bidang ekonomi, keadaannya tidak lebih baik daripada masa-masa sebelumnya, bahkan makin menunjukkan kemerosotan. Hubungan Kamboja yang tidak bertambah baik dengan Muangthai makin menambah sulitnya kehidupan ekonomi Kamboja setelah diperintah rezim Khieu Samphan-Pol Pot-Ieng Sary. Kesulitan utama bagi penduduk Kamboja dewasa ini dalam bidang ekonomi ialah langkanya bahan makanan dan bahan bakar. Situasi ini banyak digambarkan oleh para pengungsi asal Kamboja yang berdatangan ke Muangthai. Untuk mengatasi keadaan bahan pangan itu, antara lain pemerintah Kamboja menempuh kebijaksanaan "mendesakkan" penduduk Phnom Penh untuk menggarap tanah pertanian yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dan menceraiberaikan keluarga mereka. Sementara itu penjatahan makanan (ransum) dilakukan secara ketat, dan kerja paksa dengan pengawasan prajurit-prajurit muda dapat dikatakan sebagai suatu hal yang lumrah di Kamboja dewasa ini. Kalau keadaan seperti yang disebutkan itu memang benar, bukanlah suatu hal yang mustahil bilamana pemerintah Kamboja sedang menghadapi kerawanan-kerawanan sosial ekonomi di dalam negerinya yang sangat gawat.

Sehubungan dengan itu, bekas Perdana Menteri Muangthai yang digulingkan, Thanan Kraivixien, pada bulan Agustus 1977 yang lalu memperkirakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kamboja di daerah perbatasannya dengan negara tetangganya, khususnya Muangthai dan kemungkinan juga Vietnam, dengan melakukan serangan, pelanggaran wilayah, dan pembunuhan di kalangan penduduk sipil di pedesaan, adalah bagian dari usaha pemerintah Kamboja untuk mengalihkan perhatian rakyatnya dari kemelut yang sedang melanda negerinya.¹ Kiranya kemungkinan itu tidak dapat diabaikan begitu saja sebagai salah satu taktik penguasa Kamboja untuk memecahkan keresahan-keresahan di dalam negerinya, tapi seberapa jauh hal itu memberi dasar atau menjadi suatu alasan yang kuat bagi

¹ *Anilara*, 4 Agustus 1977/A

meningkatnya konflik Vietnam—Kamboja kiranya tetap menjadi persoalan.

Vietnam juga mengalami kesulitan ekonomi di dalam negerinya setelah kemenangan revolusi Vietnam menghadapi imperialisme Amerika Serikat seperti diakui sendiri oleh Perdana Menteri Pham Van Dong baru-baru ini.¹ Kesulitan tersebut meliputi kesulitan dalam kehidupan ekonomi dan "kehidupan nasional"-nya. Tetapi yang lebih serius ialah masalah ekonomi Vietnam — yaitu menurunnya jumlah beras sampai jutaan ton — yang merupakan harga yang harus dibayar bagi kemerdekaannya. Merosotnya persediaan bahan pangan ini terutama disebabkan oleh, selain bencana alam, hapusnya bantuan pangan Amerika ke Vietnam Selatan pada masa perang dahulu dan semakin kecilnya suplai bahan pangan dari RRC. Pada masa perang Vietnam dahulu RRC memberikan bantuan cuma-cuma kepada Vietnam, tetapi sekarang Vietnam harus membayar kepada RRC meskipun jumlahnya sekarang jauh lebih sedikit. Untuk mengatasi masalah itu Vietnam juga mulai membentuk apa yang dikenal sebagai "pemukiman ekonomi baru" guna mengatasi masalah-masalah ekonomi dan mengawasi kehidupan nasional secara lebih efektif. Karenanya adalah persoalan besar jika Vietnam mencarikan kesibukan rakyatnya di daerah perbatasan dengan Kamboja sementara rezim yang berkuasa telah memiliki kedudukan yang kuat sekali.

Dengan demikian, jika alasan mengalihkan perhatian dari persoalan di dalam negeri kepada persoalan di luar negeri merupakan salah satu sebab meningkatnya konflik Kamboja—Vietnam, alasan ini tampaknya hanya relevan secara sebagian bagi kebijaksanaan Kamboja saja. Kamboja menghadapi komplikasi yang luas dalam bidang ekonomi dan politiknya, yang sangat berpengaruh bagi stabilitas pemerintahan dan lebih lagi bagi kepemimpinan yang sekarang ada di Kamboja. Sedangkan Vietnam boleh dikata telah mempunyai suatu aparat rezim yang telah mapan, meskipun negara ini juga masih menghadapi kesulitan ekonomi dan barangkali juga kelompok-kelompok pembangkang di dalam negerinya. Bagi Kamboja alasan itu hanya berlaku secara sebagian oleh karena di kalangan bangsa Kamboja sendiri memang telah tertanam sikap mencurigai Vietnam yang dipandang agresif.

1 Nayan Chanda, "Dong's Quiet Anniversary", *Far Eastern Economic Review*, 23 September 1977, hal. 30—31

PERSPEKTIF DAN IMPLIKASI KONFLIK

Dari uraian singkat yang dikemukakan di atas tampaknya ada dua faktor utama yang mempertajam perselisihan antara Kamboja—Vietnam, yang pertama adalah latar belakang historis permusuhan dan belum definitifnya perbatasan kedua negara, dan yang kedua adalah dicurigainya Vietnam oleh negara-negara tetangganya (khususnya oleh Kamboja) bahwa Vietnam akan melakukan politik hegemoni di kawasan Indocina. Dua faktor lainnya, yaitu persaingan antara dua negara besar untuk mencari pengaruh di kawasan Indocina dan kondisi di dalam negeri Kamboja dan Vietnam secara terbatas, juga turut mempertajam konflik yang telah dilandasi oleh dua faktor utama yang disebutkan lebih dahulu. Sedangkan kesulitan untuk mendefinir perbatasan yang belum pasti pada taraf sekarang dibuat lebih sulit lagi oleh maksud Vietnam untuk mendominasi Indocina.

Pada bagian sebelumnya telah dikatakan bahwa pertempuran di daerah perbatasan Kamboja—Vietnam oleh Kamboja dipandang sebagai bagian dari usaha Vietnam untuk mendominasi Indocina, khususnya untuk membentuk suatu rezim pemerintahan di Kamboja yang pro Vietnam. Dalam hubungan ini, sebenarnya ada dua pilihan bilamana Vietnam memang mau membentuk suatu pemerintahan yang pro Hanoi di Kamboja. Yang pertama ialah melalui penerobosan masuk secara militer ke seluruh Kamboja dan kemudian memasang orang-orangnya di Phnom Penh sebelum seluruh kesatuan Vietnam ditarik mundur lagi. Jalan ini kelihatannya dapat dilaksanakan dan memberi hasil yang lebih cepat bagi maksud Vietnam. Tetapi kalau Vietnam menempuh jalan ini, ia akan menghadapi dakwaan melakukan invasi terhadap negara tetangganya dan kepercayaan internasional kepada Vietnam akan jauh merosot. Tambahan lagi harga yang harus dibayar oleh Vietnam cukup tinggi, baik karena menghadapi resistensi dari Kamboja sendiri maupun kemungkinan campur tangan RRC di Kamboja. Berdasarkan pada perhitungan ini tampaknya Vietnam tidak akan memilih jalan invasi militer besar-besaran ke Kamboja untuk membangun suatu rezim pemerintahan Kamboja yang pro Hanoi.

Alternatif lainnya yang dapat dijalankan Vietnam ialah melakukan strategi seperti ketika Vietnam Utara mau "merebut" Vietnam Selatan dahulu. Dalam hal ini Vietnam harus membentuk suatu kelompok penentang terhadap pemerintahan yang sekarang menguasai

Kamboja di dalam negeri Kamboja sendiri. Setelah di Kamboja terbentuk suatu barisan perlawanan, Vietnam kemudian dapat bertindak sebagai pensuplai logistik dan pelindung bagi barisan perlawanan ini. Jika jalan demikian ini yang mau ditempuh oleh Vietnam sekarang, barangkali dia membutuhkan waktu yang lebih lama kalau dibandingkan dengan melakukan invasi langsung ke Kamboja dalam usahanya membentuk suatu pemerintahan yang pro Hanoi. Tampaknya apa yang dilakukan oleh Vietnam sekarang ini lebih mendekati strategi ini guna memperteguh kepemimpinannya di kawasan Indocina.

Tetapi mengapa Vietnam dalam pertempuran ini masuk ke dalam wilayah Kamboja? Dapat diperkirakan bahwa ketegangan perbatasan yang memang sudah ada antara Kamboja dan Vietnam dimanfaatkan Vietnam untuk menjalankan strateginya tersebut. Ketegangan itu telah memberikan dalih kepada strategi-strategi militer Vietnam untuk mengirimkan sejumlah besar divisinya ke daerah perbatasannya dengan Kamboja. Fungsi dari divisi-divisi Vietnam yang ditempatkan di daerah perbatasan ini ialah untuk membantu penciptaan suatu kekuatan perlawanan terhadap Kamboja yang unsur-unsurnya dapat diambil dari orang-orang Vietnam keturunan Kamboja yang banyak tinggal di sekitar perbatasan mereka. Dengan tersedianya bantuan logistik yang mencukupi dan lebih lagi dengan ikut sertanya personil-personil pasukan Vietnam melakukan penerobosan ke Kamboja, mungkin dengan suatu taktik subversi yang kontinyu, dalam jangka yang agak lama Kamboja akan jatuh juga ke dalam daerah pengaruh Vietnam.

Hal ini berbeda dengan masa yang lalu, terutama ketika Kamboja masih dikuasai oleh Pangeran Sihanouk. Pada masa yang lalu, meskipun Vietnam telah ditakuti oleh Kamboja, berkat perselisihan di Vietnam sendiri, yaitu konflik Vietnam Utara lawan Vietnam Selatan, Kamboja masih dapat lebih yakin akan kebebasannya. Tetapi pada saat seperti sekarang, dengan bersatunya Vietnam, Vietnam Utara menjadi inti penggerak dalam mempengaruhi dan memaksa Kamboja untuk berada di bawah pengaruh hegemoni Vietnam. Dengan perkataan lain, independensi politik Kamboja sekarang banyak tergantung kepada pola politik Vietnam. Jika Vietnam bertekad kuat untuk memainkan peranan dominan di kawasan Indocina dan menempuh suatu politik yang sama sekali independen dari Moskwa, secara berangsur-angsur tetapi pasti, Hanoi akan mencapai sasarannya tersebut. Bila Vietnam menempuh politik yang demikian itu, kiranya

RRC akan dapat mentolerir peranan Vietnam di Semenanjung Indocina karena musuh Cina Komunis yang sekarang, Uni Soviet, dengan demikian telah dibatasi dalam politik pengepungannya terhadap RRC.

Ditinjau dari segi harga yang harus dibayar oleh Vietnam dalam mencapai sasaran politiknya di Asia Tenggara, strategi ini tampaknya yang paling menguntungkan bagi Vietnam. Tentu saja bila Vietnam berniat benar dalam mencari hegemoni politik di kawasan Indocina seperti yang diutarakan itu, pelaksanaan politik yang demikian akan membawa pengaruh bagi percaturan politik di kawasan Asia Tenggara, karena jika politik itu terlaksana, Vietnam mau tidak mau akan menjadi koordinator dalam kalangan negara-negara Indocina untuk berkomunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti yang mau dicanangkannya pada tahun 1976 yang lalu. Pada gilirannya ini bisa menyebabkan konfigurasi kekuatan berada dalam dua kutub, ASEAN dan Indocina, dalam komunikasi intra-regional Asia Tenggara.

Tetapi ada suatu persoalan krusial yang barangkali merupakan rintangan bagi Vietnam. Jika benar bahwa Vietnam akan menempuh suatu politik independen, karena selama ini hubungan Vietnam dengan Uni Soviet dinilai lebih baik daripada hubungan Vietnam—RRC, masalahnya ialah bagaimana Vietnam dapat meyakinkan RRC bahwa ia bukan "perpanjangan tangan" Uni Soviet di Asia Tenggara. Republik Rakyat Cina akan tetap menaruh kewaspadaan bagi adanya suatu kawasan Indocina yang didominasi oleh Vietnam. Jaminan apa yang dapat diperolehnya dari Vietnam bahwa ia setelah mendominasi Indocina, tidak akan melakukan suatu politik mendekati Moskwa? Oleh karena itu, jika Vietnam berhasil meyakinkan RRC akan politiknya yang ditempuh, baru kemudian RRC bisa mentolerir adanya suatu kawasan Indocina di bawah pengaruh Hanoi. Tanpa adanya keyakinan semacam itu tampaknya RRC tidak mau membiarkan begitu saja Kamboja ditarik ke dalam orbit pengaruh Hanoi, kecuali jika terdapat suatu perubahan yang drastis ke arah membalikannya hubungan Peking—Moskwa di masa yang akan datang ini.

Tetapi sebaliknya, jika konflik Kamboja—Vietnam sekarang menjadi semakin tajam, misalnya dalam bentuk perang dalam skala yang lebih besar lagi, ada beberapa implikasi yang bisa diperkirakan akan terjadi di Asia Tenggara. Pertama, konflik itu akan mengundang

semakin intensifnya persaingan antara Uni Soviet dan RRC di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indocina. Pengalaman menunjukkan bahwa di mana terdapat konflik intra-regional, negara-negara besar yang berkepentingan merasa terpenggil untuk ikut campur di dalam konflik tersebut.¹ Pada gilirannya kehadiran negara-negara besar yang berkepentingan ini akan semakin mempertajam konflik dan sebagai akibatnya stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara akan terganggu. Ini berarti bahwa cita-cita terselenggaranya suatu kawasan Asia Tenggara yang damai akan semakin jauh dan lama dicapai.

Kedua, sebagai akibat lebih lanjut dari yang pertama, bisa jadi konflik Kamboja—Vietnam yang semakin tajam akan melahirkan aliansi negara-negara dalam kawasan Indocina dengan negara-negara besar di luar kawasan Asia Tenggara. Kamboja yang sekarang lebih intim bersahabat dengan Peking mungkin saja meminta pertolongan dari RRC secara militer untuk menghadapi Vietnam yang secara militer jauh lebih kuat. Di lain pihak, ada kemungkinan Vietnam akan menjadi lebih dekat dengan Uni Soviet, jika ia merasa terancam oleh hadirnya kekuatan militer Cina di Kamboja, sebagai sandaran untuk memperoleh persenjataan dan bantuan ekonomi bagi kepentingan Vietnam. Ketakutan Vietnam pada RRC mungkin tidak terlalu sulit untuk diterangkan karena pada masa yang lalu Cina merupakan salah satu pengancam utama bagi eksistensi Vietnam, Vietnam bahkan pernah menjadi daerah jajahannya. Dengan demikian dapat diperkirakan, jika skala konflik Kamboja—Vietnam terus meningkat, bahwa akan timbul semacam perjanjian pertahanan Kamboja—RRC dan Vietnam—Uni Soviet untuk jangka waktu tertentu.

Akhirnya, konflik dalam suatu kawasan dapat membawa akibat tersendiri bagi pola hubungan intra-regional. Kalau dalam hubungannya dengan negara luar kawasan mungkin konflik itu akan melahirkan suatu aliansi atau semacam perjanjian pertahanan, konflik Kamboja—Vietnam itu akan mempengaruhi hubungan antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya negara-negara ASEAN, dan negara-negara di kawasan Indocina khususnya yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Barangkali akan ada anggapan bahwa, mengingat perbedaan sistem sosial dan politik antara ASEAN dan In-

¹ Ada contoh-contoh konflik intra-regional yang kemudian menjadi besar akibat campur tangan negara-negara besar yang ingin mengambil untung dari konflik tersebut. Konflik India—Pakistan yang kemudian melahirkan negara baru, Bangladesh, dan konflik di dalam negeri Angola di Afrika misalnya, melibatkan kepentingan-kepentingan dari Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC.

docina, konflik itu akan menguntungkan bagi negara-negara ASEAN karena negara-negara Indocina yang dahulu mengkritik ASEAN akan dipaksa terus memusatkan perhatiannya pada masalah mereka sendiri. Sejauh mana kebenaran anggapan ini kiranya masih perlu dipersoalkan dan dibuktikan lebih lanjut. Tetapi bila konflik itu berhasil mengundang masuknya negara-negara besar yang berkepentingan untuk mengadu nasibnya di Vietnam; tampaknya cita-cita negara-negara ASEAN untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai suatu kawasan yang damai, bebas, dan netral akan menjadi semakin jauh.

PENUTUP

Untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi antara Kamboja dan Vietnam sekarang, tampaknya jalan yang paling baik adalah melalui meja perundingan. Untuk itu Vietnam telah memulai inisiatif menawarkan diselenggarakannya suatu perundingan dengan Kamboja untuk menyelesaikan masalah bersama mereka. Tetapi Kamboja tampaknya belum mau menempuh jalan perundingan sebagaimana yang ditawarkan oleh Vietnam. Kalau Kamboja bersikeras menganut jalan yang sekarang dipilihnya, yaitu menyelesaikan persoalan mereka, apakah masalah perbatasan atau karena ketakutan akan ekspansi politik Vietnam, dengan membiarkan saja berlangsungnya suasana konflik atau bahkan meningkatkan skala pertempuran dengan Vietnam, Kamboja menyandang risiko akan didobrak oleh Vietnam secara militer jika Vietnam berhasil meyakinkan RRC akan politik Kamboja yang tidak masuk akal itu. Risiko yang lebih jelek lagi bagi Kamboja ialah bahwa pada akhirnya ia harus tunduk kepada perintah Hanoi jika ia sekarang terus membiarkan semua insiden-insiden di daerah perbatasan dengan Vietnam berlangsung terus. Oleh karena itu demi eksistensi dan kemerdekaannya sebagai unit politik, maka bagi Kamboja adalah lebih baik untuk menyelesaikan konfliknya dengan Vietnam lewat perundingan-perundingan.

Bagi Vietnam, sebagai suatu negara yang dominan dalam politik di Asia Tenggara karena kekuatannya, bila juga sungguh-sungguh menghendaki adanya suatu penyelesaian damai atas konfliknya dengan Kamboja, usahanya untuk mengajak Kamboja berunding adalah cukup simpatik. Namun suatu hal perlu diingat, sebagai suatu negara

yang cukup besar dalam kawasan Asia Tenggara, maka perundingannya dengan Kamboja harus dilaksanakan atas dasar kesederajatan dan realitas yang ada. Ini berarti bahwa Vietnam harus dapat menghargai harkat dan derajat negara tetangganya sebagai suatu negara yang berdaulat. Jika hal seperti ini dapat terwujud, kiranya tidak perlu lagi masalah perbatasan dan ketakutan Kamboja pada Vietnam dibicarakan melalui kekerasan senjata. Penyelesaian konflik secara damai akan banyak memberi andil bagi stabilitas dan keamanan tidak saja di kawasan Indocina, tetapi juga bagi seluruh Asia Tenggara.

KEDUDUKAN SELAT MALAKA SEBAGAI PERAIRAN TERITORI- AL DAN JALUR PELAYARAN IN- TERNASIONAL DITINJAU DARI SEGI POLITIK INTERNASIONAL

Asnani USMAN

Masalah Selat Malaka timbul sejak pemerintah Indonesia dan Malaysia menuntut lebar laut teritorial 12 mil. Tuntutan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4/1960 dan Malaysia berdasarkan "Territorial Water Acts" tahun 1971.¹ Oleh karena itu negara Indonesia dan Malaysia menganggap Selat Malaka sebagai bagian dari perairan teritorialnya dan hanya memberikan kelonggaran bagi pelayaran internasional "hak lintas damai" (right of innocent passage) dan tidak menginginkan "hak lintas bebas" (right of free passage) yang dituntut oleh negara-negara besar. Dari persoalan di atas, terlihat adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) di antara negara-negara pantai dan negara-negara besar yang mempunyai latar belakang kepentingan nasional masing-masing. Di samping itu terlihat pula sikap negara Singapura yang mempunyai perbedaan paham dengan negara-negara pantai lainnya Indonesia dan Malaysia.

ARTI STRATEGI SELAT MALAKA

Selat Malaka terpit antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Panjang selat 650 mil, lebar selat pada titik maksimal 250 mil dan pada titik minimalnya kurang lebih 8,4 mil. Pada bagian utara selat ini terdapat kedalaman maksimal antara 90 m dan 100 m

1 Kirdi Dipoyudo, "Persoalan di sekitar Selat Malak", *Analisa*, CSIS Jakarta, Th. IV No. 3, Maret 1975, hal. 28

dan pada bagian selatan pada umumnya relatif dangkal. Di selat ini banyak terdapat pulau kecil dan di bawah permukaan air banyak terdapat karang serta di beberapa tempat airnya dangkal. Pada tahun 1970 ditemukan 37 tempat yang dangkal, ditambah pula dengan jalur lalu lintasnya yang berbelok-belok, sehingga menyukarkan kapal-kapal yang lewat. Selanjutnya apabila kita lihat peta Asia dapat juga dianggap bahwa posisi Selat Malaka menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik melewati Laut Cina Selatan. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudera menjadikan Selat Malaka suatu pintu gerbang pelayaran yang ramai dan yang terdekat dilalui kapal-kapal dari Eropa, Timur Tengah dan India menuju Penang, Singapura dan Laut Cina.

Evaluasi arti strategis Selat Malaka tidak dapat dilepaskan dari sejarah selat itu sendiri. Selat ini pernah dikuasai oleh kekuasaan regional yang mempunyai pengaruh kekuasaan laut terhadap selat itu seperti Funan, Sriwijaya dan Malaka. Kekuasaan-kekuasaan yang menguasai selat ini menyadari betapa pentingnya selat ini bagi kemajuan perdagangan. Tidaklah mengherankan jika hal inipun menarik perhatian bangsa-bangsa Barat yang melihat betapa pentingnya Selat Malaka ini bagi kepentingan perdagangan (ekonomi), terutama pada waktu perdagangan rempah-rempah. Berganti-ganti bangsa Barat menguasainya untuk maksud tersebut di samping maksud strategis lainnya. Pada tahun 1511 Bangsa Portugis menguasai selat itu sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan Goa dan Macao. Pada tahun 1613 selat itu dikuasai oleh Belanda dan kemudian oleh Inggris. Inggris menguasai Selat Malaka demi kelancaran perdagangannya dengan Cina. Pada tahun 1824, Belanda mengadakan persetujuan dengan Inggris. Berdasarkan persetujuan ini (Convention of London) Selat Malaka ditentukan sebagai perairan internasional. Pada Perang Dunia II Jepang pun pernah menguasai selat ini. Pada dewasa ini Selat Malaka makin mempunyai arti strategis yang searah dengan meningkatnya kepentingan negara-negara besar terhadap selat itu. Semuanya ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara-negara besar itu dengan latar belakang kepentingan nasionalnya masing-masing yang dapat mengancam kepentingan negara-negara pantainya sendiri.

Akibat adanya bermacam-macam kepentingan dari negara-negara yang menggunakan lintas pelayaran Selat Malaka, selat ini mempunyai

arti strategi yang menentukan, yaitu dari (a) segi politik dan militer, dan (b) segi ekonomi.¹

a. Segi politik dan militer

Kesibukan lalu-lintas pelayaran internasional dengan segala macam latar belakang kepentingannya, mempunyai pengaruh terhadap Asia Tenggara, karena selat tersebut berada di kawasan itu. Seperti diketahui Asia Tenggara merupakan daerah pertemuan bagi kepentingan negara-negara besar di dalam pelaksanaan strategi perimbangan kekuatannya. Jadi mau tidak mau daerah dari perairan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, tidak akan lepas dari pengaruh dan kepentingan negara-negara besar tadi. Dengan demikian situasi dan perkembangan politik internasional perlu dihubungkan dengan kedudukan dan letak selat itu.

Setelah Perang Dunia II berakhir, maka muncullah dua kekuatan politik super-power Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua super-power itu masing-masing berusaha untuk mendapatkan wilayah yang berada di bawah pengaruh lawannya. Persaingan karena perbedaan ideologi dan kepentingan di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet makin lama makin tajam, dan merubah suasana menjadi apa yang disebut Perang Dingin. Amerika Serikat mendirikan pakta-pakta pertahanan dengan negara-negara satelitnya untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Suasana perang dingin ditambah pula dengan perkembangan persenjataan nuklir yang dimiliki oleh kedua super-power, lambat-laun menimbulkan kekuatiran terhadap perang nuklir yang dapat memusnahkan seluruh umat manusia. Kekuatiran ini dan adanya kenyataan baru menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam corak politik kedua super-power tersebut. Munculnya RRC sebagai faktor strategis dapat merupakan komponen yang potensiil, yang mempengaruhi perimbangan strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di samping itu harus diperhitungkan Jepang dan kelompok-kelompok baru seperti MEE dan OPEC, yang semuanya berkisar kepada kekuatan ekonomi. Kemudian timbul sejumlah besar negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Semua perkembangan di atas menimbulkan kesadaran di pihak super-

¹ Lihat R.G. Boyd, "The Strategic Significance of the Malacca Strait", *Strategic Digest*, September 1977, hal. 1—24

power bahwa perang dingin tidak dapat dilanjutkan lagi. Sudah masanya untuk mengubah sikap politik mereka selama ini. Perubahan-perubahan ini kemudian ditandai dengan adanya usaha-usaha pendekatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat dengan RRC. Tetapi suasana detente ini tidak berarti penghentian usaha dalam mencapai kepentingan masing-masing maupun penghentian pertentangan dan persaingan dalam bidang ideologi, ekonomi, sosial, politik dan militer. Kepentingan dan persaingan di antara negara-negara tersebut berjalan terus. Terlihat perkembangan-perkembangan baru di dalam wujud berpindahnya medan perebutan pengaruh negara-negara besar ke belahan bumi Asia. Perubahan pola pergeseran dunia ke Asia Tenggara disebabkan pula oleh keadaan negara-negara Asia Tenggara yang pada umumnya adalah negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang, kestabilan dan kekuatan baik ekonomi, politik maupun militer belum dapat menjamin atau mencapai kepentingan nasional masing-masing. Hal-hal ini merupakan tantangan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk waspada supaya kawasannya tidak menjadi arena konflik internasional dan tetap mempunyai sikap yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Sehubungan dengan adanya kecenderungan perubahan pola pergeseran politik ini, menggugah kesadaran bangsa untuk lebih memperhatikan "titik strategi" pada wilayah negara, diantaranya Selat Malaka bagi wilayah Asia Tenggara. Selat Malaka sebagai "titik strategi" dari wilayah Asia Tenggara ini makin terlihat pentingnya apabila dihubungkan dengan "strategi global" dari negara-negara besar (Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC, Jepang) yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Selat Malaka tersebut. Di satu pihak Uni Soviet mempunyai kepentingan langsung terhadap Selat Malaka bagi lalu-lintas armadanya dari Samudera Hindia ke pangkalan mereka di Wladiwostok. Di lain pihak Amerika Serikat yang melihat makin meningkatnya armada Uni Soviet di Samudera Hindia, menambah jumlah kapalnya yang beroperasi di samudera tersebut. Hal ini berarti armada-armada itu harus melewati Selat Malaka jika strategi militernya mau dilaksanakan secara efektif. Belum lagi negara RRC yang diam-diam meningkatkan armadanya untuk mengimbangi kedua negara tersebut. Lalu lintas armada negara-negara ini mempunyai latar belakang dari

kepentingan "global strategi" mereka. Amerika Serikat tidak ingin melihat kawasan Asia Tenggara didominasi oleh kekuatan tertentu, terlebih-lebih jika mengingat tujuan politik Uni Soviet dan RRC, yaitu mengkomunikasikan dunia. Di antara Uni Soviet dan RRC telah terjadi pertentangan sehingga RRC sendiri khawatir akan politik pengepungan dari Uni Soviet terhadap negaranya. Semuanya ini jika dilaksanakan dengan adu kekuatan terbuka, maka bukan tidak mungkin akan mengakibatkan kehancuran umat manusia. Untuk menghindari hal ini, maka negara-negara tersebut berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuatan di antara mereka, yaitu mencegah sedapat mungkin terciptanya suatu kombinasi kekuatan yang merugikan atau mengancam kekuatan lainnya.

Di samping hal-hal di atas, maka Selat Malaka sebagai perairan internasional dapat merupakan tempat kegiatan infiltrasi, penetrasi dan subversi yang dilakukan oleh pihak luar dengan segala manifestasinya seperti penyelundupan dan pembajakan.

b. Segi ekonomi

Dari negara-negara besar yang sangat berkepentingan langsung terhadap Selat Malaka ini ditinjau dari segi ekonomi adalah Jepang. Jepang sebagai negara industri sangat tergantung pada lalu-lintas kapal tanker di Selat Malaka yang mengangkut minyak dari Timur Tengah. Hampir 90% penyediaan minyak Jepang dari Timur Tengah melewati selat itu dan kira-kira 200 juta ton minyak jumlahnya yang diangkut dari sana. Semuanya ini menjadikan Selat Malaka sebagai "urat nadi hidup" Jepang. Begitu juga bagi Singapura, Selat Malaka merupakan tempat lalu-lintas pelayaran kapal yang singgah di Singapura baik bagi kepentingan perdagangan maupun kapal-kapal yang memerlukan pengisian bahan bakar dan perbaikan-perbaikan kapal.

Untuk masa yang akan datang, maka landasan kontinen di Selat Malaka diperkirakan mengandung kekayaan mineral yang membawa harapan, seperti terlihat dari adanya usaha kegiatan eksplorasi minyak bumi di lepas pantai Sumatera Utara. Jadi sumber kekayaan laut yang terkandung di dalamnya merupakan sumber potensiil bagi pembangunan negara.

KEPENTINGAN NEGARA—NEGARA PANTAI TERHADAP SELAT MALAKA

Kepentingan negara-negara pantai terhadap Selat Malaka sebagai perairan teritorialnya sebenarnya searah dengan kepentingan tiap negara pesisir terhadap laut teritorial dan dapat digolongkan dalam tiga lingkungan kepentingan besar, yaitu : Kepentingan ekonomi, kepentingan navigasi internasional dan kepentingan keamanan dan kesejahteraan negara pantai.¹ Masalah lebar laut teritorial akan dibahas pada bagian terakhir dari tulisan ini.

Kepentingan ekonomi yang erat hubungannya dengan masalah lebar laut teritorial adalah kepentingan negara dalam perikanan dan pengambilan hasil laut lainnya sebagai sumber kehidupan bagi rakyatnya. Dalam hal ini terlihat dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu pihak terdapat negara-negara yang hendak menyelamatkan perikanan dekat pantai bagi rakyat. Di lain pihak adanya negara-negara lain yang biasa melakukan penangkapan ikan jauh dari negaranya, seringkali dekat sekali di muka pantai negara lain. Salah satu alasan negara yang tidak menginginkan lebar laut teritorial diperluas, yaitu supaya nelayan mereka mempunyai keleluasaan bergerak yang sebesar-besarnya sampai dekat di muka pantai negara lain.

Dari segi kepentingan pelayaran internasional, maka tindakan pelebaran laut teritorial mengakibatkan perluasan ruang berlakunya kedaulatan negara-negara pantai. Tetapi walaupun demikian, kepentingan komunikasi internasional bagi perdagangan tetap diperhatikan. Hal ini sebenarnya sudah terjamin dengan adanya ketentuan hak lintas damai. Ketentuan ini cukup menjamin lalu lintas kapal-kapal dari segala bangsa.

Adapun kepentingan keamanan dan kesejahteraan dalam arti sempit meliputi ketertiban dan kesejahteraan negara pantai. Misalnya pelanggaran mengenai ketentuan fiskal, bea cukai dan imigrasi merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat, sedangkan tindakan-tindakan penjagaan terhadap berjangkitnya penyakit dan wabah, merupakan salah satu kepentingan kesejahteraan negara pantai yang terpenting. Kepentingan keamanan dalam arti yang luas tidak perlu selalu diartikan sebagai kepentingan militer dalam arti strategi

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konperensi-konperensi Hukum Laut Jenewa 1958/1960*, Bandung, 1962, hal. 202

global. Pengalaman sejarah pernah menunjukkan bahwa kapal perang asing pernah memainkan peranan dalam gangguan keamanan negara. Karena itu pengawasan atas lalu lintas kapal perang asing merupakan suatu hal yang mutlak perlu diperhatikan.

Secara keseluruhan di dalam menanggulangi masalah di atas ini, maka negara pantai dapat melakukan kedaulatan atas wilayah perairannya dengan peraturan sebagai berikut :

- Mengadakan larangan bagi warga negara asing untuk mencari ikan, mutiara dan hasil-hasil laut lainnya di dalam laut wilayah dan hanya mengijinkannya bagi warga negara sendiri
- Negara-negara pantai dapat melarang kapal-kapal dari negara-negara asing untuk berlayar dekat pantai
- Diadakannya peraturan yang harus dipenuhi oleh kapal-kapal dari negara asing yang memasuki wilayah perairannya.

Dengan adanya peraturan ini, dapat diharapkan kepentingan negara pantai akan dilindungi tanpa merugikan kepentingan internasional lainnya.

KEPENTINGAN INDONESIA

Kepentingan nasional Indonesia terhadap Selat Malaka ini berhubungan erat dengan letak geografis dan struktur fisik dari tanah air Indonesia.

Letak geografis Indonesia mempunyai arti yang penting, yaitu di silang jalan dunia antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan antara Benua Asia dan Australia. Di samping itu Indonesia adalah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisah-pisahkan oleh lautan. Posisi yang sedemikian terbuka itu memberikan sifat mudah pecah belah dan sangat peka serta rawan terhadap pengaruh dari luar.

Ada beberapa aspek yang dapat ditinjau dari kepentingan Indonesia ini yaitu aspek ekonomi, keamanan nasional dan keamanan lingkungan. Aspek-aspek ini ditinjau baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Dari segi kepentingan ekonomi selat ini dapat dilihat dari jangka panjang dan jangka pendek. Menyangkut kepentingan jangka pendek,

maka Selat Malaka sebagai kawasan perikanan merupakan mata pencarian yang penting baik bagi nelayan-nelayan daerah pantai maupun bagi hasil negara Indonesia. Indonesia tidak menghendaki sumber-sumber perikanan itu dieksploitir oleh negara-negara lain, karena hasil perikanan ini dapat dikembangkan baik bagi konsumsi sendiri maupun untuk diekspor. Sebagai kawasan eksplorasi dan eksploitasi, maka landasan kontinen dan tanah di bawahnya mengandung berbagai sumber kekayaan mineral, misalnya minyak tanah, mangaan, nikel, kobalt, fosfor, tembaga dan lain-lainnya. Sehubungan dengan ini pemerintah Indonesia telah mengadakan persetujuan mengenai landasan kontinen dengan pemerintah — pemerintah Malaysia, Thailand dan Australia.¹ Hal ini untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Untuk strategi jangka panjang, maka Indonesia menginginkan mengurangi arti pentingnya Selat Malaka sebagai lintas pelayaran internasional dan berusaha "memindahkan" lalu lintas itu untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia, misalnya pelabuhan Tanjung Priok, Teluk Bayur dan Cilacap.

Pembahasan masalah aspek keamanan ansional Indonesia bertitik tolak pada bebarapa kenyataan yang menjadi dasar pertimbangan dan pemikiran. Kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan adalah sangat rawan terhadap gangguan keamanan baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Penggunaan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas pelayaran armada perang dari kedua negara super-power menimbulkan kekuatiran yang menyangkut masalah keamanan pertahanan negara Indonesia. Bukan tidak mungkin akan terjadi konflik internasional di antara negara-negara besar yang mempertahankan kepentingan strategi militer masing-masing, karena kehadiran suatu armada di perairan tersebut mempunyai pengaruh strategi maupun politis. Apalagi apabila diingat bahwa armada adalah unsur implementasi politik kekuatan atau alat untuk perimbangan kekuatan dalam suatu kawasan tertentu. Digunakannya Selat Malaka sebagai lintasan ke arah ketegangan dunia internasional di Samudera Hindia sangat bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, karena adalah tujuan Indonesia untuk meredakan ketegangan dunia internasional dari pertentangan antara blok-blok.

¹ Biro Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Wawasan Nusantara*, jilid II, Jakarta, 1977, hal. 1 — 18

Untuk makin mengetahui betapa pentingnya kawasan laut, maka hal ini perlu dihubungkan dengan apa yang dikemukakan A.T. Mahan mengenai kekuatan laut, yaitu :

”Kekuatan laut adalah sebagai kekuatan pengangkut di laut (sea transportation power) yang sangat vital bagi terselenggaranya garis perhubungan di antara pasukan dan sumber perbekalannya, hal mana merupakan satu-satunya unsur yang paling penting di dalam strategi, baik politik maupun militer!”¹

Dengan demikian Indonesia harus memperhatikan kawasan laut yang menjadi perairan wilayahnya, khususnya Selat Malaka. Misalnya jika ada negara-negara lain yang bersengketa, maka selat ini dapat digunakan untuk mencapai kepentingan politiknya. Untuk menjaga keamanannya Indonesia harus dapat mencegah lawan yang satu mendekati wilayah perairan Indonesia untuk menyerang wilayah perairan lawan lainnya.

Selanjutnya Indonesia memperhitungkan pula aspek lainnya yang menyangkut kepentingannya secara langsung, yaitu aspek keamanan lingkungan. Sempit dan dangkalnya Selat Malaka di banyak tempat, banyaknya pulau kecil, meningkatnya volume pelayaran dan semakin besarnya tonase kapal-kapal tanki yang melewatinya, semuanya ini membuat pelayaran kapal-kapal tanki raksasa di selat itu berbahaya. Telah sering terjadi kecelakaan kapal-kapal tanki raksasa di selat ini yang menimbulkan kerugian bagi negara-negara pantainya. Kapal-kapal tanki raksasa yang bertabrakan, kandas dan bocor mengubah selat menjadi lautan minyak, sehingga mengancam kehidupan laut. Bangunan kayu sepanjang pantai akan rusak dan pantai menjadi kotor. Ikan-ikan akan cepat mengungsi dan mati sehingga perimbangan ekologi kawasan akan terancam. Sebagian dari sebab kecelakaan-kecelakaan tersebut adalah lalu-lintas pelayaran yang bebas tanpa batas seperti yang diinginkan oleh negara-negara besar.

Untuk membela segala kepentingan ini, maka sudah sewajarnya Indonesia menginginkan Selat Malaka sebagai bagian dari perairan teritorialnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4/1960. Sebelum peraturan ini ke luar, Indonesia berdasarkan ”Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (*Staatsblad*, 1939 No. 442) pasal 1² menyatakan bahwa laut wilayah

1 Bintoro Harjono, E, dkk., *Geopolitik dan Geostrategi*, Jakarta, 1966, hal. 21

2 *Wawasan Nusantara*, hal. 1—18

Indonesia lebarnya 3 mil laut diukur dari garis air rendah (garis pasang surut). Peraturan ini membuat pulau-pulau Indonesia menjadi terpisah satu sama lain karena perairan di luar laut wilayah adalah laut lepas yang bebas dilayari oleh kapal-kapal asing. Terdorong oleh rasa keamanan yang terancam dengan peraturan tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957. Deklarasi ini memproklamirkan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ditetapkan pula bahwa batas laut menjadi 12 mil diukur dari lingkaran garis pangkal yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau terluar di Indonesia. Pengumuman 13 Desember 1957 itu kemudian merupakan titik tolak bagi perjuangan Wawasan Nusantara. Pada tanggal 18 Pebruari 1960, Wawasan Nusantara ini diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4/1960, dan kemudian berdasarkan ini dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Lalu-lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 1962.¹

Melihat segi hubungan Selat Malaka dengan Wawasan Nusantara, maka hal ini dapat dilihat kaitannya dengan lebar laut wilayah 12 mil dan cara menarik garis pangkal. Garis pangkal ditarik dari titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar di Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara pantai, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat (pasal 1 (2) UU No. 4/1960).²

Berdasarkan Undang-undang di atas, maka Indonesia telah mengadakan perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah dan persetujuan tentang landasan kontinen dengan negara-negara tetangga. Hal ini sangat diperlukan sebagai legalitas dan pedoman bagi Indonesia maupun negara tetangga untuk melaksanakan pembangunan nasional masing-masing. Persetujuan dan perjanjian ini pun dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.

1 *Ibid.*

2 *Ibid.*

KEPENTINGAN MALAYSIA

Malaysia dan Indonesia mempunyai kepentingan searah terhadap Selat Malaka sehingga kedua negara ini sepakat untuk menuntut selat itu sebagai bagian perairan teritorialnya. Kepentingan yang dirasakan bersama oleh kedua negara itu adalah segi ekonomi dan keamanan lingkungan. Malaysia pun menginginkan jaminan bagi pengolahan kekayaan di laut, di dasar laut dan bumi di bawah dasar laut. Di samping hal tersebut, maka Malaysia menginginkan jaminan atas kelancaran dan keselamatan pelayaran secara menyeluruh di Selat Malaka, mengingat terjadinya kecelakaan-kecelakaan.

Untuk memahami kepentingan Malaysia dari segi pertahanan dan keamanan nasionalnya, maka hal ini tak dapat dilepaskan dari kondisi geografisnya, situasi dalam negeri maupun pengaruh dari luar yang langsung menyangkut kestabilan dalam negeri.

Malaysia terdiri dari dua wilayah yaitu Malaysia Barat, adalah Semenanjung Malaya, dan Malaysia Timur, terdiri dari Sabah dan Sarawak, yang terletak di Kalimantan Utara. Negara ini menghadapi masalah yang rumit karena sifat majemuk masyarakatnya. Sifat majemuk masyarakat Malaysia menyebabkan Malaysia harus menjalankan politik luar negeri yang sedikitnya tidak menggoncangkan kestabilan politik dan sosial dalam negeri. Malaysia harus waspada akan kemungkinan masalah sosial berkembang menjadi pertentangan fisik di seluruh negara. Terlebih-lebih karena masyarakat masing-masing mempunyai ikatan kulturil yang berbeda. Tiap kelompok mengandung unsur-unsur yang dapat saling menjauh dan mencari ikatan yang lebih sesuai dengan tuntutan mereka. Jika proses penjaualan dan pendekatan ini terjadi, maka bukan saja eksistensi Malaysia terancam, tetapi juga negara-negara tetangga, karena penduduknya mempunyai ikatan primordial dengan golongan-golongan penduduk di Malaysia. Mengingat faktor-faktor di atas, maka Malaysia mengusahakan pemecahan masalah keamanan dengan memperkecil ruang gerak subversi, menciptakan proses ke arah stabilisasi politik dan tak kurang pentingnya memperteguh kerjasama regional serta melancarkan politik luar negeri yang terbuka dan menjalin persahabatan terhadap semua negara. Ancaman yang pada saat ini dirasakan oleh Malaysia adalah gangguan gerombolan komunis di perbatasan negaranya. Terhadap negara-negara komunis yang berdampingan dengan negaranya seperti Kamboja dan Republik Sosialis Viet-

nam, maka Malaysia harus meningkatkan kewaspadaannya akan bahayanya negara komunis tersebut.

Karena kepentingan-kepentingan tersebut, maka Indonesia dan Malaysia akan tetap berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional bagi tuntutan mereka bahwa Selat Malaka bukanlah selat internasional, melainkan perairan teritorial mereka sesuai dengan tuntutan atas laut wilayah selebar 12 mil. Juga dianggap perlu untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah Selat Malaka menjadi tempat adu kekuatan negara-negara besar dan medan pertempuran, karena masalah ini erat berkaitan dengan gagasan "netralisasi" Asia Tenggara yang menyatakan Asia Tenggara sebagai kawasan damai, merdeka dan netral.

KEPENTINGAN SINGAPURA

Bertentangan dengan sikap Indonesia dan Malaysia yang menganggap Selat Malaka sebagai bagian dari perairan teritorialnya, maka sebaliknya Singapura tetap menginginkan agar Selat Malaka merupakan selat internasional dengan hak lintas bebas. Hal ini dapat dimengerti, karena menyangkut kelanjutan hidup Singapura yang banyak tergantung dari perdagangan internasional. Keadaan ini disebabkan letak Singapura yang strategis, diapit oleh negara Indonesia dan Malaysia dan berada pada silang tempat lalu-lintas pelayaran kapal-kapal dagang negara-negara di dunia. Lagi pula berkat pelabuhan alamnya yang baik dan adanya politik perdagangan bebas, Singapura merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di samping itu kelangsungan hidupnya pun berdasarkan bidang jasa (service) untuk perhubungan laut dan udara berupa fasilitas-fasilitas pelabuhan laut dan udara. Disediakan galangan-galangan kapal yang berfungsi memberi fasilitas pelayanan terhadap kapal-kapal besar, termasuk kapal-kapal tanki raksasa. Jasa-jasa ini menghasilkan jumlah devisa yang sangat besar bagi Singapura mengingat makin meningkatnya pelayaran di selat itu. Industri jasa makin meningkat dan kini meliputi US\$ 300 juta. Hampir 2.000 — 3.000 kapal tiap bulan memerlukannya.¹ Singapura adalah pelabuhan transito terbesar di seluruh Asia Tenggara dengan pusat kegiatan perdagangan dan pengilangan minyak tanah yang merupakan sumber penghasilan pokok

¹ Gupta, Bhabani Sen, *The Malacca Straits and the Indian Ocean*, New Delhi, 1974, hal. 89

bagi negara dan rakyat. Perkembangan terakhir ini sekarang didukung oleh adanya pengembangan sektor industri setempat. Untuk memajukan industrinya, maka negara ini memerlukan bahan-bahan baku yang harus didatangkan dari luar. Dewasa ini Singapura menampakkan kecenderungan pada kerjasama regional karena menyadari akan ketergantungannya pada sumber-sumber bahan mentah tersebut. Oleh karena itu demi kepentingan ekonominya Singapura berusaha mengembangkan hubungan baik dengan negara tetangganya (kerjasama ASEAN) dan negara-negara non Asia Tenggara, termasuk negara-negara besar. Singapura menyediakan segala fasilitas pelabuhan yang ada, baik untuk kapal-kapal Uni Soviet maupun bagi kapal-kapal perang Amerika Serikat dan RRC. Menyangkut hubungannya dengan negara-negara besar, maka dapat dilihat bagaimana Singapura merasa berkepentingan akan adanya kepentingan negara-negara besar tersebut. Singapura menginginkan agar Amerika Serikat dapat lebih banyak memberikan bantuan "skill and resources"-nya kepada negara-negara Asia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial mereka masing-masing. Jepang adalah sebagai partner untuk kemajuan dan untuk mengimbangi pengaruh negara-negara besar lainnya di Asia Tenggara. Lebih jauh dia mengharapkan agar kemampuan ekonomi Jepang yang besar dapat digabungkan dengan kesediaan dan kemampuan Singapura untuk mengembangkan Asia Tenggara. Hal ini dimungkinkan karena Jepang dalam tahun-tahun mendatang melihat Singapura sebagai pusat kegiatan industrinya di luar Jepang dan sebagai pusat perbekalan bagi usaha-usaha Jepang mencari minyak di Asia Tenggara. Mengingat mayoritas penduduk Cina hampir 90% di Singapura, maka wajiblah Singapura bersikap hati-hati untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan RRC. Singapura sangat kuatir bahwa hubungan tersebut akan memperkuat kembali "kecinaan Singapura" dan hal ini akan dapat menghancurkan nation building "Singaporeans". Lebih jauh dia akan menimbulkan kecurigaan negara-negara Asia Tenggara terhadap Singapura sebagai "Third China". Hal ini harus dihindarkan.

Dari uraian di atas jelaslah terlihat bahwa Singapura menjalankan politik yang menitikberatkan kepada usaha melindungi kepentingan perdagangan dan kedudukannya sebagai pelabuhan transit, serta pasar modal Asia. Pokoknya Singapura sesuai dengan keadaannya lebih mementingkan hidup perekonomiannya daripada menitik beratkan pada segi politik dan ideologi. Oleh karena itu Singapura tidak setuju dengan

tuntutan Indonesia dan Malaysia terhadap Selat Malaka. Begitu juga terhadap pembatasan 200.000 tonase¹ bagi kapal-kapal yang melewati Selat Malaka. Singapura tetap menginginkan hak lalu lintas bebas bagi kapal yang lewat di selat itu. Singapura kuatir bahwa pembatasan peraturan pelayaran di kawasan itu akan mengurangi penghasilan negaranya. Menanggapi kekuatiran Indonesia dan Malaysia mengenai masalah keamanan, bahwa akan terjadi konflik internasional apabila lalu lintas bebas di selat itu tidak dibatasi, maka Singapura menganggap hal ini tidak perlu dikuatirkan. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang menyatakan : '' the problem is not as a cold war or power conflict issue, but largely as a problem of communication''.²

Untuk mengatasi perbedaan pendapat di dalam pemecahan masalah ini, maka diadakan pertemuan-pertemuan di antara ketiga negara pantai. Ketiga negara pantai ini adalah anggota ASEAN, sehingga diharapkan dengan berlandaskan kerjasama ASEAN perbedaan paham ini dapat diatasi.

Pada uraian sebelumnya telah diterangkan bagaimana pelayaran di Selat Malaka mengandung bahaya sehingga sering terjadi kecelakaan-kecelakaan yang menimbulkan kerugian negara-negara pantainya. Salah satu sebab utama terjadinya kecelakaan adalah kedangkalan Selat Malaka yang tidak merata. Beberapa bagian yang dangkal kurang dari 25 m. Sedangkan suatu kapal tanki sebesar 150.000 — 200.000 ton yang penuh dengan muatan memerlukan kedalaman 22 m (65 kaki).³ Kedalaman ini sangat berbahaya bagi kapal-kapal raksasa yang berbobot mati lebih dari 200.000 ton. Belum lagi mengingat keadaan dasar laut Selat Malaka. Oleh karena itu, maka soal-soal yang menyangkut pembatasan bobot kapal dan kedalaman air menjadi masalah bagi negara Indonesia dan Malaysia di satu pihak dan Singapura di lain pihak. Sehubungan dengan masalah ini, maka timbul masalah keselamatan pelayaran yang mendesak untuk segera diatasi di samping masalah tuntutan terhadap Selat Malaka sebagai perairan teritorial negara Indonesia dan Malaysia yang belum dapat disetujui oleh Singapura. Telah diadakan konsultasi untuk menentukan posisi bersama atas hal-hal yang menyangkut selat itu.

1 Lihat Laporan *Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Ketiga Negara Pantai*, Direktorat Perjanjian Internasional Deplu RI, Jakarta, 1975

2 Gupta, Bhabani Sen, *op. cit.*, hal. 89

3 Kirdi Dipoyudo, *loc. cit.*, hal. 41

Pada tahap pertama pertemuan dan konsultasi di antara negara-negara pantai ini, maka Singapura selalu mengulur ulur waktu dan memperlihatkan sikap enggan akan pembahasan masalah keselamatan pelayaran tersebut. Negara ini takut dirugikan kepentingan ekonominya. Baru setelah terjadinya kecelakaan yang serius dengan kandasnya kapal "Showa Maru" pada tanggal 6 Januari 1975, Singapura mulai menunjukkan sikap "bersedia" untuk membahas masalah ini. Pemerintah Republik Indonesia menyambut gembira kesediaan Singapura tersebut. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ketiga negara pantai diadakan di Singapura pada tanggal 19 Pebruari 1975. Walaupun pertemuan ini belum menghasilkan keputusan yang konkrit, terutama mengenai masalah pembatasan tonase kapal, pertemuan tersebut mempunyai arti yang lebih penting untuk dapat menunjukkan suatu sikap bersama negara-negara pantai. Barulah pada pertemuan berikutnya di Manila pada tanggal 24 Pebruari 1977 dicapai persetujuan oleh para Menteri Luar Negeri ketiga negara pantai tentang pengaturan pelayaran di Selat Malaka. Telah disetujui beberapa keputusan, diantaranya yang terpenting ialah (1) sistem UKC (Under Keel Clearance) paling sedikit 3,5 m, dan (2) pengaturan tentang Pemisahan Alur Pelayaran (Traffic Separation Scheme), di tiga bagian, yaitu One Fanthom Bank, Main Strait dan Philip Channel kemudian Hamburg Lighthouse.¹ Persetujuan dan kata-kata sepakat di antara ketiga negara itu memang menggunakan judul "Keselamatan Pelayaran", tetapi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari persetujuan tersebut adalah serba ganda. Di samping soal "pelayaran" itu, segera akan nampak juga soal "keamanan" (security) untuk mencegah digunakannya selat tersebut bagi "manouvre" kapal-kapal asing. Juga karena pertimbangan "ekonomi" guna melindungi sumber kekayaan laut, seperti ikan dan sebagainya.

Jika ditinjau kembali persetujuan mengenai pelayaran di Selat Malaka, maka dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa semuanya ini adalah karena berlandaskan kerjasama ASEAN. Ketiga negara pantai adalah anggota ASEAN, sehingga wajarlah jika dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi negara-negara ini berpedoman kepada landasan keputusan ASEAN. Begitu pula dalam hal perbedaan pendapat lainnya, maka dengan berlandaskan kepada "The Declaration of ASEAN Concord" (Deklarasi Kesepakatan ASEAN) dan "Treaty of Amity and

¹ Lihat "Agreement On Measures to Enhance Safety of Navigation and to Promote Close Cooperation and Coordination on Anti Pollution Policy and Measures in the Straits of Malacca and Singapore", Direktorat Perjanjian Internasional Deplu RI, Jakarta, 1977

Corporation'' (Traktat Persahabatan dan Kerjasama), Indonesia dan Malaysia dapat memberi pengertian kepada Singapura. Dengan berlandaskan kerjasama kepentingan ekonomi Singapura tidak akan dirugikan oleh tuntutan Indonesia dan Malaysia terhadap Selat Malaka.

Tercapainya persetujuan di atas, menunjukkan kepada dunia luar, bahwa wadah kerjasama ASEAN telah dapat dimanfaatkan. Arti persetujuan ini dapat dilihat segi politisnya, walaupun secara teknis mendetail belum berarti telah dicapai kata sepakat sepenuhnya, sebab masih banyak hal-hal teknis yang harus dipelajari secara bersama-sama.

KEPENTINGAN NEGARA—NEGARA BESAR

Negara-negara besar Amerika Serikat, Uni Soviet, RRC dan Jepang mempunyai tuntutan yang sama terhadap Selat Malaka yaitu menginginkan ''hak lintas bebas'' (free passage) dan menganggap Selat Malaka sebagai selat internasional.

Selat Malaka mempunyai arti penting bagi Amerika Serikat, baik kepentingannya di Selat Malaka dan Asia Tenggara khususnya maupun ''strategi globalnya'' dalam menjaga keseimbangan kekuatan dengan negara Uni Soviet.

Perkembangan baru yang terjadi pada situasi internasional telah mengubah strategi politik Amerika Serikat dari politik ''pembendungan komunis'' menjadi politik yang lebih luwes yaitu ''politik koeksistensi damai''. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya beban yang terlalu berat dalam mempertahankan dunia non-komunis dalam perang dingin, meningkatnya perkembangan persenjataan nuklir Uni Soviet dan timbulnya persaingan ekonomi yang berat dari negara Jerman dan Jepang. Di samping itu perpecahan yang terjadi antara RRC dan Uni Soviet telah pula mengubah sikap Amerika Serikat terhadap RRC dengan mengadakan pendekatan kepada negara ini. Dengan politik ''koeksistensi damai''-nya, Amerika Serikat mengharapkan agar negara-negara lain menentukan sendiri cara-cara mewujudkan kemakmuran rakyatnya sendiri. Bantuan ekonomi dan perlindungan akan tetap diberikan tapi atas dasar tanggung jawab negara yang bersangkutan. Amerika Serikat menyusun siasat nasional baru untuk Asia, yaitu berusaha menghindarkan

pecahnya suatu konflik baru di kawasan Asia. Di satu pihak dia menyokong dan membantu negara-negara Asia yang non-komunis dan di lain pihak mengusahakan kerjasama dengan RRC dan lain-lain negara komunis di kawasan tersebut. Amerika Serikat tidak dapat membiarkan kekuatan lain menguasai wilayah yang kaya raya akan bahan baku ini, termasuk minyak. Penanaman modal Amerika Serikat di Malaysia adalah US \$ 250 juta dan di Indonesia US \$ 600 juta.¹

Jadi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara selain kepentingan ekonominya, juga menyangkut kepentingan "strategi global"-nya terhadap komunisme. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategi bagi operasi Armada VII-nya, berikut perbekalan dan armada niaganya. Pada tahun 1964, suatu team Anglo-Amerika mengunjungi pulau-pulau di Samudera Hindia dan merencanakan untuk mendirikan pangkalan-pangkalan di sini. Pulau-pulau di sini merupakan pangkalan strategi yang baik bagi Amerika Serikat. Mereka juga mengunjungi Pulau Diego Garcia, Admiral McCain mengatakan : "As Malta is to the Mediterranean, Diego Garcias is to the Indian Ocean equidistant from all points."² Pada waktu perang India—Pakistan tahun 1972 Amerika Serikat mengirimkan suatu "task force" ke Teluk Benggala melalui Selat Malaka.

Dari uraian di atas jelaslah bagi Amerika Serikat, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategi untuk melindungi kepentingan nasionalnya di kawasan Pasifik dan Samudera Hindia.

Kepentingan Uni Soviet terhadap Selat Malaka secara tidak langsung harus ditinjau dari latar belakang kepentingan nasionalnya. Dalam mewujudkan cita-cita untuk mengkomunikasikan dunia di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet telah menempuh berbagai cara. Di satu pihak menggalang persatuan dan solidaritas negara-negara sosialis dunia dengan Moskwa sebagai pusat, di lain pihak memelihara "peaceful coexistence" dengan negara-negara komunis. Berusaha membantu perjuangan pembebasan rakyat, khususnya di negara-negara non-komunis yang sedang berkembang dan sekaligus berkoeksistensi dengan pemerintah-pemerintah yang sah di negara-negara itu.

Adanya perpecahan dengan RRC telah mendorong Uni Soviet untuk membendung pengaruh RRC dalam mencapai tujuan politik yang

1 Gupta, Bhabani Sen, *op. cit.*, hal. 75

2 *Ibid*, hal. 76

sama. RRC ingin mengkomunikasikan dunia di bawah gagasan Mao. Kemampuan RRC untuk menguasai pengaruh Uni Soviet akan berarti makin menjauhkan tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu Uni Soviet berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencegah perkembangan RRC di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan dunia pada umumnya. Bukan rahasia lagi bahwa Vietnam Utara begitu dekat dengan Uni Soviet dan bahwa Moskwa berusaha menarik Hanoi ke dalam orbitnya. Kemudian menyusul perjanjian dengan India, pemeliharaan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Malaysia dan Singapura yang dimulai tahun 1969 dan hubungan lebih bersahabat dengan Indonesia. Begitu juga dengan Muangthai. Semuanya ini seolah-olah merupakan pengepungan terhadap RRC. Dan bukan tidak mungkin Asia Tenggara digunakan sebagai landasan politik pengepungan terhadap RRC, di samping untuk menggeser pengaruh Amerika Serikat di Asia. Pendekatan Amerika Serikat terhadap RRC menimbulkan kekhawatiran Uni Soviet. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, maka sudah sewajarnya negara-negara kecil lainnya selalu waspada. Bukan tanpa alasan kalau Uni Soviet makin meningkatkan armadanya di Samudera Hindia, Samudera Hindia merupakan pusaran (Vortex) bagi Uni Soviet di mana satuan-satuan armadanya dari Timur dan dari Barat saling berjumpa dan India merupakan titik tengah dari jalur maritim strategis tersebut. Dari sebelah Timur Uni Soviet mengirimkan satuan-satuan armada Pasifik yang berpangkalan di Wladiwostok ke Samudera Hindia melalui laut Jepang, Pasifik Barat, Selat Singapura dan Selat Malaka, dan di sebelah Barat dari pangkalan Angkatan Laut Sebastopol dan Odessa ke Samudera Hindia melalui Laut Hitam. Di samping kepentingan di atas, maka kepentingan lalu-lintas kapal dagangnya yang melewati Selat Malaka ini berhubungan juga dengan kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah.

Kepentingan RRC terhadap Selat Malaka terutama dapat dilihat dari segi kepentingan politisnya. Kekhawatiran terhadap pengepungan Uni Soviet telah mendorong perubahan politik luar negerinya dan membuatnya lebih luwes. Telah dilancarkan serangkaian ofensif diplomatik, diantaranya membuka hubungan diplomatik baru (Kanada, Italia, Ethiopia, Iran, Australia, Belgia) dan memulihkan hubungan diplomatik yang telah beku atau putus sebelumnya, pendekatan dengan Amerika Serikat dan diterimanya RRC sebagai anggota PBB. Tetapi hal ini bukan berarti mengubah tujuan politiknya untuk mengkomunikasikan dunia, sebab hingga kini belum ada petunjuk-

petunjuk bahwa telah ada perubahan penting dalam strategi "garis keras" RRC. Mengingat hal ini, maka sewajarnya negara-negara Asia Tenggara selalu waspada terhadap RRC. Terlebih jika mengingat adanya masyarakat Cina perantauan dan terdapatnya partai-partai komunis di Asia Tenggara. Melalui apa yang dinamakannya "perang-perang pembebasan nasional" dan "fraternal parties" maka RRC berusaha untuk mencapai tujuan politiknya.

Selat Malaka bagi RRC di samping sebagai jalur pelayaran kapal-kapal perangnya, juga merupakan jalur lintas-laut bagi kepentingan subversinya. Kekuatan Angkatan Laut RRC yang beroperasi di Samudera Hindia menggunakan lintas laut yaitu : Laut Cina Selatan, Selat Singapura dan Selat Malaka pulang pergi. Kehadiran Angkatan Laut Cina di Samudera Hindia lebih bersifat psikologis politis daripada strategis, dan bukan untuk menyaingi kekuatan satuan Angkatan Laut Uni Soviet, karena memang jauh belum dapat menyamainya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan subversinya ialah melemahkan secara sistematis, kemudian menghancurkan dan akhirnya menggantikan musuh-musuhnya. Karena negara-negara Asia Tenggara merupakan pasaran barang-barang buatan Cina dan sumber bahan mentah, maka RRC memerlukan Selat Malaka juga bagi lalu-lintas kapal-kapal dagangnya. Lalu lintas kapal-kapal niaga dalam jumlah besar itu adalah dalam rangka menyebar pengaruh dengan bantuan ekonomi dan militer di samping hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara, Afrika dan Timur Tengah.

Sehubungan dengan pernyataan Uni Soviet bahwa Selat Malaka adalah selat internasional, maka dalam hal ini RRC menyetujui tuntutan negara-negara pantainya. Hal ini disebabkan kekuatiran RRC terhadap "politik pengepungan" Uni Soviet. RRC berusaha menahan pengaruh Uni Soviet sejauh mungkin.

Pada uraian sebelumnya telah disinggung kepentingan Jepang terhadap Selat Malaka, terutama kepentingan ekonominya. Demi kepentingan ekonominya Jepang menginginkan agar Asia Tenggara aman, terhindar dari bermacam-macam subversi komunis, dan mempunyai daya tahan politik terhadap propaganda komunis serta mengurangi kerawanan-kerawanan sosialnya. Jepang menghendaki agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kestabilan umum baik politik maupun ekonomi. Jika keadaan di negara-negara ini stabil, maka daya beli rakyat relatif baik dan pasaran aman bagi

barang ekspor hasil industrinya. Sebagai pelaksanaan dari semua ini Jepang menginginkan agar jalur-jalur pelayaran penting senantiasa terbuka dan aman bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal tankinya. Negara ini selalu berusaha keras untuk mengatasi atau menolak setiap usaha yang dapat menghambat "garis hidup"-nya karena ekonomi Jepang ditunjang oleh lalu lintas perairan untuk mengangkut bahan baku kebutuhannya. Hampir 80% dari bahan baku yang dibutuhkan-nya harus diangkut dengan kapal. Baik ekspor maupun impor Jepang diangkut melalui Selat Malaka dan Selat Makasar. Impor minyak Jepang dari Timur Tengah berjumlah 85 — 90%. Oleh karena inilah Jepang menginginkan Selat Malaka sebagai selat internasional, karena negara ini tidak mau dirugikan kepentingan-kepentingannya. Tetapi kedudukan Selat Malaka bukan ditentukan oleh pernyataan-pernyataan sepihak demi kepentingan masing-masing negara; masalah ini ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum laut internasional.

KEDUDUKAN SELAT MALAKA SEBAGAI JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL

Ketidak tegasan dan belum seragamnya lebar laut teritorial telah menimbulkan persoalan, terutama apabila laut teritorial itu berupa selat yang diapit oleh dua negara pantai yang berbeda seperti halnya dengan selat Malaka.

Pada jaman dahulu para ahli hukum seperti L. Oppenheim dan Colombos bertitik tolak pada penetapan lebar laut teritorial 3 mil. Sesuai dengan ketentuan ini negara-negara besar menganggap Selat Malaka sebagai selat internasional dengan hak lintas bebas. Tetapi setelah Indonesia dan Malaysia menetapkan lebar laut teritorial 12 mil, maka negara-negara pantai ini menginginkan selat ini sebagai perairan teritorialnya dengan "hak lintas damai". Baik L. Oppenheim¹ maupun Colombos² hanya mengemukakan tentang ketentuan selat yang lebarnya tidak lebih dari 6 mil. Tetapi diterangkannya bahwa batas lebar laut teritorial pada selat ditentukan oleh kedaulatan teritorial negara masing-masing. Jalur pelayaran internasional melalui selat tidak terikat oleh ketentuan lebar laut teritorial suatu negara pantai. Di selat itu ter-

1 L. Oppenheim, *International Law*, Vol. I, London, 1967, hal. 510—511

2 Colombos, C. John, *The International Law of the Sea*, London, 1952, hal. 197—198

dapat "hak lintas damai" bagi kapal-kapal dagang semua negara. Apabila lebar selat kurang dari ketentuan lebar laut teritorial kedua negara pantai, maka batas pada selat merupakan "garis tengah" (median line) sepanjang selat, kecuali bila ditentukan lain oleh suatu perjanjian internasional.

Melihat kepada pendapat ini sebenarnya Malaysia dan Indonesia dapat memenuhi ketentuan ini. Keduanya telah mengadakan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka pada tanggal 17 Maret 1970 yang menetapkan, bahwa batas laut kedua negara itu di Selat Malaka adalah sejauh 12 mil. Perjanjian ini telah diratifikasi dan telah berlaku semenjak penukaran "Piagam Ratifikasi"-nya tanggal 8 Oktober 1971.¹ Mengenai lebar selat yang kurang dari 24 mil, diambil garis tengah sebagai batasnya.

Bersangkutan dengan "hak lintas damai" di selat itu, maka inipun telah diatur oleh Indonesia dalam Undang-undang No. 4/1960 pasal 3. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962. Pada Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan tahun 1958 telah dikukuhkan "hak lintas damai" di laut teritorial dalam pasal 14—17.² Adapun yang dimaksud dengan hak lintas damai itu adalah pelayaran melalui laut teritorial dengan tujuan melintasi saja; laut teritorial dengan tujuan memasuki laut pedalaman; laut teritorial dari laut pedalaman menuju laut lepas. Jika melihat kepada peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 yang salah satu pasalnya (pasal 2 ayat (1) sub (b)) disebutkan juga bahwa ada jaminan hak lintas damai bagi pelayaran dari laut bebas ke laut bebas. Begitu juga dengan pasal 2 ayat (2) dan (3) yang kemudian dipertegas lagi dalam pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan (2). Aturan-aturan ini semuanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada, yaitu Konvensi Jenewa 1958 pada pasal 14—17.

Ketentuan di atas ini jika dibandingkan dengan hak lintas bebas tentulah sangat bertentangan.

Di dalam masalah tuntutan Indonesia terhadap Selat Malaka, maka masalah ini ada kaitannya dengan Wawasan Nusantara dan mengenai pengaturan pelayaran internasional melalui selat. Kepentingan utama Indonesia adalah diterimanya konsepsi "archipelagic

1 *Wawasan Nusantara*, hal. 63

2 Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.*, hal. 261

state” yang menjamin kesatuan wilayah nasional negara kepulauan. Dalam konsepsi ini unsur pokoknya adalah diterimanya cara menarik base lines dari pulau-pulau terluar, diakuinya kedaulatan negara Kepulauan atas perairan Kepulauan (archipelagic waters) dan diterimanya prinsip hak lintas damai melalui perairan Nusantara. Bagi Indonesia juga penting diterimanya prinsip hak lintas damai melalui selat yang dipakai bagi pelayaran internasional. Dalam hal ini harus dibedakan antara selat yang terletak di dalam perairan Nusantara dan selat yang terletak di antara dua negara pantai atau lebih. Selat-selat di dalam perairan Nusantara haruslah tunduk pada rezim perairan tersebut. Ketentuan-ketentuan ini sedang dibahas dalam rancangan yang disebut RSNT (Revised Single Negotiating Text).

Pada Sidang ke—V Konferensi Hukum Laut di New York dalam rancangan RSNT¹ telah diatur soal rezim lintas pelayaran damai (pasal 124), rezim lintas pelayaran alur-alur Nusantara (pasal 125) dan selat yang dipakai bagi pelayaran internasional (the straits used for international navigation). Setelah diadakan beberapa pembicaraan dan pertemuan antara Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka akhirnya ditetapkan bahwa dalam masalah penetapan jalur-jalur dipakai konsepsi "axis". Yang harus ditentukan hanyalah jarak maksimum dari kedua sisi "axis" di mana hak lintas pelayaran Nusantara dapat ditentukan. Konsepsi ini disetujui Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mengenai lebarnya Amerika Serikat mempertimbangkan jarak maksimum 25 mil dari masing-masing "axis" (menurut keterangan konfidensiil Uni Soviet).

Masalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional juga dibahas. Beberapa negara maritim mendukung rezim lintas pelayaran transit (transit passage), yang pada hakikatnya adalah lintas pelayaran bebas dengan sedikit pembatasan-pembatasan. Pembatasan tersebut berbentuk kewajiban bagi kapal-kapal yang melakukan lintas pelayaran dan hak negara-negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya terbatas pada bidang keselamatan pelayaran dan pemeliharaan lingkungan laut.

Salah satu unsur terpenting dari amandemen Malaysia ialah memberikan hak kepada negara selat untuk membuat peraturan perundang-undangan yang membatasi hak lintas pelayaran transit kapal-kapal

¹ *Revised Single Negotiating Text (RSNT)*, Part Two, The Third Conference On The Law of The Sea, New York, 1976

yang karena tidak cukupnya UKC (Under Keel Clearance) akan membahayakan keamanan navigasi dan lingkungan laut negara tersebut. Indonesia mendukung unsur ini. Amerika Serikat kurang menyetujui kalau hanya negara pantai yang berhak menentukannya. Sebagai alternatif Amerika Serikat menganjurkan kepada Malaysia dan Indonesia, agar negara-negara pantai selat Malaka mengadakan konsultasi dengan negara-negara pemakai selat untuk mengatasi persoalan "Under Keel Clearance".

Mengingat kondisi geografis dan ramainya lalu lintas pelayaran internasional melalui selat ini, ketiga negara pantai sepakat untuk mengadakan pengaturan-pengaturan pelayaran pada selat ini dan menolak hak lintas bebas yang diinginkan oleh negara-negara besar. Di dalam RSNT pasal 39 diatur ketentuan mengenai "Sea lanes and traffic separation scheme in straits used for international navigation". Jadi apabila ketiga negara pantai mengadakan peraturan pelayaran di Selat Malaka, maka hal ini memenuhi ketentuan pasal tersebut. Telah diuraikan sebelumnya bahwa telah dicapai persetujuan di Manila yang mengadakan pengaturan pelayaran internasional. Hasil persetujuan ini telah diajukan kepada IMCO (Intergovernmental Maritime Consultation) untuk diminta persetujuannya. Dengan adanya pengaturan ini, maka jelaslah bahwa kekuatan negara-negara besar akan ditutupnya Selat Malaka sebagai route pelayaran internasional tidak beralasan sama sekali dan sewajarnya menerima keinginan negara-negara pantai.

MASALAH RASIAL DI AFRIKA SELATAN

Kirdi DIPOYUDO

"Dari semua tantangan yang kita hadapi, dari semua tujuan yang kita miliki bersama, keadilan rasial adalah salah satu yang paling dasar. Keadilan ini adalah isu dominan masing-masing bangsa dan antar bangsa jaman kita". Demikian Menlu Amerika Serikat Henry Kissinger dalam pidatonya di Lusaka tanggal 27 April 1976.¹ Kita kiranya dapat menyetujui pendapat itu karena masalah rasial adalah salah satu masalah yang paling penting dan mendesak dewasa ini. Itulah juga pendapat PBB yang pada 22 - 28 Agustus 1977 menyelenggarakan suatu konperensi internasional anti apartheid di Lagos. Konperensi yang dihadiri 111 negara, termasuk Indonesia, ini mencari jalan untuk menyelesaikan masalah rasial di Afrika bagian selatan secara damai, dan menghasilkan suatu deklarasi 34 pasal yang dapat dipandang sebagai pernyataan anti apartheid yang paling lengkap sejauh ini. Selain mengutuk politik apartheid Afrika Selatan yang didasarkan atas diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih, konperensi menyebutkan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mengakhirinya.²

Diskriminasi rasial terdapat di banyak negeri, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang menyatakan membela martabat dan persamaan semua orang, tetapi paling menonjol di Afrika Selatan karena dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang serta meresapi segala bidang kehidupan. Oleh sebab itu Afrika Selatan menjadi fokus

1 Dikutip dari *International Affairs Backgrounder*, 28 April 1976, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

2 Lihat *Antara*, 29 Agustus 1977

perjuangan anti rasialisme menuju realisasi keadilan rasial. Dengan pertimbangan ini pembahasan kita akan dipusatkan pada politik rasial apartheid Afrika Selatan. Dan oleh sebab masalah rasial adalah suatu masalah yang berkembang, kita harus juga membicarakan perkembangannya. Maka secara berturut-turut akan dibahas asal mula masalah rasial, perkembangan politik rasial Afrika Selatan, dan perlawanan terhadap politik itu baik dari pihak pemimpin-pemimpin kulit hitam negeri itu maupun dari pihak negara-negara Afrika, negara-negara barat dan PBB. Sebagai penutup akan dijabari prospek dan bentuk penyelesaiannya.

ASAL MULA MASALAH RASIAL AFRIKA SELATAN

Masalah rasial di Afrika Selatan berpangkal pada kenyataan bahwa pendatang-pendatang kulit putih dari Eropa merebut negeri itu dari penduduk kulit hitam dan menggunakan kedudukan mereka yang kuat itu untuk menanamkan kekuatan politik mereka. Sebagai akibatnya, kekuasaan politik itu dewasa ini adalah pada sekitar 4 juta orang kulit putih, sedangkan 18 juta orang kulit hitam tidak mempunyai perwakilan dalam lembaga-lembaga negara Afrika Selatan. Sampai pertengahan abad ke—20 cerita penyerbuan dan pendudukan serta dominasi kulit putih itu pada intinya sama di banyak bagian dunia. Pendatang-pendatang dari Eropa yang lebih unggul perlengkapan ekonomi maupun teknologi dan militernya dengan mudah menundukkan rakyat pribumi Afrika dan secara berangsur-angsur mendapatkan privilese-privilese serta kedudukan serba istimewa.

Akan tetapi pada akhir Perang Dunia II ceritanya mengambil suatu belokan baru. Privilese-privilese mulai disangsikan, khususnya karena privilese-privilese itu dikaitkan dengan warna kulit. Apabila pada abad-abad yang lalu bangsa-bangsa Eropa berebut untuk menundukkan dan menguasai negeri-negeri bukan kulit putih, mereka mulai berebut untuk melepaskan milik-milik kolonial yang menyudutkan mereka. Negara-negara kolonial memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan mereka satu per satu, kerap kali secara tergesa-gesa tanpa persiapan seperlunya dan tanpa memikirkan apa yang akan menimpa bangsa-bangsa jajahan itu apabila hubungan penguasa dan bawahan itu dipotong secara mendadak. Akan tetapi ada beberapa negeri di mana pendatang-pendatang kulit putih telah berakar dan sudah tidak mempunyai negeri untuk kembali. Afrika Selatan adalah

negeri serupa itu. Pada masa orang-orang kulit putih melepaskan koloni-koloni mereka dan pulang ke negeri asal mereka masing-masing dengan senang atau dengan berat hati, orang-orang kulit putih Afrika Selatan justru berusaha untuk mengukuhkan privilese-privilese dan kekuasaan mereka tanpa mempedulikan protes dunia yang semakin meningkat.

Gerakan dekolonisasi melanda dunia umumnya dan Afrika Selatan khususnya secara tak terduga-duga. Dalam dua dasawarsa ratusan juta orang jajahan mendapatkan kemerdekaan dan penguasa-penguasa kulit putih mereka berkemas-kemas untuk pulang ke Eropa atau tinggal di negeri-negeri itu sebagai penasihat pemerintah-pemerintah baru atau sebagai pengusaha-pengusaha. Akan tetapi halnya berlainan di Afrika Selatan, di mana orang-orang kulit putih juga mempunyai jutaan bawahan, tetapi kedua golongan itu hanya mempunyai satu negeri. Orang-orang kulit putih Afrika Selatan tidak dapat pulang ke tanah air seperti orang-orang Inggris atau Perancis, tetapi juga tidak bersedia memandang bawahan mereka sebagai sesama yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Oleh sebab itu mereka mempunyai dua alternatif, yaitu terus memerintah rakyat kulit hitam seolah-olah tidak terjadi suatu perubahan atau memberikan kepada mereka suatu otonom tertentu. Sejak memenangkan pemilihan umum tahun 1948, Partai Nasional yang berkuasa di Afrika Selatan sampai sekarang mencoba menempuh dua jalan itu sekaligus, untuk mempertahankan supremasi serta kedudukan istimewa kulit putih di satu pihak dan menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat kulit hitam secara yang tidak mengancam supremasi kulit putih itu.¹

PERKEMBANGAN POLITIK RASIAL AFRIKA SELATAN

Partai Nasional pimpinan Daniel Francois Malan memenangkan pemilihan umum itu dengan program politik apartheid dan segera mulai melaksanakannya. Sebagai pembenaran telah disusunnya suatu teori, teori apartheid. Apartheid adalah suatu campuran antara praktek-praktek kolonial, superioritas rasial kulit putih, teologi kalvinis dan filantropi paternalis, dan pada intinya mengajarkan bahwa setiap ras mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia, dan oleh sebab itu ras-ras harus

¹ Mengenai asal mula masalah rasial di Afrika Selatan lihat lebih lanjut Leo Marquard, *A Federation of Southern Africa* (London, 1971), hal. 3 — 5

dipisah satu sama lain, agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan kebudayaannya masing-masing. Kontak antara ras yang dapat membahayakan kemurnian budaya ras harus dibatasi. Segregasi dan perkembangan terpisah itu tidak hanya berlaku untuk golongan-golongan rasial yang penting, tetapi juga untuk kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil.¹

Berdasarkan teori itu rakyat Afrika Selatan dipecah menjadi empat golongan rasial utama, yaitu kulit putih, kulit hitam, berwarna (darah campuran atau indo) dan Asia, yang masing-masing dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Secara demikian golongan kulit hitam dipecah menjadi 20 kelompok etnis. Selanjutnya setiap kelompok harus mempunyai tempat tinggal terpisah di Afrika Selatan sebagai negerinya agar dapat hidup dan berkembang secara tersendiri. Dalam rangka itu reservat-reservat kulit hitam hendaknya dikembangkan menjadi apa yang disebut Bantustan atau negeri Bantu.

Di antara pendukung-pendukung apartheid ada yang pertama-tama melihatnya sebagai jalan untuk menyematkan supremasi dan kedudukan istimewa golongan kulit putih, tetapi ada juga yang melihat dan memperjuangkan segi-segi positifnya, yaitu pembangunan negeri-negeri masing-masing menjadi negara yang merdeka. Namun kenyataannya kedua pendapat itu tidak banyak berbeda satu sama lain, terutama karena alokasi tanah adalah sangat pincang dan tidak adil. Rakyat kulit hitam yang merupakan 71% penduduk hanya mendapatkan sekitar 13% wilayah negara, dan bagian kulit hitam ini tidak memiliki kekayaan alam maupun industri, sedangkan minoritas kulit putih yang merupakan 16,7% penduduk (1974) menguasai 87,1% tanahnya, termasuk semua kota besar, pusat industri, tambang, pelabuhan dan tanah pertanian yang paling baik.

Kemenangan Partai Nasional tersebut bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Dalam periode agraris masyarakatnya mengembangkan suatu sistem stratifikasi ekonomi dan sosial berdasarkan ras di mana minoritas kulit putih menduduki tempat teratas dan mayoritas kulit hitam tempat terbawah, sedangkan tempat-tempat diantaranya diduduki golongan berwarna dan golongan Asia (India). Ketika kedudukan kulit putih itu

¹ Tentang teori apartheid lihat Denis Worrell, Ed., *South Africa : Government and Politics* (Pretoria, 1971), khususnya bab kelima; dan Neville Curtis, "South Africa : The Politics of Fragmentation"; *Foreign Affairs*, 50 (1972), hal 283—289

terancam sebagai akibat perkembangan industri, golongan kulit putih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dan memperkuatnya. Dengan maksud itu Partai Nasional merumuskan program apartheid.

Setelah berkuasa, Partai Nasional bergerak secara sistematis untuk memperkuat kedudukannya dalam parlemen dan memperluas kekuasaannya di luar parlemen dengan semakin meningkatkan kekuasaan negara. Dalam rangka itu hak-hak politik golongan kulit hitam, berwarna dan Asia, yang telah terbatas, dikurangi dan lambat laun dihapus. Pada tahun 1951 dikeluarkan *Bantu Authorities Act*, yang menghapus Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi dan sebagai gantinya menetapkan pembentukan pemerintahan suku, regionali dan teritorial di negeri-negeri Bantu, dan fungsi-fungsi administratif, eksekutif dan kehakimannya. Dalam rangka itu pula Pemerintah pada tahun 1950 mengeluarkan *Suppression of Communism Act*, yang melarang organisasi-organisasi politik yang dikuasai kulit putih tetapi didukung kulit hitam atau memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat non-rasial atau pemerintahan mayoritas. Berdasarkan undang-undang itu secara berturut-turut dilarang Partai Komunis (1950), Kongres Demokrasi (1926) dan organisasi-organisasi politik kulit hitam. Pada tahun 1960 Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Kongres PanAfrika (PAC) dilarang dan sejumlah anggotanya, khususnya pemimpin-pemimpinnya dipenjarakan. Secara demikian kekuasaan politik menjadi monopoli kulit putih, sedangkan aspirasi-aspirasi politik golongan-golongan lain disalurkan dengan mengembangkan struktur-struktur kekuasaan di wilayahnya masing-masing secara yang tidak membahayakan kedudukan istimewa minoritas kulit putih.

Sejalan dengan itu Pemerintah Afrika Selatan melaksanakan segregasi rasial di segala bidang kehidupan. Proses itu dimulai dengan segregasi di tempat-tempat umum, kereta api, bis dan alat-alat pengangkutan lain. Pada waktu yang sama dilakukan segregasi perkumpulan-perkumpulan sosial, kebudayaan dan keagamaan. Segregasi tempat tinggal menyusul pada tahun 1950 ketika diundangkan *Group Areas Act*, yang menetapkan area bagi golongan rasial masing-masing. Berdasarkan undang-undang ini banyak orang kulit hitam yang sejauh itu tinggal di daerah kulit putih harus menjual miliknya dan pindah ke area yang ditunjuk bagi mereka. Selanjutnya ditetapkan bahwa orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah perkotaan kulit putih lebih dari 72 jam tanpa izin khusus dari Native Labour Officer, dan bahwa dia memerlukan izin untuk meninggalkan

daerahnya dan memasuki daerah perkotaan. Undang-undang ini memperkuat *Natives Land Act* tahun 1913 dan *Natives (Urban Areas Consolidation) Act* tahun 1945 yang melarang orang kulit hitam memiliki atau membeli tanah di daerah perkotaan.

Pada tahun 1953 dikeluarkan *Native Labour (Settlement of Disputes) Act* yang menetapkan Native Labour Officer sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian sengketa-sengketa industri yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam, lagi pula melarang pemogokan kulit hitam. *Native Building Workers Act* tahun 1951 dan *Industrial Conciliation Act* tahun 1956 menetapkan reservasi pekerjaan ahli bagi orang-orang kulit putih.

Segregasi pendidikan dilaksanakan dengan *Bantu Education Act* tahun 1953, yang mengakhiri pendidikan bersama, menempatkan pendidikan rakyat kulit hitam di bawah kekuasaan Pemerintah Afrika Selatan, dan menjaga jangan sampai orang-orang kulit hitam menerima pendidikan untuk kedudukan-kedudukan yang tidak diperuntukkan mereka. Pada tahun 1959 menyusul *Separate University Act* yang melaksanakan segregasi pendidikan tinggi.¹

Golongan-golongan rasial lainnya, khususnya rakyat kulit hitam, menolak politik apartheid itu dan menentanginya dengan tegas. Mereka melihatnya sebagai siasat minoritas kulit putih untuk mempertahankan supremasi dan kedudukan istimewanya dan sebagai diskriminasi rasial yang tidak adil. mereka menuntut hak-hak politik mereka dan bagian kekayaan Afrika Selatan yang juga merupakan hasil usaha dan kerja mereka. Dalam perjuangan ini mereka mendapat dukungan dan bantuan dari negara-negara Afrika dan banyak negara lainnya, yang dengan keras mengutuk politik apartheid, dan dengan berbagai cara berusaha menekan rezim kulit putih Afrika Selatan agar menghapusnya dan menghormati hak-hak golongan golongan rasial lainnya.

Di bawah tekanan-tekanan itu, Pemerintah Afrika Selatan mulai menonjolkan segi-segi positif apartheid dengan meningkatkan usaha pembangunan wilayah masing-masing kelompok. Pada tahun 1959 dikeluarkan *Bantu Self Government Act*, yang selain menghapus

1 Tentang pelaksanaan politik apartheid lihat G.M. Carter, *The Policies of Inequality in South Africa since 1948* (London, 1959); J.D. Omer - Cooper, "South Africa, History", *Africa South of the Sahara 1975* (London, 1975), hal. 765—766; dan "Apartheid", *The Economist*, 26 November 1977

Representation of Natives Act tahun 1936, yang memberikan perwakilan terbatas dalam parlemen kepada rakyat kulit hitam juga menetapkan pembagian rakyat kulit hitam itu dalam delapan satuan nasional, yang akan dikembangkan menuju otonomi dan kemerdekaan. Dengan maksud itu dibentuk Kementerian untuk Pemerintahan, Pembangunan dan Pendidikan Bantu, dan ditunjuk seorang Komisaris Jenderal untuk satuan masing-masing, yang akan bertindak sebagai wakil Pemerintah Afrika Selatan dan membantu penguasa-penguasa Bantu dalam pembangunan itu.

Sebagai lanjutannya, pada tahun 1971 dikeluarkan *Bantu Homelands Constitution Act*, yang memberi kuasa kepada Pemerintah Afrika Selatan untuk memberikan otonomi kepada negeri kulit hitam yang telah mempunyai Pemerintah Teritorial seperti yang telah diberikan kepada Transkei (1963). Menurut undang-undang ini negeri masing-masing dapat mempunyai bendera dan lagu kebangsaannya sendiri, tetapi dilarang mempunyai tentara atau organisasi serupa, mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, mendirikan pabrik senjata atau bahan peledak, membuat undang-undang yang mengatur pengangkutan, pos dan telekomunikasi, keuangan dan imigrasi.

Berdasarkan undang-undang itu Bantustan-Bantustan mendapatkan Majelis Legislatif, yaitu Tswanaland April 1971, Ciskei Agustus 1972, Lebowa Oktober 1972, Gazankulu dan Vhavenda Pebruari 1973, Kwazulu bulan berikutnya dan Basotho Quaqua Nopember 1974 (lihat Peta). Majelis-majelis itu kemudian memilih seorang Perdana Menteri dan beberapa orang Menteri yang bersama-sama merupakan Pemerintah Bantustan.¹

Di antara negeri-negeri Bantu yang paling maju perkembangannya ialah Transkei, negeri suku bangsa Xhosa. Pada tahun 1955 Bunga atau Dewan Umum Persatuan Wilayah-wilayah Transkei menerima baik Bantu Authorities Act tahun 1951 dan tahun berikutnya mengubah dirinya menjadi Transkeian Territorial Authority, yang pada 1960 diakui Pemerintah Afrika Selatan sebagai Transkei Territorial Authority berdasarkan Bantu Self—Government Act tersebut. Bulan Januari 1962 diumumkan bahwa suku bangsa Xhosa dari Transkei akan menjadi bangsa Bantu pertama yang siap untuk self-

¹ Lihat "The Bantu Homelands", *Africa South of the Sahara 1975* (London, 1975), hal. 811—813; dan Muriel Horrell, *The African Homelands of South Africa* (Johannesburg, 1973)

AFRIKA SELATAN



Sumber : Peter Janke, "Southern Africa : New Horizons", *Conflict Studies* No. 73, Juli 1976, hal. 11

government, langkah terakhir sebelum kemerdekaan. Konstitusinya diundangkan Parlemen Afrika Selatan bulan Mei 1963 dan bulan Nopember tahun itu juga rakyat memilih 45 orang untuk duduk dalam Majelis Legislatif bersama-sama dengan 64 orang kepala suku, termasuk 4 orang kepala yang penting. Parlemen ini kemudian memilih Chief Kaizer Matanzima sebagai Perdana Menteri dan lima orang Menteri.

Pada bulan Mei 1974 PM Matanzima mengajukan permintaan kepada Pemerintah Afrika Selatan agar memberikan kemerdekaan kepada Transkei dalam waktu lima tahun. Permintaan ini diterima dengan baik dan persiapan-persiapan ditingkatkan. Akhirnya pada 26 Oktober 1976 Transkei mendapatkan kemerdekaan sebagai Bantustan pertama yang mencapai status itu. Secara otomatis sekitar 3.300.000 orang Xhosa kehilangan kewarganegaraan Afrika Selatan dan menjadi warga negara Transkei, biarpun 1.500.000 orang tinggal di luar wilayahnya. Kemerdekaan itu disambut dengan gembira oleh rakyat dan Pemerintah Transkei, tetapi mendapatkan tanggapan negatif dari negara-negara kulit hitam dan kebanyakan negara lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara itu menolak mengakuinya, terutama karena merasa bahwa mengakuinya akan berarti membenarkan politik apartheid Afrika Selatan yang mereka kecam secara terus-menerus. Atas prakarsa sejumlah negara Afrika, Majelis Umum kemudian mengeluarkan suatu resolusi yang menyatakan kemerdekaan itu tidak sah dan sekali lagi mengutuk politik apartheid Afrika Selatan.¹

Namun kemerdekaan Transkei itu menunjukkan, bahwa Afrika Selatan bertekad untuk meneruskan program Bantustannya. Kenyataannya Bantustan Bophuthatswana mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1977. Selain itu pada awal sidang parlemen Afrika Selatan tahun 1977 diumumkan, bahwa Pemerintah akan mempermudah proses untuk mendapatkan otonomi bagi negeri-negeri Bantu yang belum minta kemerdekaan. Dewasa ini sedang digarap suatu rancangan undang-undang yang memberikan kekuasaan dalam negeri penuh kepada Bantustan-Bantustan. Afrika Selatan hanya akan menangani urusan-urusan internasional bagi Bantustan yang belum merdeka.²

1 Lihat R. Schrire, "The Emancipation of Transkei", *The World Today*, 33 (1977), hal. 34—38

2 Lihat Cas de Villiers, "South Africa — A Changing Society", *Focus*, Pebruari 1977, hal. 20

PERLAWANAN TERHADAP POLITIK APARTHEID

Diskriminasi rasial di Afrika Selatan secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang, setelah Partai Nasional berkuasa, tetapi telah ada sebelumnya. Bahkan harus dikatakan bahwa diskriminasi rasial itu adalah inheren dalam setiap pemerintahan kolonial. Di mana pun kaum penjajah merasa dirinya lebih unggul dari rakyat jajahannya dan memperlakukan mereka sesuai dengan anggapan itu. Hal itu juga berlaku di Afrika Selatan di mana pendatang-pendatang kulit putih berhasil menundukkan dan menguasai rakyat pribumi, dan secara berangsur-angsur merampas atau mengurangi hak-haknya.

Rakyat kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa secara kodrat orang kulit putih memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin, dan untuk menyatakan penolakan itu antara lain ke luar dari gereja-gereja yang dikuasai golongan kulit putih untuk membangun gereja-gereja mereka yang merdeka. Sejalan dengan gerakan itu, orang-orang kulit hitam yang menerima pendidikan barat mulai mengambil langkah-langkah untuk membentuk gerakan-gerakan politik. Pada tahun 1880—an mereka mendirikan *Cape Native Voters Association*. Demikianpun golongan berwarna pada tahun 1902 mendirikan *African Peoples Organization (APO)*.

Ketika rancangan konstitusi Uni Afrika Selatan disusun, rakyat bukan kulit hitam melihat ketentuan-ketentuannya mengenai hak suara sebagai ancaman bagi hak-hak politik mereka. Sehubungan dengan itu *South African Native National Conference*, organisasi politik rakyat Afrika yang pertama, dan APO mengirimkan delegasi ke London untuk mengajukan protes, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1910 rancangan ini disahkan dan Afrika Selatan mulai kehidupannya sebagai negara kesatuan (Uni Afrika Selatan) di mana minoritas kulit putih mendapatkan monopoli atas kekuasaan politik.

Sebagai reaksi lahirlah pada 1912 *South African National Congress (SANC)*, yang kemudian mengubah namanya menjadi *African National Congress (ANC)*, sebagai suatu organisasi politik. Mula-mula sasarannya terbatas pada usaha agar golongan elit Afrika diterima secara sosial dan politik dalam masyarakat yang dikuasai kulit putih. Mereka berusaha mencapai sasarannya itu lewat jalan konstitusionil, tetapi setahun kemudian mengubah perjuangan mereka,

ketika Pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan *National Land Act*, yang antara lain melarang orang kulit hitam membeli tanah atau hidup di wilayah kulit putih sebagai penyewa atau penggarap dengan bagi hasil. Berdasarkan undang-undang itu rakyat kulit hitam diusir dari wilayah kulit putih secara massal. ANC mengajukan protes tetapi sia-sia.

Pada tahun 1919—1920 ANC melancarkan suatu kampanye lain untuk menentang peraturan-peraturan yang mewajibkan rakyat kulit hitam. membawa pas, yang bukan hanya merupakan tanda kenal dan ijin tinggal tetapi juga alat untuk menguasai migrasi penduduk kulit hitam. ANC mensponsori suatu demonstrasi membakar pas yang dibenci itu sebagai protes, tetapi Pemerintah mengambil tindakan-tindakan tegas yang mengakibatkan kemunduran ANC. Untuk sementara peranannya diambil alih oleh *Industrial and Commercial Union (ICU)* yang didirikan pada 1919, tetapi kemudian ANC menjadi giat lagi.

Dengan meningkatnya diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih meningkat pula oposisi nasionalisme Afrika. ANC memperluas keanggotaannya dan berkembang menjadi suatu organisasi massa, dan pada tahun 1940—an membentuk suatu sayap muda yang lebih radikal dan akhirnya berhasil menguasainya. Pada tahun 1952 orang-orang kulit hitam, berwarna dan India serta sejumlah orang kulit putih melancarkan suatu perlawanan pasif. Dengan sengaja mereka melanggar undang-undang apartheid di muka umum dan membiarkan dirinya ditangkap. Pemerintah menangkap sekitar 8.000 orang demonstran dan di Port Elisabeth berkobar kerusuhan-kerusuhan. Untuk menghadapinya Pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat.

Pada tahun 1955 kelompok-kelompok rasial yang menentang apartheid, termasuk ANC, SAIC, Coloured Peoples Political Organization dan White Congress of Democrats mengadakan pertemuan di Kliptown dekat Johannesburg dan menyusun suatu *Freedom Charter*,¹ yang menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis dan non-rasial. Bulan Desember 1956 Pemerintah menangkap 156 orang pemimpin gerakan itu atas tuduhan berkomplot untuk menggulingkan Pemerintah. Proses itu berlarut-larut dan baru pada tahun 1961 berakhir dengan pembebasan para terdakwa. Sementara itu ANC kehilangan pemimpin-pemimpinnya dan pada 1958 sejumlah anggotanya memisahkan diri dan mendirikan *Pan Africanist*

Congress (PAC) di bawah pimpinan Robert Sobukwe, karena merasa bahwa kerjasama dengan kelompok-kelompok rasial lain melemahkan perjuangan. Akan tetapi politiknya tidak banyak berbeda dengan politik ANC.

Sebagai protes terhadap *Bantu Self-Government Act* yang dikeluarkan dalam rangka program Bantustan, pada 1960 dilancarkan suatu perlawanan di Pondoland Timur yang meluas ke seluruh Pondoland. Dengan membakar rumah-rumah kolaborator dengan Pemerintah dan memboikot pedagang-pedagang kulit putih yang menyiarkan informasi tentang gerakan mereka, mereka berhasil menguasai sebagian besar Pondoland. Pemerintah mendatangkan pasukan-pasukan dan mengumumkan keadaan darurat, dan secara demikian berhasil mematahkan pemberontakan itu.

Bulan Maret tahun 1960 itu juga PAC melancarkan kampanye anti pas, dan untuk mengatasinya polisi melepaskan tembakan-tembakan ke arah para demonstran yang berkumpul di sekitar pos polisi di Sharpeville. Tujuh puluh tujuh orang tewas sebagai korban. Sebagai protes diadakan demonstrasi-demonstrasi baik di Afrika Selatan maupun di luar negeri. Pemerintah menanggapi dengan menangkap Sobukwe dan melarang ANC maupun PAC. Dengan demikian jalan legal tertutup.¹

Pembantaian di Sharpeville dan larangan terhadap organisasi-organisasi politik di kalangan rakyat kulit hitam itu merupakan titik balik dalam sejarah pembebasan Afrika Selatan. Kejadian-kejadian itu meyakinkan pemimpin-pemimpin kulit hitam dan pengikut-pengikut mereka, bahwa sasaran-sasaran perjuangan mereka tidak dapat dicapai dengan cara-cara damai tetapi hanya lewat jalan kekerasan. Dengan keyakinan itu pada tahun 1961 dan 1962 mereka mendirikan dua organisasi rahasia, yaitu Umkhonto we Sizwe dan Poso, untuk mencapai perubahan-perubahan politik lewat sabotase terhadap milik kulit putih.

Dengan demikian konflik antar ras mengarah pada gerakan kekerasan yang akan terus meningkat kecuali kalau sementara itu terjadi perubahan radikal dalam sistem Afrika Selatan. Sejak itu banyak orang muda meninggalkan tanah air untuk mendapatkan latihan gerilya dan subversi di luar negeri. Kemudian mereka berusaha kembali

¹ Tentang perlawanan rakyat Negro terhadap politik apartheid lihat James Barber, *South Africa's Foreign Policy 1945—1970* (London, 1973), hal. 120—141; lihat juga J.D. Omer-Cooper, *loc. cit.*, hal. 788—792.

ke Afrika Selatan untuk menyiapkan gerilya dan pemberontakan, tetapi pemerintah mengadakan pengawasan yang sangat ketat. Dewasa ini mereka belum dapat berbuat banyak, tetapi mereka telah bertekad untuk melakukan infiltrasi dan sabotase serta subversi.

Di Afrika Selatan itu sendiri tekanan-tekanan semakin meningkat dan pada suatu ketika kiranya akan dapat mengobarkan suatu pembangkangan dan pemberontakan massal. Kemungkinan ini telah menimbulkan kekuatiran di kalangan kulit putih, dan kejadian-kejadian kemudian menunjukkan bahwa kekuatiran itu beralasan. Pada tahun 1972 muncul suatu gerakan di antara mahasiswa kulit hitam, berwarna dan India, yang dilancarkan oleh Organisasi Mahasiswa Afrika Selatan (SASO) dan mengobarkan bentrokan-bentrokan berdarah dengan pasukan-pasukan keamanan. Sebagai reaksi terhadap kejadian-kejadian itu, dilancarkan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di universitas-universitas yang berbahasa Inggris biarpun ditindak dengan keras oleh polisi. Hal ini mengungkapkan adanya keresahan batin, khususnya di kalangan kaum muda kulit putih.

Kejadian-kejadian itu juga memberikan keberanian kepada pemimpin-pemimpin Bantustan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Pemerintah Afrika Selatan. Mereka bepergian ke luar negeri untuk mencari dukungan bagi perjuangan mereka. Di bawah pimpinan Chief Buthelezi dari Kwazulu, mereka tidak hanya menuntut wilayah yang lebih luas dan percepatan proses menuju kemerdekaan, melainkan juga penghapusan diskriminasi sosial dan ekonomi.¹ Dengan demikian negeri-negeri Bantu itu bukan menjadi penyaluran aspirasi-aspirasi politik yang aman dan secara demikian menyelamatkan stratifikasi sosial yang didasarkan atas ras, melainkan bahkan menjadi pusat-pusat tekanan atas Pemerintah Afrika Selatan agar mengadakan suatu transformasi radikal dalam sistem sosial dan politiknya.

Dalam keadaan itu Pemerintah menjadi tidak menentu. Di satu pihak dia memberikan janji-janji akan kemerdekaan penuh kepada negeri-negeri Bantu dalam satu dasawarsa. Di lain pihak dia memperingatkan pemimpin-pemimpin Bantu agar membatasi perjalanan luar negeri dan menghentikan kecaman-kecaman mereka terhadap masyarakat Afrika Selatan. Protes-protes mahasiswa ditindak dengan

1 Lihat J.D. Omer—Cooper, *loc. cit.*, hal. 791

tegas, Politik "outward looking" Afrika Selatan dan seruan-seruan kepada negara-negara Afrika untuk mengadakan dialog mengalami kemunduran-kemunduran, dan hubungan Afrika Selatan dengan negara-negara tetangganya menjadi dingin. Pada waktu yang sama anggaran pertahanan ditingkatkan secara tajam.¹

Pada tahun 1973 kaum buruh kulit hitam mengadakan pemogokan untuk menuntut perbaikan nasib dan upah yang lebih tinggi. Mengingat luasnya pemogokan itu dan tekad kaum buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka, Pemerintah Afrika Selatan memberikan konsesi-konsesi, terutama pula karena upah-upah memang terlalu rendah. Upah minimal dinaikkan 32—54% dengan kemungkinan untuk menyesuaikan lagi apabila biaya hidup meningkat. Lebih penting lagi, hak mogok diakui, biarpun buruh kulit hitam belum boleh berserikat untuk memperjuangkan hak-hak mereka seperti buruh kulit putih. Juga diakui perlunya meningkatkan kesempatan latihan bagi buruh kulit hitam dan berwarna agar mereka dapat maju dan perekonomian dapat memanfaatkan tenaga kerja secara yang lebih efisien. Semua itu berarti suatu penyimpangan dari dasar politik apartheid.

Pergolakan buruh itu juga telah mendorong Buthelezi untuk menggunakan kedudukannya guna menuntut perubahan sosial dan ekonomi di seluruh Afrika Selatan. Dia menyatakan mendukung para pemogok dan menuntut hak untuk berunding dengan Pemerintah sebagai juru bicara mereka. Biarpun ditolak, tindakannya itu meningkatkan reputasinya baik di dalam maupun di luar negeri. Menjelang akhir tahun 1973 itu pemimpin-pemimpin Bantustan mengadakan pertemuan dan membicarakan kemungkinan pembentukan federasi negeri-negeri Bantu serta mengutuk diskriminasi rasial di Afrika Selatan. Bulan Juli 1974 Dewan Perwakilan Rakyat Berwarna yang dibentuk tahun 1969 sebagai parlemen terpisah bagi rakyat berwarna, membubarkan diri dan menuntut perwakilan bagi semua ras dalam parlemen Afrika Selatan.

Sebagai hasil pertemuan tersebut, pemimpin-pemimpin Bantustan mencapai sepakat kata untuk membentuk suatu federasi setelah mendapatkan kemerdekaan dan minta kepada pemerintah Afrika Selatan agar diberi tanah yang lebih luas, tetapi permintaan ini ditolak. Pada

¹ Lihat "White Africa at Bay", *Newsweek*, 7 Juni 1976; dan Ruth First, "South Africa and Black Africa", *Africa Guide 1978* (Saffron Walden, 1977), hal. 63—68

tahun 1974 mereka mengadakan pertemuan dengan PM Vorster untuk pertama kalinya. Pembicaraan-pembicaraan adalah terus terang, tetapi PM Vorster tetap pada pendiriannya untuk menolak gagasan federasi maupun permintaan akan tambahan wilayah bagi negeri Bantu masing-masing.

Kejadian-kejadian tahun 1973 dan 1974 itu menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Bantustan menjadi semakin sadar akan kekuatan politik mereka dan bahwa perlawanan mereka terhadap diskriminasi rasial maupun program Bantustan semakin meningkat. Kekecualian adalah Matanzima dari Transkei, yang bulan Mei 1974 mengumumkan maksudnya untuk minta kemerdekaan Transkei dalam waktu lima tahun sesuai dengan politik Pemerintah Afrika Selatan. Bulan Nopember 1974 delapan pemimpin Bantustan menandakan bahwa negeri-negeri Bantu itu harus menjadi bagian integral Afrika Selatan dan mendapat bagian yang wajar dari kekayaannya serta persamaan hak dalam suatu federasi. Hal ini bertolak belakang dengan politik Pemerintah Afrika Selatan untuk membagi rakyatnya dalam kelompok-kelompok dan untuk mendorong kelompok masing-masing agar minta kemerdekaan sebagai kesatuan terpisah. Oleh sebab itu PM Vorster menolak usul mereka agar diselenggarakan suatu konvensi multirasial guna menyusun suatu konstitusi baru, dan menyatakan tidak akan mengikutsertakan rakyat kulit hitam dalam kekuasaan negara.¹

Tekanan-tekanan itu semakin meningkat sejak Juni 1976, ketika sekitar 10.000 orang pelajar melancarkan suatu demonstrasi protes di Soweto yang berkembang menjadi huru-hara di kota-kota kulit hitam dekat Johannesburg dan Pretoria yang minta korban ratusan orang tewas dan lebih dari seribu orang luka-luka. Tekanan-tekanan itu mencapai puncak baru pada bagian kedua bulan September 1977 ketika Steve Biko, pemimpin Black Consciousness Movement yang menyalangi protes-protes tersebut, meninggal dalam tahanan. Di banyak tempat diadakan pertemuan-pertemuan protes dan terjadi bentrokan-bentrokan dengan polisi.²

¹ Lihat *Indonesian Observer*, 11 Oktober 1976

² Lihat *Antara*, 14 September 1977; dan Black Consciousness Movement", *The Economist*, 24 September 1977

PERLAWANAN NEGARA—NEGARA AFRIKA

Perjuangan melawan politik apartheid Afrika Selatan tidak hanya dilakukan oleh rakyat kulit hitam yang bersangkutan dan pemimpin-pemimpin Bantustan, tetapi juga oleh negara-negara Afrika, OPA dan PBB. Setelah berabad-abad mengalami penindasan oleh negara-negara kolonial, bangsa-bangsa Afrika yang belum lama mendapatkan kemerdekaan itu dengan keras mengutuk kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya, rezim-rezim minoritas kulit putih, serta politik apartheid, dan berjuang untuk melenyapkannya.¹

Dengan berbagai cara negara-negara itu berusaha menekan rezim minoritas kulit putih Afrika Selatan agar mengakhiri politik apartheid-nya dan menghormati hak-hak rakyat kulit hitam. Kecuali Malawi dan beberapa negara kecil yang bergantung padanya, mereka memboikot-nya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan perhubungan. Dan mereka memanfaatkan kedudukan mereka di PBB di mana mereka menguasai sekitar sepertiga suara, untuk mempengaruhi opini dunia dan memperjuangkan resolusi-resolusi yang dapat menekan Afrika Selatan. Berkat perjuangan mereka itu, PBB mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengutuk politik apartheid Afrika Selatan, dan berseru kepadanya agar mengakhirinya. Oleh sebab Pemerintah Afrika Selatan menganggap sepi resolusi-resolusi itu, PBB mengeluarkan resolusi-resolusi lain, yang selain mengulangi kecaman-kecaman itu juga berseru kepada negara-negara agar mengucilkan negara rasialis itu, dan menghentikan penjualan senjata serta perlengkapan militer kepadanya.

Misalnya pada 1 april 1960 Dewan Keamanan berseru kepada Pemerintah Uni Afrika Selatan agar mengambil tindakan-tindakan untuk mewujudkan harmoni rasial atas dasar persamaan, dan melepaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan apartheid dan diskriminasi rasialnya. Pada 7 Agustus 1963 Dewan Keamanan mengulangi seruannya itu sambil berseru kepada negara-negara agar menghentikan penjualan senjata, amunisi dan perlengkapan militer kepada Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan menganggap sepi seruan-seruan itu, pada 4 Desember 1963 Dewan mengutuk sikap acuh tak acuhnya dan mengulangi seruannya kepada negara-negara agar mengenakan em-

1 Mengenai perlawanan negara-negara Afrika kulit hitam terhadap politik apartheid lihat James Barber, *op. cit.*, hal. 143—180; dan Martin Minogue dan Judith Molloy, Ed., *African Aims and Attitudes* (London, 1974), antara lain hal. 258

bargo senjata terhadapnya. Oleh sebab banyak negara juga mengabaikan seruan embargo itu, pada 23 Juli 1970 Dewan Keamanan selain mengulangi oposisinya terhadap politik apartheid Pemerintah Afrika Selatan, dan mengukuhkan resolusi-resolusi sebelumnya, juga mengutuk pelanggaran-pelanggaran embargo senjata dan berseru kepada semua negara agar memperkuat embargo itu dan mematuhiinya dengan saksama.¹

Sehubungan dengan jatuhnya banyak korban, ketika pasukan-pasukan keamanan Afrika selatan melepaskan tembakan-tembakan terhadap orang-orang Afrika yang berdemonstrasi menentang diskriminasi rasial pada 16 Juni 1976 di Soweto seperti tersebut di atas, Dewan Keamanan pada 19 Juni 1976 mengutuk dengan keras Pemerintah Afrika Selatan, mengukuhkan bahwa politik apartheid adalah suatu kejahatan melanggar kata hati dan martabat manusia serta secara serius mengganggu perdamaian dan keamanan internasional, mengakui sahnya perjuangan rakyat Afrika Selatan untuk melenyapkan apartheid dan diskriminasi rasial, dan berseru kepada Pemerintah Afrika Selatan agar menghentikan kekerasan terhadap rakyat Afrika dan mengambil tindakan-tindakan untuk mengakhiri apartheid dan diskriminasi rasial.²

Selain itu negara-negara Afrika menyerang klaim Afrika Selatan untuk terus memerintah Afrika Barat Daya yang sejak 1968 dikenal sebagai Namibia, bekas koloni Jerman yang oleh Liga Bangsa-Bangsa ditempatkan di bawah kekuasaannya sebagai negeri mandat. Berkat perjuangan mereka, bulan Oktober 1966 Sidang Umum PBB menerima suatu resolusi yang menyatakan bahwa Afrika Selatan kehilangan haknya untuk memerintah Afrika Barat Daya karena melanggar kewajibannya untuk "sebaik mungkin memajukan kesejahteraan materiil dan moral rakyat dan kemajuan sosial", dan dengan pertimbangan itu minta kepada Afrika Selatan agar menyerahkan pemerintahan atas negeri itu kepada sebuah dewan yang akan dibentuk PBB dengan maksud itu. Akan tetapi Afrika Selatan menyanggah hak PBB untuk secara sepihak menghapus mandat dan menentang segala usaha untuk melaksanakan resolusi itu.

1 Lihat James Barber, *op. cit.*, hal. 142—159

2 Lihat Peter Janke, "Southern Africa : New Horizons", *Conflict Studies*, Juli 1976, hal. 14—15; dan Roger Murray, "Namibia. Political Developments", *Africa Guide 1978*, hal. 209—212

Dewan Namibia yang dibentuk berdasarkan resolusi itu memberitahukan kepada Sidang Umum PBB dalam laporan pertamanya, bahwa akibat perlawanan Afrika Selatan dia tidak berhasil mengambil alih kekuasaan, dan mengusulkan agar Dewan Keamanan bertindak, akan tetapi usul itu tidak berhasil mendapatkan dukungan berbagai negara besar anggota Dewan. Afrika Selatan menjadi lebih berani dan pada 1969 menganeksir Afrika Barat Daya dan menetapkannya sebagai propinsinya yang kelima. Baik negara-negara Afrika maupun PBB menyatakan tindakan itu tidak sah, tetapi tidak mampu mengambil tindakan yang efektif terhadap Afrika Selatan.¹

SIKAP NEGARA—NEGARA BARAT

Negara-negara Barat, yang menyatakan menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat semua orang, juga tidak setuju dengan diskriminasi rasial dan politik apartheid Afrika Selatan, tetapi mula-mula tidak berbuat sesuatu untuk melenyapkannya selain mendukung resolusi-resolusi anti apartheid PBB, antara lain karena mempunyai banyak kepentingan di Afrika Selatan.² Negeri ini merupakan salah satu sumber utama bahan-bahan mentah yang dibutuhkan industri dan kehidupan di negara-negara tersebut. Sehubungan dengan itu perusahaan-perusahaan Barat menanamkan banyak modal (lebih dari US\$ 8.000 juta tahun 1976) bagi eksploitasinya dan pembangunan industri di negeri itu. Dalam proses itu perdagangan antara mereka semakin meningkat dan mencapai lebih dari US\$ 8.000 juta tahun 1976. Selain itu berkat letak geografisnya Afrika Selatan mempunyai arti yang penting bagi strategi global negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Afrika Selatan menguasai jalur-jalur pelayaran Tanjung Harapan yang merupakan urat nadi mereka. Sebagian besar suplai minyak dan bahan-bahan mentah yang vital diangkut lewat jalur-jalur itu.³

1 Lihat "United Nations Security Council Resolutions on Apartheid", *Notes and Documents*, Juni 1976, publikasi Centre against Apartheid PBB

2 Tentang sikap semula negara-negara Barat terhadap Afrika Selatan lihat James Barber, *op. cit.*, hal. 285—301

3 Lihat Walter F. Hahn dan Alvin J. Cottrell, *Soviet Shadow over Africa* (Washington, 1976); dan W. van Rensburg dan Demond Pretorius, *South Africa's Strategic Minerals : Pieces on a Continental Chessboard* (Arcadia, 1977)

Akan tetapi dengan meningkatnya tekanan-tekanan internasional atas politik apartheid, negara-negara itu juga berusaha meyakinkan Afrika Selatan agar mengadakan perubahan-perubahan yang mendalam menuju penghapusan diskriminasi rasial serta politik apartheid dan pelaksanaan persamaan kesempatan serta hak bagi seluruh rakyatnya. Mereka menginginkan agar perubahan-perubahan itu terjadi secara damai dan berusaha mencegah meningkatnya konflik rasial itu menjadi suatu peperangan rasial luas yang mudah melibatkan negara-negara lain. Mereka menyadari bahwa perkembangan serupa ini akan memberikan peluang kepada Uni Soviet dan negara-negara sekutunya untuk turun tangan dan memperluas pengaruhnya di Afrika bagian selatan. Negara-negara Afrika yang telah bertekad untuk melenyapkan politik apartheid juga semakin menekan mereka agar mematuhi resolusi-resolusi PBB yang dimaksud untuk mengucilkan Afrika Selatan dan memaksanya mengadakan perubahan-perubahan yang mendalam dalam politik rasialnya. Negara-negara itu minta kepada mereka agar pernyataan dukungan mereka bagi persamaan martabat dan hak semua orang dituangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat memperlemah kekuatan-kekuatan rasialisme dan kolonialisme di Afrika bagian selatan agar rakyat kawasan itu dapat lebih cepat memperoleh kemenangan tanpa pertumpahan darah.¹

KEADAAN SEKARANG

Di bawah tekanan-tekanan baik dalam maupun luar negeri itu, Pemerintah Afrika Selatan berusaha menghapus tanda-tanda apartheid yang paling menyolok seperti segregasi hotel, restoran, park, olahraga dan sebagainya, tetapi masih tetap mempertahankan sistem apartheid-nya sendiri. Program Bantustan diteruskan dan permintaan akan tanah yang lebih luas tetap ditolak. Sebaliknya dia berusaha menampung aspirasi-aspirasi politik golongan berwarna dan India dengan menyusun suatu rancangan konstitusi baru yang menetapkan adanya tiga parlemen masing-masing dengan 185, 95, 46 anggota, 1 kabinet baru 13 orang menteri termasuk 3 orang PM, 5 orang kulit putih, 3 orang berwarna dan 2 orang India, 1 badan pemilihan Presiden 88 orang, yaitu 50 orang kulit putih, 25 orang berwarna dan 13 orang India, yang akan dipilih parlemen masing-masing golongan. Presiden akan dipilih

¹ Lihat *The Economist*, 16 Juli 1977; lihat juga pernyataan politik Menlu Amerika Serikat Henry Kissinger di Lusaka pada 28 April 1976

untuk masa jabatan lima tahun sebagai Kepala Negara dan Kepala Eksekutif, dan dalam menjalankan tugasnya akan didampingi suatu badan penasihat 35 orang, yaitu 20 orang kulit putih, 10 orang berwarna dan 5 orang India.¹

Sebaliknya kaum nasionalis kulit hitam tetap menuntut penghapusan diskriminasi dan segregasi rasial, lagi pula bagian yang wajar dalam kekayaan dan kekuasaan di Afrika Selatan. Mereka menolak program Bantustan dalam bentuknya sekarang ini sebagai siasat kulit putih untuk memecah belah rakyat kulit hitam dan mempertahankan supremasi serta kedudukan istimewa kulit putih. Mereka menuntut agar diadakan perubahan-perubahan, khususnya tambahan tanah bagi negeri-negeri Bantu dan pembentukan suatu federasi antara negeri-negeri Bantu itu dan negara kulit putih dengan persamaan hak. Sehubungan dengan itu mereka menuntut agar diadakan suatu konvensi multirasial untuk menyusun suatu konstitusi baru yang akan menuangkan gagasan-gagasan federasi itu.² Pada Konferensi Internasional anti apartheid di Lagos tersebut Sekjen PBB Kurt Waldheim rupanya mendukung gagasan itu. Antara lain dia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan apartheid Afrika Selatan ialah melalui suatu konvensi nasional yang terdiri atas wakil-wakil sah negeri itu. Konvensi akan berunding atas dasar persamaan semua peserta untuk menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas-asas keadilan dan perikemanusiaan.³

PROSPEK PENYELESAIAN

Kita belum tahu bagaimana masalah rasial di Afrika Selatan itu akan diselesaikan. Pemerintah PM Vorster sejauh ini berkeras untuk menolak tuntutan-tuntutan mayoritas kulit hitam dan menetaskan program Bantustan-nya yang didasarkan atas segregasi dan diskriminasi rasial terhadap rakyat kulit hitam. Sebaliknya pemimpin-pemimpin kulit hitam dan pengikut-pengikut mereka, khususnya kaum muda, menjadi semakin berani untuk menuntut penghapusan sistem

1 Lihat *Antara*, 23 September 1977; dan "Constitutional Changes Proposed", *The Economist*, 24 September 1977

2 Pada pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Bantustan pada 8 Oktober 1976 PM Vorster menolak usul mereka untuk mengadakan suatu konferensi multirasial guna menyusun suatu konstitusi baru. Lihat *Indonesian Observer*, 11 Oktober 1976, dan *The Economist*, 24 September 1977

3 Lihat *Sinar Harapan* 30 Agustus 1977

apartheid dan pembentukan suatu masyarakat multirasial atas dasar persamaan semua ras. Demikianpun tekanan-tekanan luar negeri semakin meningkat, tidak hanya dari negara-negara Afrika melainkan juga dari pihak PBB dan negara-negara barat, yang menginginkan suatu penyelesaian damai karena yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan strategi maupun ekonomi mereka. Amerika Serikat bahkan telah berseru agar masalah rasial itu diselesaikan atas dasar "satu orang satu suara" sesuai dengan konsep pemerintahan mayoritas. Dan terdapat tanda-tanda bahwa negara itu tidak akan segan menggunakan kekuatannya untuk menekan Afrika Selatan ke arah penyelesaian itu.

Oleh sebab itu dapat diperkirakan, bahwa di Afrika Selatan akan terjadi perubahan-perubahan yang mencerminkan sikap-sikap baru yang berorientasi pada pengakuan martabat dan persamaan semua orang dan pada rasialisasi aspirasi-aspirasi berbagai kelompok rasialnya. Pemerintah Vorster mungkin akan mengubah program Bantustan-nya sesuai dengan tuntutan-tuntutan kulit hitam tersebut. Dengan perkataan lain, dia mungkin akan bersedia memberikan wilayah yang lebih luas kepada negeri Bantu masing-masing dan membentuk suatu federasi antara negara kulit putih dan negara-negara kulit hitam atas dasar persamaan. Dalam parlemen maupun kabinet federal akan duduk wakil-wakil dari kelompok-kelompok rasial tersebut secara proporsional. Tetapi masing-masing kelompok juga akan mempunyai parlemen dan kabinetnya sendiri. Secara demikian mereka akan dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan masing-masing, tetapi juga akan ikut dalam kekuasaan federal dan mendapatkan bagian dalam kekayaan dan pendapatan Afrika Selatan yang mereka hasilkan bersama.

Eskalasi konflik menjadi perang rasial luas yang melibatkan negara-negara lain tetap mungkin, tetapi kemungkinan ini kiranya tidak besar, khususnya karena negara-negara barat berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya dan mereka mempunyai kedudukan kuat terhadap Afrika Selatan. Negara-negara ini menyadari bahwa hanya suatu penyelesaian damai dapat menjamin keamanan kepentingan-kepentingan mereka.

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

I. SERI BUKU

1. Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development, Ali MOERTOPO a Rp. 1.250,—
2. Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Ali MOERTOPO
3. Dua Pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Daeed JOESOEF a Rp. 1.000,—
4. The World of Strategy and the Foreign Policy of Nation
5. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO a Rp. 500,—
6. Persoalan Masa Kini : Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.500,—
7. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO a Rp. 1.000,—
8. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 500,—
9. Indonesia dan Dunia Internasional 1974 a Rp. 1.750,—
10. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.000,—
11. Regionalism in Southeast Asia a Rp. 1.250,—
12. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO a Rp. 400,—
13. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional a Rp. 2.000,—
14. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks) a Rp. 1.200,—
15. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa) a Rp. 300,—
16. Self Reliance and National Resilience a Rp. 1.250,—
17. Second Indonesian — Japanese Conference a Rp. 1.500,—
18. Indonesia dan Dunia Internasional 1975 a Rp. 4.000,—
19. Indonesia dan Dunia Internasional 1976 a Rp. 5.000,—
20. Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia a Rp. 2.000,—
21. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia a Rp. 1.500,—
22. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN AND Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 3.000,—
23. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
24. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
25. Southeast Asia and the World of Tomorrow a Rp. 3.000,—
26. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO a Rp. 750,—
27. Indonesia dan Dunia Internasional 1977 a Rp. 5.000,—

II. TERBITAN BERKALA

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. RINGKASAN PERISTIWA
(terbit setiap 2 minggu) | @ Rp 350,— Rp 10.000,— per tahun |
| 2. ANALISA
(terbit setiap bulan) | @ Rp 700,— Rp 8.000,— per tahun |
| 3. MONOGRAF | @ Rp 700,— |
| 4. THE INDONESIAN QUARTERLY
(terbit setiap 3 bulan) | @ Rp 800,— Rp 3.200,— per tahun |

Pesanan dengan pembayaran di muka. Untuk Seri Buku, pesanan luar kota ditambah ongkos kirim \pm 15%; dialamatkan pada : CSIS, Biro Publikasi, Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat.

DAFTAR ISI ANALISA

TAHUN II, 1973

1. AUSTRALIA DAN PAPUA NEW GUINEA

- M. Hadi SOESASTRO, *Arti Politik Luar Negeri dan Perlawanan Australia bagi Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Beberapa Catatan mengenai Struktur Perdagangan Australia*
- M. Hadi SOESTRO, *Papua New Guinea : Satu Kasus sekitar Masalah Suatu Kemerdekaan*
- Wiwid WIDYATMIKO, *Batas Wilayah Dasar Laut antara Republik Indonesia dengan Australia*
- *Dokumen*

2. PERDAMAIAN VIETNAM DAN INDOCINA — TANTANGAN BAGI ASIA TENGGARA

- Daoed JOESOEF, *Perdamaian adalah Lanjutan dari Peperangan Dengan Peralatan Lain*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *Prospek Penyelesaian Masalah Vietnam*
- M. Hadi SOESASTRO, *Perdamaian di Indocina dan Asia Tenggara : Keseimbangan Kekuatan di Setiap Tingkatan?*
- *Dokumen*

3. SDR (SPECIAL DRAWING RIGHTS) DAN MONETER INTERNASIONAL

- J. Soedradjad DJIWANDONO, *Ke arah Reformasi Sistem Moneter Dunia*
- Daoed JOESOEF, *SDR Dalam Pembahasan*
- CSIS, *SDR : Hubungan antara Likwiditas Internasional dan Pembiayaan Pembangunan*
- J. PANGLAYKIM, *SDR dan Hubungannya dengan Negara-negara Yang Sedang Berkembang*
- *Dokumen*

4. SINGAPURA

- M. Hadi SOESASTRO, *Singapura di Asia Tenggara : Masalah Identitas dan Hari Depan*

5. BATAS—BATAS PERTUMBUHAN

- M. Hadi SOESASTRO, *Masalah Batas Pertumbuhan : Satu Tinjauan Previsionil terhadap Krisis Energi dan Krisis Bahan Pangan*
- J. PANGLAYKIM, *Masalah "Lingkungan Hidup" dalam Pembahasan*

6. TINJAUAN MENGENAI BIRMA

- O. Sutomo ROESNADI, *Birma dan Asia Tenggara*
- M. Hadi SOESASTRO, *Politik Beras dan Sosialisme Birma*
- *Dokumen*

7. JEPANG DAN ASIA TENGGARA

- Shinichi ICHIMURA, *Taruhan Jepang di Asia*
- Robert W. BARNETT, *Komentar terhadap Taruhan Jepang di Asia*
- J. PANGLAYKIM, *Beberapa Aspek Pengalaman Jepang di bidang Perbankan*
- M. Hadi SOESASTRO, *Hubungan Jepang dan Asia Tenggara : Masalah Regional atau Global?*
- *Dokumen*

8. DETENTE

- Daoed JOESOEF, *Sense dan Nonsense dari Detente*

9. TINJAUAN MENGENAI KOREA

- O. Sutomo ROESNADI, *Hubungan Korea dengan Cina dan Jepang*
- Clara JOEWONO, *Sekitar Reunifikasi Korea*
- *Dokumen*

10. MINYAK DAN PERANG DI TIMUR TENGAH

- Ali MOERTOPO, *Sumber-sumber Energi dalam rangka Keamanan dan Pengamanan*
- M. Hadi SOESASTRO, *Kekuatan dan Kelemahan Minyak sebagai Senjata Politik*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perang Arab—Israel Keempat, Masalah dan Prospek Penyelesaiannya*
- *Dokumen*

11. MODAL ASING DAN DOMINASI EKONOMI

- Kwik Kian Gie, *Modal Asing dan Dominasi Ekonomi*

12. PERKEMBANGAN DUNIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKSANAAN—KEBIJAKSANAAN TAHUN 1974

- Daed JOESOEF, *Ekonomi — Pengetahuan dan Ekonomi — Dunia*
- M. Hadi SOESASTRO, *Mengapa Jepang?*
- J. PANGLAYKIM, *Sumber-sumber Jangka Menengah dan Panjang sedang Menipis? New York suatu Alternatif Baru?*
- M. Hadi SOESASTRO, *Refleksi mengenai Dunia dalam Tahun 1974*
- M. Hadi SOESASTRO, *Aspek Strategis dari Masalah Penanaman Modal Asing*
- J. PANGLAYKIM, *Struktur Domestik dalam Interdependensi Ekonomi Dunia*

TAHUN III, 1974

1. PERUSAHAAN—PERUSAHAAN MULTINASIONAL

- J. PANGLAYKIM, *Perusahaan-perusahaan Multinasional*
- J. PANGLAYKIM, *Pengantar kepada Bahan-bahan Pustaka mengenai Perusahaan-perusahaan Multinasional*

2. PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR KEKUATAN I

- E.J. Sutarto HARDJOSUSONO, *Mencari Alternatif Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Indonesia*
- Daed JOESOEF, *Persoalan Approach dalam Mempolakan Pendidikan dalam Rangka Pembangunan Nasional*
- F. Hendarto POESPOSOETJIPTO, *Beberapa Aspek Ekonomi dalam Penyusunan Planning Pendidikan*

3. PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR KEKUATAN II

- M. Hadi SOESASTRO, *Pendidikan dan Transformasi*
- Ny. Hariati SCHUTZENBERGER, *Memperjuangkan Pendidikan Pertukangan*
- Ny. Indah Herawati SIDHARTA, *Pemikiran tentang Dasar Pendidikan Guru*
- R. HARYOSEPUTRO, *Masalah Modernisasi Masyarakat Tradisionil*

4. MASALAH ENERGI DUNIA

- Ali MOERTOPO, *Politik dan Bahan-bahan Mentah : Tantangan Dunia Masa Kini dan Konsekwensinya bagi Kebijakan-kebijaksanaan Domestik*

5. MODAL SEBAGAI FAKTOR KEKUATAN

- Daed JOESOEF, *Modal sebagai Faktor Produksi dan Kekuatan*
- Pande R. SILALAH, *Pertimbangan Modal Swasta Nasional di Indonesia*

6. PERKEMBANGAN POLITIK KOLONI—KOLONI PORTUGIS

- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan Politik Koloni-koloni Portugis*
- *Dokumen*

7. UNI SOVIET

- Kirdi DIPOYUDO, *Strategi Uni Soviet di Timur Tengah*
- M. Hadi SOESASTRO, *Minyak dan Diplomasi Uni Soviet*
- *Dokumen*

8. ASPEK STRATEGIS DAN INTERNASIONAL DARI PERSOALAN ENERGI

- Ali MOERTOPO, *Segi Internasional Strategis dari Persoalan Energi*
- M. Hadi SOESASTRO, *Indonesia dan Petabumi Politik Energi Dunia Selama 30 Tahun Mendatang*
- H. HENRIARSO, *Peranan Jepang dalam Dunia Perminyakan Indonesia*

9. HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM DUNIA YANG BERUBAH

- Daoed JOESOEF, *Kemerdekaan Nasional dan Saling Ketergantungan Ekonomi Bangsa-bangsa*
- Bing P. LUKMAN, *Interdependensi dalam Rangka Pembangunan*
- M. Hadi SOESASTRO, *Transfer Teknologi dalam Hubungan Internasional*

10. KEBUDAYAAN SEBAGAI FAKTOR KEKUATAN

- A.M.W. PRANARKA, *Pembangunan Nasional adalah Proses Akulturasi*
- Daoed JOESOEF, *Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *Mengejar Kelambatan Budaya*
- A.M.W. PRANARKA, *Akibat-akibat dari Terlambatnya Proses Pembaharuan Pendidikan di Indonesia*
- Onny S. PRIYONO, *Kelakuan Yang Menyimpang Tidak Selalu Bersifat negatif*

11. AFRIKA SELATAN SAHARA

- O. Abdul RACHMAN, *Afrika Bergolak Terus*
- Kirdi DIPOYUDO, *Guinea Bissau Merdeka*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pergolakan di Ethiopia*

12. BEBERAPA PERKEMBANGAN DI ASIA SELATAN

- O. Sutomo ROESNADI, *Hubungan Sikkim dengan India*
- Kirdi DIPOYUDO, *Persoalan Sekitar Diego Garcia*
- O. Abdul RACHMAN, *Aspek-aspek Security dalam Hubungan Internasional di Samudra Indonesia*

TAHUN IV, 1975

1. TINJAUAN EKONOMI TAHUN 1974

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Tinjauan Ekonomi Tahun 1974*
- Onny S. PRIYONO, *Menyambut Tahun Wanita Internasional 1975 : Beberapa Catatan mengenai Hak dan Kedudukan Wanita Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Masalah Palestina*
- *Dokumen*

2. BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA SWASTA NASIONAL

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Beberapa Masalah dalam Pengembangan Usaha Swasta Nasional*
- Pande R. SILALAH, *Aspek-aspek Non-Ekonomi dalam Membantu Pengusaha Pribumi*
- Kirdi DIPOYUDO, *Masalah Siprus dan Prospek Penyelesaiannya*
- Kirdi DIPOYUDO, *Masalah Eritrea*

3. ENERGI DAN SELAT MALAKA

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Aspek Ekonomis dari Persoalan Energi*
- Kirdi DIPOYUDO, *Persoalan Sekitar Selat Malaka*
- *Dokumen*

4. KAWASAN TIMUR TENGAH

- Kirdi DIPOYUDO, *Timur Tengah suatu Kekuatan Baru*
- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Minyak Bumi Kekuatan Utama Timur Tengah*

5. KEBUDAYAAN REMAJA, KEBUDAYAAN DELINKWEN DAN SITUASI KRIMI— NALITAS

- Onny S. PRIYONO, *Meninjau Kebudayaan Remaja Serta Sub-Kebudayaan Delinkwen*
- Onny S. PRIYONO, *Situasi Kriminalitas di Indonesia*

6. KEMUNGKINAN KENAIKAN HARGA MINYAK BUMI

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Kemungkinan Penaikan Harga Minyak Bumi*

7. TERUSAN SUEZ & BANGSA PALESTINA

- Kirdi DIPOYUDO, *Terusan Suez dan Artinya*
- O. Abdul RACHMAN, *Derap Juang Bangsa Palestina*

8. BERAS & KOPRA

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *Pusat Kopro bagi Petani Kopro*
- R. HARYOSEPUTRO, *Menuju Pemenuhan Kebutuhan Beras Sendiri*

9. SELF — RELIANCE DI BIDANG EKONOMI

- Daeed JOESOEF, *Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi Ekonomi Nasional*
- J. PANGLAYKIM, *MNC dan Diplomasi Kekuatan Ekonomi*
- J. PANGLAYKIM, *Pentingnya Penguasaan Bidang Distribusi Nasional*

10. PENELITIAN PERDAMAIAN & GENERASI MUDA

- D.K. EMMERSON, *Beberapa Kesan tentang Penelitian Pembangunan Masyarakat di Indonesia*
- Pintor SIMANDJUNTAK, *Beberapa Catatan Mengenai Ilmu Perdamaian*
- H. Anton DJAWAMAKU, *Demitologisasi dan Pembinaan Generasi Muda*

11. DAERAH—DAERAH BERGOLAK DI SEKITAR SAMUDERA INDONESIA

- Kirdi DIPOYUDO, *Pergolakan di Libanon*
- O. Abdul RACHMAN, *Fosfat di Sahara Barat*
- O. Abdul RACHMAN, *Bangladesh : Negeri Orang Bengali*
- O. Abdul RACHMAN, *Benteng Putih di Afrika, Detente atau Detensi?*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perebutan Kekuasaan di Angola*

12. MASALAH KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

- Daoed JOESOEF, *Hakikat Pertumbuhan Ekonomi Dunia Serta Akibat Finansial dan Moneterinya*
- J. PANGLAYKIM, *Stabilitas Harga Komoditi*
- N. ARSJAD, *Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia Dewasa Ini*

TAHUN V, 1976

1. EKONOMI DUNIA DAN SISTEM KINGSTON

- N. ARSJAD, *Ciri-ciri Ekonomi Dunia Dasawarsa Tahun-tahun Tujuh puluhan*
- N. ARSJAD, *Kingston System : Sistem Moneter Internasional Baru*

2. ASEAN : PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (I)

- J. PANGLAYKIM, *Kerjasama Ekonomi — Perdagangan ASEAN Beberapa Tanggapan atas Konsep ASEAN Free Trade Area*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *ASEAN Sesudah KTT*

3. ASEAN : PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (II)

- J. PANGLAYKIM, *Wilayah Perdagangan Selektif ASEAN : Suatu Kemungkinan Bentuk kerjasama Ekonomi ASEAN*
- J. PANGLAYKIM, *Suatu Pemikiran Bagaimana Dapat Menilai Iklim Investasi di Negara-negara ASEAN dan Asia Umumnya*
- Daoed JOESOEF, *Renungan Mengenai Masalah Free Trade*

4. EKONOMI DAN MASYARAKAT MANUSIAWI

- Pintor SIMANDJUNTAK, *Strategi Kebutuhan Pokok*
- Tjipto SOEMARTONO, *Peranan Profesi Kedokteran dalam Menunjang Proses Akselerasi Modernisasi*
- Daoed JOESOEF, *Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi Ekonomi Nasional*

5. BUDAYA DAN PENDIDIKAN

- A.M.W. PRANARKA, *Merintis Jalan menuju Tata Dunia Yang Lebih Manusiawi*
- A.M.W. PRANARKA, *Elite En Massa — Suatu Catatan tentang Tulisan Prof. W.F. WERTHEIM*
- S. HARTO, *Kapasitas dan produktivitas Perguruan Tinggi Kita Masih Rendah*
- S. HARTO, *Beberapa Catatan Sekitar Masalah : Kuliah Kerja Nyata*

6. UTARA—SELATAN & TIMUR—BARAT

- N. ARSJAD, *Peranan UNCTAD dan OPEC : Kerjasama atau Konfrontasi?*
- O. Abdul RACHMAN, *Perspektif Sekuriti di Samudra Indonesia*

7. PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

- Soedjono HOEMARDANI, *Peranan Pengawasan dalam Pembangunan*
- Rufinus LAHUR, *Catatan Mengenai "Waktu Pengajuan" Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU—APBN)*

8. NON — ALIGNMENT

- A.R. SUTOPO, *Non-Alignment dan Partisipasi Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Suatu Tinjauan atas Gerakan Non-Blok*

9. NEGARA NON—BLOK DAN MASALAH HABITAT

- N. ARSJAD, *Negara-negara Non-Blok dan Masalah Ekonomi Dunia*
- Onny S. PRIYONO, *Habitat dalam Perspektif Hubungan Manusia*

10. SURIAH DI LIBANON DAN PENYELESAIAN RASIAL

- Kirdi DIPOYUDO, *Intervensi Suriah dalam Perang Saudara di Libanon*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Perdamaian Rasial di Afrika bagian Selatan*

11. MASALAH DANA INTERNASIONAL & NASIONAL

- N. ARSJAD, *Sidang Tahunan IMF — Bank Dunia 1976*
- J. PANGLAYKIM, *Kelambatan Perkembangan Lembaga-lembaga Keuangan Nasional akan Memperbesar Ketergantungan pada Bank-bank Internasional*

12. BEBERAPA TINJAUAN TAHUN 1976

- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Daya Fungsional Aparatur Pelaksana Menjelang Tahun 1977*
- Kirdi DIPOYUDO, *Kompetisi Superpower di Benua Afrika*
- A.M.W. PRANARKA, *Situasi Sosial — Budaya Indonesia 1976*

TAHUN VI, 1977

1. BEBERAPA PROSPEK PERKEMBANGAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan di Afrika Bagian Selatan*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Komunisme di Negara-negara ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan Politik Dunia Arab*
- N. ARSJAD, *Perkembangan Dana Pinjaman Internasional dan Pengaruhnya pada Perekonomian Indonesia*

2. ASIA TENGGARA : PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA

- Ali MOERTOPO, *Perkembangan di Asia Tenggara dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Strategi dengan Titik Berat Khusus pada Hari Depan ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Asia Tenggara dan Prospeknya : Suatu Tinjauan Umum*
- Parlaungan SIBARANI, *Sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly*
- Bing P. LUKMAN, *Renungan Satu Tahun KTT ASEAN Bali*

3 + 4. BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN

- Rufinus LAHUR, *Organisasi Politik "Hasil Pembaharuan dan Penyederhanaan Kehidupan Politik"*
- F.X. SOEDIJANA, *Hukum Ekonomi*
- Ramzy TAJUDIN, *Strategi Akseptabilitas Sosial Organisasi*
- H. Anton DJAWAMAKU, *Agropolis : Pembangunan Desa dan Pengembangan Wilayah di Daerah Pedesaan*
- A. Rahman RANGKUTI, *Pengembangan Padi Gogo dalam Peningkatan Produksi Beras*
- Kirdi DIPOYUDO, *Demokrasi Pancasila*

5. KEPINCANGAN HUBUNGAN UTARA—SELATAN

- J. PANGLAYKIM, *Dengan Persetujuan Pemasaran Yang Serba Diatur, Negara-negara Industri Mau Menang Sendiri*
- J. PANGLAYKIM, *Perspektif Pertemuan Puncak London*
- N. ARSJAD, *Kerjasama Ekonomi Internasional Masa Kini dan Masalahnya : Dialog Utara—Selatan*
- J. PANGLAYKIM, *Keuntungan Lebih Besar Yang Dicapai Bank-bank Amerika Karena Bisnisnya Dengan Dunia Ketiga*

6 + 7. BEBERAPA PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

- A.R. SUTOPO, *Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam SALT : Mencari Perimbangan Persenjataan Strategis*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara*
- O. ABDULRACHMAN, *Kawasan Timur Tengah Tak Kunjung Damai*
- Bing P. LUKMAN, *Gerakan Euro—Komunisme dan Supremasi Komunis Uni Soviet*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pergolakan di Kawasan Laut Merah*

8. PERKEMBANGAN ASEAN

- Bing P. LUKMAN, *Menjelang Dasawarsa ASEAN : Suatu Tinjauan Kultural*
- N. ARSJAD, *Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN : Mungkinkah Dicapai?*
- Bing P. LUKMAN, *Indocina Sparing Partner ASEAN*
- Christianto WIBISONO, *Perspektif Kompetisi Indonesia—Vietnam*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Minoritas Muslim di Pilipina Selatan : Prospek Penyelesaian Yang Menyeluruh*

9. GENERASI MUDA

- Pande Radja SILALAH, *Generasi Muda, dalam Strategi Pembangunan di Masa Depan*
- S. HARTO, *Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Pedesaan*
- S. HARTO, *Perguruan Tinggi Swasta dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia : Suatu Tinjauan tentang Masalah Pembinaan dan Pengembangannya*

10. JEPANG DAN POLITIK EKONOMI LUAR NEGERINYA

- J. PANGLAYKIM, *Perubahan-perubahan Politik dan Konsep Kerjasama, Keamanan dan Perbatasan Ekonomi Jepang*
- Pande Radja SILALAH, *Pandangan Jepang terhadap ASEAN Berubah?*
- J. PANGLAYKIM, *Doktrin Fukuda : Suatu Pandangan Bisnis*

11. BEBERAPA MASALAH DALAM NEGERI

- Rahman RANGKUTI, *Masalah Peningkatan Produksi Beras*
- F.X. SOEDIJANA, *Kebijaksanaan Perburuan dalam Penanaman Modal Asing*
- N. ARSJAD, *Pasar Uang dan Pasar Modal di Indonesia : Perkembangan, Masalah dan Hambatannya*
- S. HARTO, *Masalah "Kultur Oposisi" dalam Demokrasi Pancasila*

12. BEBERAPA ULASAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Timur Tengah Fokus Perhatian Dunia Tahun 1977*
- S. HARTO, *Masalah Kebebasan Ilmiah dan Kebebasan Mimbar pada Perguruan Tinggi*
- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Dalam Negeri Tahun 1977*

TAHUN VII, 1978

1. PERSPEKTIF 1978

- J. PANGLAYKIM, *Indonesia dan Fokus Bisnis Internasional dalam Tahun 1978*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perlombaan Timur—Barat di Kawasan Samudera Hindia*
- N. ARSJAD, *Masalah Krisis Dollar Amerika Serikat dan Pengaruhnya atas Nilai Rupiah*

MONOGRAF

1. J. PANGLAYKIM, *BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG MEMPERTINGGI KAPABILITAS DAN KAPASITAS BANK—BANK SWASTA NASIONAL* Rp 700,—
2. A.M.W. PRANARKA, *SITUASI KULTURIL DUNIA DEWASA INI* Rp 700,—
3. KWIK Kian Gie, *KREDIT MACET, DILEMMA MASA KINI* Rp 700,—
4. Jusuf WANANDI, *KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRESIDEN CARTER DAN PERANAN KONGRES AS* Rp 700,—

DAFTAR ISI THE INDONESIAN QUARTERLY

Vol. I No. 1, OCTOBER 1972

- Ali MOERTOPO, *Some Basic Considerations in 25-Years Development*
- Adam MALIK, *Indonesia's Foreign Policy*
- SOEDIJANA, *People's Consultative Assembly*
- Barlianta HARAHAP, *Changes in the State Budget and Its Relationship to the Development Process in Indonesia*
- Gunawan MUHAMMAD, *In Search of a New Ethos*
- Chronicles

Vol. I No. 2, JANUARY 1973

- Juwono SUDARSONO, *ASEAN: The Uncertain Commitment*
- LIE Tek Tjeng, *ASEAN and East Asia in the Seventies: Some Remarks*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Foreign Economic Relations — Some Trade Aspects*
- J. PANGLAYKIM (PANGESTU), *Domestication of Multinational Corporations and Southeast Asia*
- Sayidiman SURYOHADIPROJO, *The Future of Southeast Asia*
- Soerjono SOEKANTO, *Elites in Three Southeast Asia Countries*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *Neutralization: A New Hope of Southeast Asia*
- Documents : The ASEAN Declaration; Organizational Chart of ASEAN; The Kuala Lumpur Declaration
- Chronicles

Vol. I No. 3, APRIL 1973

- Rosihan ANWAR, *Socio-Political Aspects of the MPR*
- Rufinus LAHUR, *The Broad Lines of the State Policy*
- SUKIJAT, *General Government and Regional Autonomy*
- Soeleiman SOEMARDI, *Pattern of Social Development According to the Broad Lines of the State Policy*
- A. HAFID, *Population Policy and Social-Economic Development in the Broad Lines of the State Policy*
- MASHURI, *Problems Underlying Educational Reform*

- Jakob UTOMO, *The Indonesian Press and Development*
- Barlianta HARAHAAP, *Election of the President and Vice-President : Office, Responsibility and Power*
- Documents : The Broad Lines of the State Policy; Bio-Sketch of President Soeharto; Bio-Sketch of Vice-President Sri Sultan Hamengku Buwono IX
- Chronicles

Vol. I No. 4, JULY 1973

- SOEDJATMOKO, *Reflections on Non-Alignment in the 1970's*
- O. Sutomo ROESNADI, *ASEAN and the Great Powers.*
- M. Hadi SOESASTRO, *Japan and Southeast Asia : A Regional or a Global Question?*
- J. PANGLAYKIM, *Some Notes on Japan — Indonesia Business Relations : An Indonesian View*
- Sri-Edi SWASONO, *Some Notes on the Nurturing of the Indonesian Entrepreneur*
- Sayidiman SURYOHADIPROJO, *The Territorial Defense Concept*
- Ali MOERTOPO, *The Security Aspect of Energy Resources*
- Tb. Bachtiar RIFAI, *Education and the Development of the Younger Generation*
- Documents : Mineral Resources Development in Indonesia; Japanese Investment in Indonesia
- Chronicles

Vol. II No. 1, OCTOBER 1973

- BOECHARI, *Some Aspects of Traditional Society*
- Moh. Said REKSOHADIPRODJO, *The Inner Life of the Javanese*
- T.O. IHROMI, *The Relevance of Studying Ethnic Groupings in Indonesia*
- Bonokamsi DIPOJONO, *Kebatinan and Kebatinan Movements for the Javanese*
- Soerjono SOEKANTO, *Elites in Adat Villages of Lampung and Minangkabau*
- Ajip ROSIDI, *Experiences in Recording Pantun Sunda*
- Pandam GURITNO, *Wayang Purwa*
- Anton M. MOELIONO, *Terms and Terminological Language*
- Chronicles

Vol. II No. 2, JANUARY 1974

- Soedjono HOEMARDANI, *Indonesia — Japan Relations in the Future — A Strategic Review*
- Moh. SADLI, *Impressions on the First Japanese-Indonesian Conference*
- Soemitro DJOJOHADIKUSUMO, *The Economic Future of the Pacific Basin*
- Daed JOESOEF, *Knowledge Economy and World Economy*
- THEE Kian-wie, *Foreign Investment and Labour-Intensive Industries*
- M. Hadi SOESASTRO, *A Well-Balanced Growth Coupled with Justice : An Economic or a Political Issue?*
- NUGROHO, *Data Flow and Statistical Organization in Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Business Administration : Curricular Implications*
- A.M.W. PRANARKA, *Critical Analysis of the Process of Educational Reform in Indonesia*
- Paramita R. ABDURACHMAN, *In Search of Spices : Portuguese Settlements on Indonesia Shores*
- Chronicles

Vol. II No. 3, APRIL 1974

- Juwono SUDARSONO, *International Studies in Indonesia : Problems in Training and Research*
- Harsja W. BACHTIAR, *The Social Sciences in Indonesia*
- Iskandar ALISJAHBANA, *Technology and Development*
- Selo SOEMARDJAN, *Tourism Site Development Planning Problems and Possibilities*
- Wiratmo SUKITO, *National Resilience and the Role of Culture*
- Dilip CHANDRA, *Indo-Indonesian Relations : An Indian Viewpoint*
- Chronicles

Vol. II No. 4, JULY 1974

- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Energy and Raw Materials Present and Future.*
- Ali MOERTOPO, *Politics and Raw Materials : Challenges of the World Today and the Consequences for Domestic Policies*
- Mohammad SADLI, *Oil and Development*
- H.S. KARTADJOEMENA, *Independence and International Realities : Indonesia as Natural Resource Producer and an Intermediate Power*
- St. Munadjat DANUSAPUTRO, *Wawasan Nusantara and the International Sea System*
- Documents : Address by the President of the Republic of Indonesia, H.E. General Soeharto; Opening Statement by the Leader of the Indonesian Delegation at the Seventh ASEAN Ministerial Meeting, Jakarta 7 May 1974; Joint Communiqué
- Chronicles

Vol. III No. 1, OCTOBER 1974

- Ali MOERTOPO, *The International and Strategic Aspects of the Energy Problem*
- Donald G. McCLOUD, *Quantitative Analysis in Indonesian Foreign Policy.*
- Soedjana SAPIIE, *Transfer of Technology A Proposed Solution for Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Financial Institutions in Indonesia : Some Notes*
- Anwar NASUTION, *Macro-Economic Development 1966-1973*
- Harimurti KRIDALAKSANA, *The Function of a Standard Dictionary in the Development of Indonesian*
- Chronicles

Vol. III No. 2, JANUARY 1975

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *A Look at the Economy in 1974*
- Daoed JOESOEF, *International Economy Including Problems of Natural Resources*
- Mochtar KUSUMAATMADJA, *Indonesia and the Law of the Sea Issue*
- Nugroho NOTOSUSANTO, *The Historical Development of the Dual Function of the Indonesian Armed Forces*
- Mastini HARDJO—PRAKOSO, *The Development of Libraries in Indonesia*
- Chronicles

Vol. III No. 3, APRIL 1975

- N. ISKANDAR, *When Z.P.G. in Indonesia?*
- S.B. JOEDONO, *Japanese-Indonesian Relations : Present Problems and Future Possibilities*
- KWIK Kian Gie, *Foreign Capital and Economic Domination*
- Z. SALIM, *The Case for Industrially-Based Transmigration : Some Suggestions*

- Haryati SOEBADIO, *The Documentary Study of Traditional Balinese Architecture Some Preliminary Notes*
- Chronicles

Vol. III No. 4, JULY 1975

- St. Munadjat DANUSAPUTRO, *The International Sea System in Perspective*
- J. PANGLAYKIM, *Financial Markets and Their Contribution to the Development of ASEAN: An Assessment*
- Bing P. LUKMAN, *After the War : Indochina and the Politics of Southeast Asia*
- J. Stephen HOADLEY, *New Zealand and Indonesia : The Evolving Relationship in Regional Perspective*
- Hermien Hadiati KOESWADJI, *The Historical Development of Villages on the Island of Lombok*
- Chronicles

Vol. IV No. 1 OCTOBER 1975

- H. Roeslan ABDULGANI, *The Origins of the Concept "Free and Active" in Indonesian Foreign Policy*
- Taufik ABDULLAH, *National Integration and Social Science in Indonesia*
- LIE Tek Tjeng, *The Asahan Project and the Future of Indonesian-Japanese Relations : Some Remarks*
- H. SIREGAR, *Prognostications for Indonesian Selfsufficiency in Rice*
- Wiratmo SUKITO, *The Inviolability of Cultural Frontiers*
- Chronicles

Vol. IV No. 2, 3, 4 SPECIAL ISSUE 1976

- J. Soedjati DJIWANDONO, *The ASEAN after the Bali Summit*
- Ali MOERTOPO, *Political, Economic and Strategic Development of Southeast Asia with Particular Emphasis on the Future of ASEAN*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *A Note on ASEAN: Present and Future*
- J. PANGLAYKIM, *Indonesia's Economic and Business Relation with other ASEAN Countries*
- Daed JOESOEF, *Some Thoughts on Free Trade*
- Michael LEIFER, *Problems and Prospects of Regional Cooperation in Asia : The Political Dimension*
- Documents : The ASEAN Declaration ; The Kuala Lumpur Declaration; Declaration of ASEAN Concord; Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia; Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat; Joint Press Communique of the Meeting of the ASEAN Heads of Government, Bali, 23-24 February 1976
- Chronicles

Vol. V No. 1, JANUARY 1977

- Daed JOESOEF, *The New International Economic Order*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Technology, Economic Growth and Environment*
- J. PANGLAYKIM, *Commodity Price Stability*
- A.R. SOEHOED, *Commodities and Viable Economic Sectors A Possible Basis for Development Planning*
- O. Abdul RACHMAN, *Minerals, Food and Shipping : Factors in Strategic Considerations*

- Soedjono HOEMARDANI, *Supervision of Development*
- *Chronicles*

Vol. V No. 2, APRIL 1977

- J. Stephen HOADLEY, *New Zealand and ASEAN*
- Ali MOERTOPO, *The Indian Ocean : Strategic and Security Problems*
- J. PANGLAYKIM, *North-South Production Trade Patterns*
- W. Donald McTAGGART, *Aspects of the Tourist Industry in Indonesia*
- Ziad SALIM, *The Growth of the Indonesian Language : The Trend towards Indo-Saxonization* †
- Sartono KARTODIRDJO, *Peasant Mobilization and Political Development in Indonesia*
- *Chronicles*

Vol. V No. 3, JULY 1977

- Harry TJAN SILALAH, *The 1977 General Elections : The Results and the Role of Traditional Authority Relations in Modern Indonesian Society*
- WIJARSO, *The Energy Game: An Indonesian Version*
- Ziad SALIM, *Overdevelopment as a Development Problem*
- Hermien Hadiati KOESWADJI, *Some Legal and Medical Problems in the Implementation of the National Family Planning Program in Indonesia*
- Peter and Sheryl SILZER, *Discourse Considerations in Bahasa Indonesia*
- *Chronicles*

Vol. V No. 4, OCTOBER 1977

- S. HARTO, *Private Universities in the System of Higher Education in Indonesia*
- M. Soenardi DJIWANDONO, *Introducing KKN : Indonesia's National Study Service Scheme*
- MASHURI, *Pancasila Democracy*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Energy Perspectives of the Third World*
- John M. MURPHY, *The International Dimensions and Domestic Considerations of Deep Seabed Mining*
- Franklin B. WEINSTEIN, *The United States, Japan and Asian Security*
- *Chronicles*

Vol. VI No. 1, JANUARY 1978

- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *What do the "Take-Off" Countries Expect from Industrial and Oil Producing Countries?*
- J. PANGLAYKIM, *The Fukuda Doctrine : A Businessman's View*
- Ali Noor LUDDIN, *Investment Opportunities in Agro Industry in Indonesia*
- Sabana KARTASASMITA, *Aspects of Marketing and International Cooperation in Tin Commodities with Reference to Indonesia*
- A.S. NATABAYA, *The Archipelagic Principles and Indonesia's Interests*
- Aprilani SOEGIARTO, *The Development of Marine Science Capabilities in Indonesia*
- Book Review : Donald W. Fryer & James C. Jackson, *Indonesia*
- *Chronicles*

Vol. VI No. 2, APRIL 1978

- Mari Elka PANGESTU, *The Unemployment Drama in the Less Developed Countries : Indonesia*
- Ali MOERTOPO, *Political and Economic Development in Indonesia in the context of Regionalism in Southeast Asia*
- Jusuf WANANDI, *President Carter's Foreign Policy and the Role of the American Congress*
- Hendra ESMARA, *The Long-Range Economic Perspective of West Sumatra*
- Haryati SOEBADIO, *Kartini, A Modern Woman, and Yet a Child of Her Time*
- Book Review : Douglas Miles M.A., PhD., *Outlass & Crescent Moon, A Case of Social and Political Change in Outer Indonesia*
- Chronicles

MAJALAH ANALISA, RINGKASAN PERISTIWA, THE INDONESIAN QUARTERLY dan BUKU-BUKU CSIS dengan mudah bisa Anda dapatkan di

MEDAN: TB Deli; PEKANBARU: TB Penyalur Berita; PADANG: TB Pancaran Ilmu, TB Pustaka Anggrek; PALEMBANG: TB Sriwijaya; JAKARTA: TB Ichtiar, TB Gramedia, TB Tropen, TB Gunung Agung, TB BPK Gunung Mulia, TB Tamaddun, TB Tintamas; TB Djembatan; TB Kinta; TB Marco; TB Pradjanaparamita, Bursa Buku Fak. Ekonomi UI; BANDUNG: TB Sumur Bandung, TB Karya Nusantara, TB Djawa; SEMARANG: TB Merbabu, TB Surya, TB Gajah Mada; JOGYAKARTA: TB Hien Hoo Sing, TB Kedaulatan Rakyat, TB Pembangunan; MAGELANG: TB Kedaulatan Rakyat; SURAKARTA: TB Budhilaksana; MALANG: TB Atoom; SURABAYA: TB Sari Agung; UJUNG Pandang: TB Bhakti Baru, Hasanuddin University Press; IRIAN JAYA: TB Gunung Agung

Berlangganan ANALISA - Anda berarti memetik keuntungan.

Apabila Anda berminat mendapatkan ANALISA harga tiap eks Rp. 700,- masih ditambah ongkos kirim sekitar 15 %. Tapi bila Anda memilih untuk menjadi Pelanggan ANALISA, maka untuk langganan setahun (12 nomor penerbitan) Anda cukup hanya membayar Rp. 8.000,- sudah termasuk ongkos kirim. Istimewa bagi Mahasiswa akan memperoleh potongan khusus 10 % untuk langganan setahun (sertakan foto copy Kartu Mahasiswa Anda). Catatkan dari sekarang nama Anda sebagai Pelanggan ANALISA sekaligus mengirim uang langganannya.

FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai Pelanggan ANALISA

Nama : _____

Alamat : _____

Universitas * : _____

Untuk langganan selama setahun (12 nomor) mulai nomor : _____

Bersama ini kami kirim uang langganan Rp. 8.000,-/Rp. 7.200,-
melalui pos wesel atau _____

Mengetahui **

Pelanggan,

* khusus untuk Mahasiswa

** cap dan tanda tangan pihak Fakultas

Kirimkan Formulir ini kepada :

Centre for Strategic and International Studies

up. Biro Publikasi, Jl. Tanah Abang 111/27 Jakarta Pusat, Telp. 356532-5



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintahan dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku yang membahas masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, strategi, pemerintahan, ideologi dan hubungan internasional yang sangat luas.



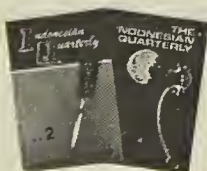
ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu



RINGKASAN PERISTIWA

majalah dwipekan, berisikan ringkasan peristiwa di dalam negeri [politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan hankam] dan dunia internasional yang kompleks sifatnya, bersumberkan dari surat kabar, buletin dan majalah dalam dan luar negeri. Majalah ini merupakan salah satu sumber penulisan buku 'Indonesia dan Dunia Internasional' yang diterbitkan setiap tahun oleh CSIS



THE INDONESIAN QUARTERLY

majalah triwulanan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional



BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain

CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analisis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada :

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Biro Publikasi

Jl. Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat

Telpon : 356532 - 35